

ANALISA

1980—10

PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES



ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

Pemimpin Redaksi/

Penanggung jawab : Kirdi DIPOYUDO

Dewan Redaksi : Daoed JOESOEF, Rufinus LAHUR, J. PANGLAYKIM, A.M.W. PRANARKA, Pande Radja SILALAH, M. Hadi SOESASTRO, B. SUNARIO, Harry TJAN SILALAH, Jusuf WANANDI dan Rin Purwani BUDI

Redaksi Pelaksana : Kirdi DIPOYUDO, B. SUNARIO, Rin Purwani BUDI

STT: S.K. Menpen R.I. No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978, tanggal 28—8—1978
ISSN 0126 — 222X

Redaksi : Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat, Telepon 356532-5

Tata Usaha : Biro Publikasi CSIS, Jalan Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat, Telepon 349489

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

PENGANTAR REDAKSI	894
-------------------	-----

PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT	897
---------------------------	-----

MENYONGSONG PELAKSANAAN KEWAJIBAN BELAJAR TINGKAT PENDIDIKAN DASAR	
---	--

<i>E. SOENARYA</i>	911
--------------------	-----

PENDIDIKAN SEBAGAI SARANA PEMERATAAN PENDAPATAN	
--	--

<i>Murwatie B., RAHARDJO</i>	925
------------------------------	-----

DIMENSI PENDIDIKAN, PEMBAURAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL	
---	--

<i>A. Sudiharto DJIWANDONO</i>	940
--------------------------------	-----

BELAJAR DARI KEPELOPORAN PEMUDA 1928	
--------------------------------------	--

<i>Rufinus LAHUR</i>	960
----------------------	-----

PENGANTAR REDAKSI

Hari depan bangsa dan negara bukan hanya tergantung pada para orang tua, pendidik dan pemimpin yang sekarang memegang kekuasaan, akan tetapi juga pada anak-anak yang sedang berkembang. Tanpa bantuan yang secukupnya anak-anak ini kurang dapat berkembang menuju kedewasaan, dalam arti mampu mengembangkan semua bakat, mencapai kematangan jiwa dan menjadi warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Dengan demikian usaha-usaha mempersiapkan anak-anak untuk masa mendatang atau pendidikan mutlak diperlukan.

Pendidikan dapat dilihat sebagai seluruh komunikasi pengetahuan dan pembentukan nilai-nilai. Pada dasarnya kegiatan ini memiliki dimensi yang luas baik sebagai proses individualisasi maupun sosialisasi. Sifatnya harus menyeluruh, dan meliputi pengembangan segenap kemampuan manusia yaitu, akal budi, kemauan, perasaan estetis, kemampuan badan dan kemampuan mengerjakan sesuatu. Di samping pendidikan formal yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga tersendiri terutama sekolah-sekolah, terdapat pendidikan dalam arti luas yang sering kali berproses di luar sekolah.

Dalam memikirkan dan melaksanakan pendidikan nasional, pertama-tama kita harus memperhatikan penegasan GBHN bahwa pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila itu bertujuan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Sehubungan dengan itu maka keluarga, masyarakat dan pemerintah berke-wajiban membantu anak-anak didik, dan melengkapi mereka dengan hal-hal yang tidak dapat diusahakan oleh mereka masing-masing, karena setiap anak berhak atas pendidikan, seperti diakui baik dalam Piagam PBB tentang Pernyataan Umum Hak-hak Azasi (pasal 26 ayat 1) maupun dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi: "Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran." Untuk memungkinkan pelaksanaan hak tersebut maka dalam pasal 31 ayat 2 ditetapkan: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang." Dalam rangka itu pula pada tahun 1950 ditetapkan Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah, yang pada tahun 1954 dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia dengan Undang-undang tahun 1954, dan kemudian dilengkapi dengan Undang-undang Perguruan Tinggi No. 22 tahun 1961. Sejauh ini pendidikan telah dilaksanakan secara luas di Indonesia, tetapi keadaannya sekarang ini masih membuat kita merasa amat prihatin.

Dalam rangka perbaikan keadaan pendidikan itu Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, telah menyusun suatu naskah mengenai sistem pendidikan nasional yang semesta, menyeluruh dan terpadu dengan judul "Laporan Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional". Seperti ditegaskan dalam laporan ini, adanya satu sistem pendidikan nasional yang semesta, menyeluruh dan terpadu, yang memperhatikan keberagaman lingkungan dan wilayah, sungguh-sungguh merupakan wahana yang amat penting di dalam perjuangan bersama mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

Pendidikan adalah bagai pisau bermata ganda yang pada pokoknya merupakan usaha sadar mengembangkan anak-anak didik menjadi pribadi yang merdeka dan memiliki kematangan jiwa sesuai dengan hakekat masing-masing, sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan sesama manusia. Di samping itu pendidikan juga merupakan pembentukan nilai-nilai mereka dalam rangka menjadi manusia pembangun yang berpancasila, yaitu warga masyarakat yang baik yang mencintai bangsa dan tanah airnya. Demikian penting arti dan peranan pendidikan, sehingga perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan landasan dan arah kebijaksanaan yang pasti.

ANALISA bulan ini menyajikan tema PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT. Karangan pertama menganalisa pendidikan dalam arti pengajaran bagi masyarakat. Dengan semakin kompleksnya suatu masyarakat, akan muncul jenis dan tingkat baru berbagai sekolah. Selanjutnya E. SOENARYA mengupas pelaksanaan kewajiban belajar tingkat pendidikan dasar. Anggapan semacam ini tidak sepenuhnya benar, karena ditinjau dari kemampuan yang terbatas maka pendidikan dasar merupakan pendidikan minimal bagi

bangsa Indonesia yang dapat dijangkau saat ini. "Pendidikan Sebagai Sarana Pemerataan Pendapatan", oleh Murwatie B. RAHARDJO menyajikan pemikiran bahwa dunia pendidikan dapat memberikan sumbangan penting dalam usaha pemerataan yang merupakan fokus perhatian dalam Pelita III. Dimensi pendidikan yang lain dikupas oleh A. Sudiharto DJIWANDONO dalam "Dimensi Pendidikan - Pembauran dan Pembangunan Nasional", menyoroti asimilasi atau integrasi WNI keturunan asing ke dalam kesatuan bangsa Indonesia yang harmonis. Karangan yang terakhir yang ditulis oleh Rufinus LAHUR memaparkan dan menganalisa fakta sejarah untuk menyunting manfaatnya dalam usaha memperjuangkan cita-cita bangsa, sebagai konsekuensi kelanjutan perjuangan kemerdekaan.

Oktober 1980

REDAKSI

PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT*

Pendidikan dapat dilihat sebagai meliputi *seluruh komunikasi pengetahuan dan pembentukan nilai-nilai*. Dalam arti ini pendidikan adalah sinonim dengan sosialisasi. Sepanjang sebagian besar sejarah manusia pengajaran secara sengaja adalah insidental dan sporadis, dan bahkan dalam masyarakat-masyarakat yang paling kompleks pun banyak pengajaran, dalam arti yang lebih luas, dilakukan oleh badan-badan di luar sekolah. Akan tetapi di sini fokus adalah pada pendidikan formal seperti dilaksanakan oleh institusi-institusi tersendiri, terutama sekolah-sekolah. Maksud pendidikan formal ialah menyiapkan anak bagi peralihan dari hubungan-hubungan keluarga yang tertutup tetapi menyebar ke hubungan-hubungan masyarakat luas yang beraneka ragam. Pada intinya pendidikan adalah *bimbingan anak oleh orang dewasa*. Hanya dalam masyarakat-masyarakat kompleks pengajaran sering diberikan oleh seorang dewasa kepada orang dewasa lain. Terdapat banyak keterangan munculnya sekolah-sekolah, dan sebab-sebab yang sama ini tetap menghasilkan jenis-jenis dan tingkat-tingkat baru sekolah-sekolah dengan semakin kompleksnya masyarakat-masyarakat.

1. MUNCULNYA PENDIDIKAN FORMAL

Dalam banyak suku yang buta huruf suatu kelompok usia menerima bimbingan dalam ketrampilan-ketrampilan dewasa dan khususnya dalam upacara-upacara ibadat serta kepercayaan dan simbolisme keagamaan, di bawah

* Diambil dari C. Arnold Anderson, "Education and Society", dalam David L. Sills, Ed., *International Encyclopedia of the Social Sciences* (New York - London, 1972), IV, hal. 517-525, oleh H. Caroko

asuhan seorang dewasa yang khusus ditugaskan. *Komponen-komponen idologi dan upacara* tampak dalam setiap pendidikan formal, biarpun komponen-komponen itu menjadi kurang tegas dan rupanya juga kurang efektif waktu sekolah-sekolah diberi tanggung-tanggung jawab yang lebih beraneka ragam dan sangat sekuler. Kadang-kadang kita saksikan suatu kelompok penguasa yang berusaha membujuk kaum muda menerima kepercayaan-kepercayaan yang tidak dianut kebanyakan orang tua; akan tetapi secara khas sekolah-sekolah diharap menciptakan sepakat kata mengenai tema-tema pemersatu tertentu di antara banyak warga negara.

Sumber kedua pendidikan formal terletak dalam kenyataan bahwa sementara orang muda harus mendapatkan kemahiran dalam *seperangkat ketrampilan* yang bukan saja bisa berbeda dari ketrampilan-ketrampilan orang tua akan tetapi juga *terlalu rumit bagi orang tua untuk mengajarkannya*. Sampai tahap lanjut perkembangan teknologi suatu masyarakat, kebanyakan orang mempelajari ketrampilan pencarian mereka sebagai *hasil sampingan* perkembangan mereka. Penyimpangan pertama dari pola itu terungkap dalam prana-ta magang di bawah seorang ahli dalam suatu rumah tangga lain; orang-tua orang muda itu boleh jadi mengajarkan kerajinan yang sama, tetapi impersonalitas pengajaran yang dibutuhkan mendorong mereka untuk mengalihkan tanggung jawab itu kepada rumah tangga lain. Di banyak masyarakat sekolah didirikan untuk mengajarkan kesenian pegang buku dan surat-menyurat kepada anak-anak pedagang dan tukang-tukang; jenis pengajaran ini kadang-kadang diberikan di sekolah dasar, tetapi di mana pendidikan kejuruan diorganisasi dalam sekolah khusus, biasanya itu terjadi pada tingkat kedua atau ketiga sekolah yang membangun atas pendidikan dasar suatu sekolah bersama. Di kebanyakan masyarakat, sekolah-sekolah tidak banyak menyumbang pada pendidikan khusus untuk pekerjaan-pekerjaan tangan tetapi lebih berfungsi untuk *menyiapkan anak bagi pendidikan lanjut* dalam ketrampilan-ketrampilan tangan maupun nontangan di tempat kerja.

Biarpun bermacam-macam jenis pendidikan luar sekolah dan informal adalah umum di semua masyarakat, perkembangan pengajaran yang penuh hanya terjadi *setelah muncul tulisan*. Penggunaan tulisan memberikan suatu dimensi tambahan baru kepada masyarakat: suatu perasaan masa lampau, kadang-kadang juga antisipasi hari depan, dan badan-badan baru untuk koordinasi kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok yang tersebar dan heterogin. Tulisan mungkin menjadi monopoli kelompok imam (pemimpin agama) dan penggunaan sekulernya dibatasi pada para pejabat, atau dapat digunakan secara luas. Dalam kelompok pemimpin agama bisa berkembang sekolah-sekolah yang beraneka ragam dan bertingkat-tingkat; demikian pun pengajaran dan sertifikasi kompetensi bisa menjadi sangat terperinci di kalangan pejabat.

Pernah dikemukakan bahwa jam mulai digunakan untuk memberikan ketepatan kepada koordinasi kegiatan dalam waktu yang mengatasi observasi langsung dan jangkauan suara. Demikian pun tulisan meluas ketika ternyata berguna *mengkoordinasi kegiatan-kegiatan* melampaui waktu maupun ruang. Suatu masyarakat dibatasi oleh bidang di mana pertukaran sering dan tentang mana orang-orang tanggap terhadap pengaruh-pengaruh dari pusat-pusat fokus bersama; kristalisasi dan preservasi kesatuan ini menjadi semakin bergantung pada pendidikan formal dalam ketrampilan-ketrampilan membaca-menulis yang dasar dan dalam tema-tema pemersatu kebudayaan. Namun usaha sengaja oleh kelompok-kelompok penguasa untuk menyebarkan ketrampilan-ketrampilan dasar membaca-menulis adalah jarang sampai jaman modern - biarpun sekolah-sekolah tersebar luas di Cina beberapa abad yang lalu dan dalam bentuk yang kurang terperinci juga di India dan sementara negeri Islam. Sekolah-sekolah bersama umumnya didirikan dalam usaha untuk menjamin *kesatuan ideologi* suci atau sekuler di kalangan penduduk; pertimbangan-pertimbangan *ekonomi dan politik* langsung hanya di jaman modern menjadi penting.

Bahkan dalam masyarakat-masyarakat dengan teknologi relatif sederhana, pengajaran melebihi kemampuan membaca dan menulis dibina oleh perlunya memelihara laporan-laporan atau kronikel-kronikel serta melakukan surat-menyurat, dan oleh keinginan untuk membaca buku-buku suci. Seperti terungkap dalam prakarsa yang diambil di kalangan pengrajin dan pedagang, kemampuan memegang buku sederhana dan menangani transaksi-transaksi di pasaran jauh merupakan insentif lain. Dengan meluasnya perdagangan dan kontak-kontak lain, jasa penulis okasional ternyata tidak memadai. Keuntungan kecakapan membaca-menulis menjadi penting bagi semakin banyak penduduk pada waktu orang-orang biasa mendapat kemampuan dan hak untuk memilih antara cara-cara hidup alternatif. Buku-buku berguna diterbitkan di samping buku-buku pendidikan, bersama-sama dengan cerita-cerita tentang meluasnya dunia dan melodrama-melodrama kehidupan sosial. Kegembiraan meluasnya pengalaman lewat lambang-lambang dari apa yang tidak langsung hadir pada ruang dan waktu tidak boleh dianggap enteng.

Persekolahan, berbeda dengan latihan dan magang yang kurang formal, tidak mencakup partisipasi dalam kegiatan-kegiatan dewasa; sebagai gantinya, mata-mata pelajaran sekolah dan hidup dewasa *disalurkan lewat guru*, yang menjadi salah satu spesialis kunci dalam masyarakat, di samping prajurit, imam, pedagang, pejabat dan guru tukang. Dalam masyarakat-masyarakat di mana kemampuan membaca-menulis tidak tersebar luas, seperti di Eropa pada periode awal Abad Pertengahan, mempelajari buku mendapat watak magang khusus untuk menjadi anggota elit intelektual. Kalau tidak lahir dalam elit ini, mahasiswa-mahasiswa dalam masyarakat-masyarakat serupa itu di luar sekolah-sekolah biasanya tidak bertemu dengan orang-orang dewasa yang

menggunakan pelajaran di sekolah dalam kehidupan sehari-hari mereka, karena hanya merupakan suatu pola masyarakat di mana kata cetakan tersedia secara luas dan umumnya dimengerti. Akan tetapi bahkan dalam masyarakat-masyarakat yang sangat pandai membaca-menulis kesempatan siswa-siswa untuk menggunakan kepandaian itu sangat terbatas. Salah satu sebabnya ialah semakin panjangnya periode persekolahan wajib. Anak sekolah mengantisipasi kegiatan dewasa, tetapi persepsinya mengenai hal itu didapatnya lewat guru dan lingkungan sekolah. Dengan lanjutnya tahun-tahun di sekolah dia akan semakin mengantisipasi hari depan sosialnya sendiri dan mulai melihat relevansi pelajaran-pelajarannya. Akan tetapi hanya kalau pendidikannya hidup dan pelajaran berarti dia akan memasukkan pengalaman-pengalaman sekolahnya dalam konsepsinya tentang dirinya sendiri sehingga pelajaran menjadi perkembangan dirinya dan bukan pelajaran otoriter. Pada tingkat-tingkat yang berbeda-beda, perguruan memungkinkan anak mendapat ketrampilan-ketrampilan yang mempermudah kegiatan-kegiatan bersama dan yang memungkinkannya lewat imajinasinya ikut serta dalam kehidupan orang-orang lain (termasuk mereka yang telah meninggal atau belum lahir), menghubungkan dirinya sendiri dengan kegiatan-kegiatan yang tidak dilakukan dalam kehidupan kelompok sebayanya, dan untuk memikirkan entitas-entitas sosial seperti bangsa.

Pada semua tingkat pelajaran-pelajaran di ruang sekolah dilingkari keputusan-keputusan dan nilai moral, tak peduli kurikulumnya. Salah satu tendensi yang paling penting ialah bahwa pola-pola formal pelajaran-pelajaran sekolah itu sendiri menjadi *alat pelajaran moral* lewat penguasaan suatu mata pelajaran yang di luar murid. Terdapat cara-cara tepat untuk memecahkan masalah; ada pengejaan tepat; suatu karangan adalah teratur atau tidak. Moralitas ini menandai semakin besarnya jumlah spesialisasi dan profesi yang anggota-anggotanya tunduk pada disiplin penilaian impersonal prestasi-prestasi. Pelajaran moral langsung yang tidak dikaitkan dengan prestasi pengetahuan kiranya tidak akan berhasil.

Dengan semakin luas dan kompleksnya masyarakat, kemampuan membaca-menulis harus menjadi lebih luas tersebar dan ditanamkan lebih kuat, karena organisasi hampir semua segi kehidupan nasional bergantung padanya. Suatu bagian kaum muda yang semakin besar memerlukan pelajaran dasar yang diperluas dalam bahasa bersama pergaulan politik, ekonomi dan sosial; hanya secara ini mereka akan mampu menjalani pendidikan spesialis lebih lanjut yang menjadi suatu keharusan akibat meningkatnya diversifikasi peranan dewasa. Persekolahan adalah sekaligus suatu proses homogenisasi dan diferensiasi. Demikian pun, karena perubahan sosial menjadi lebih cepat dan penerimaan atau komitmen pada perubahan meluas, fungsi adaptif atau pemeliharaan tradisi dari sekolah untuk sebagian digantikan oleh dukungan dan penciptaan perubahan. Semakin kompleksnya masyarakat dan semakin luas

dan terperinci sistem sekolah yang menyertainya terungkap dalam perubahan dan semakin banyaknya prosedur dalam seleksi murid untuk mempertahankannya di sekolah-sekolah yang lebih tinggi dan untuk menunjuknya bagi jenis-jenis sekolah dan kurikulum. Peranan-peranan guru mula-mula dibedakan dari pekerjaan-pekerjaan lain dan kemudian secara intern dibagi menjadi ratusan.

2. SEKOLAH DAN MASYARAKAT

Individualisasi dan sosialisasi: dua hal ini adalah sepanjang sejarah pendidikan. Partisipasi pendidikan memberikan kepada orang-orang hal-hal bersama, tetapi juga memisahkan mereka dalam dunia-dunia khusus bahasa dan kegiatan. Sekolah-sekolah diharap memberikan kepada kaum muda ketrampilan-ketrampilan bersama yang sederhana dan universal, maupun mengidentifikasi sedikit orang yang bisa menjadi cemerlang, mencapai kepandaian yang menonjol, dan memerintah sesamanya. Kesenian komunikasi dan sepakat kata yang dimiliki bersama mengenai nilai-nilai yang dihargai adalah tujuan-tujuan utama sekolah di mana pun, tetapi para guru juga diandalkan untuk membina mereka yang berbakat dan memajukan mereka yang istimewa. Betapa jauh sekolah-sekolah memegang peranan dalam homogenisasi dan diferensiasi adalah sekaligus suatu ungkapan dan suatu faktor dalam skala masyarakat dan kebutuhannya yang disadari atau dilihat untuk integrasi. Ini juga bergantung pada soal apakah masyarakat yang bersangkutan itu elitis atau demokratis orientasinya.

Dalam masyarakat-masyarakat pra-modern, di mana setiap komunitas atau distrik mempunyai dialek, pakaian, dan bahkan satuan-satuan ukurannya sendiri, sekolah-sekolah boleh jadi tidak ada dan tidak perlu sebagai pelaku integrasi sosial. Akan tetapi, penyatuan masyarakat-masyarakat dan bangsa-bangsa menuntut agar kebudayaan-kebudayaan daerah dilenyapkan dan agar harapan-harapan dan praktek-praktek bersama diwajibkan untuk meniadakan kebiasaan-kebiasaan lokal. Secara historis, fungsi-fungsi sekolah yang paling sering dalam proses ini ialah *homogenisasi budaya suatu elit*. Tetapi pembentukan suatu elit yang bersatu secara bahasa dan ideologi memperkuat pembedaan-pembedaan status dan secara demikian juga memecah belah dengan menyendirikan elit. Kejadian-kejadian paralel dapat kita lihat dewasa ini pada bangsa-bangsa yang lebih muda, di mana tamatan-tamatan sekolah menengah (khususnya jika disatukan dengan asrama) dan universitas merupakan kepemimpinan baru yang berusaha menyatukan kebudayaan-kebudayaan lokal dalam satu bangsa. Bahkan di mana dasar-dasar ideologinya demokratis, sedikit pemimpin baru ini dalam bahaya menjadi terasing dari warga negara-warga negara lain yang sama sekali tidak ikut dalam "kebudayaan tinggi".

Unifikasi bangsa-bangsa dan masyarakat-masyarakat yang lebih besar tidak dapat mencapai banyak kemajuan tanpa adanya *sekolah umum* untuk kalangan-kalangan rakyat yang semakin luas. Salah satu contohnya ialah "sekolah-sekolah wanita" Inggris yang berkembang, dengan jumlah terbatas pengajaran membaca-menulis dan menghitung dan perhatian yang lebih besar untuk mengajarkan tingkah laku yang tepat bagi "rakyat jelata". Dengan perluasan dan perbaikannya yang berangsur-angsur, sekolah umum sekaligus *menantang elitisme* dan mengambil tanggung jawab untuk memajukan konsensus di kalangan rakyat mengenai tema-tema pilihan. Bahasa nasional pelan-pelan meluas melalui generasi-generasi murid yang berturut-turut, menyiapkan mereka untuk menerima perintah-perintah penguasa, ikut dalam upacara-upacara patriotisme, dan mengenal pahlawan-pahlawan serta kejadian-kejadian literatur serta sejarah. Penyebaran kemampuan membaca-menulis sekaligus merangsang dan memperluas partisipasi dalam kehidupan politik, dan meluasnya semakin banyak fasilitas mendasari penyatuan ekonomi yang lebih luas.

Sekolah-sekolah umum melakukan suatu fungsi *asimilasi antar kelas*, biarpun terbatas dan kasar. Lewat sekolah-sekolah itu anak-anak petani dan buruh memperoleh bahasa yang kurang kasap, kebiasaan-kebiasaan tingkah laku yang kurang kekerasan, sedikit pengertian tentang daya-daya tarik fasilitas-fasilitas budaya dan sedikit cara rakyat kehidupan sosial yang kompleks. Semakin banyak orang mengetahui keuntungan gratifikasi yang ditunda dan kerja sistematis. Dalam sistem-sistem sekolah yang lebih demokratis, asimilasi sosial ini bahkan dapat berlangsung terus dalam universitas. Sementara itu, penilaian tinggi terhadap pendidikan, yang mendorong sementara orang untuk memasuki pekerjaan-pekerjaan yang lebih digemari, merangsang penyebaran persekolahan lebih lanjut di kalangan rakyat.

Pada *tahap-tahap pertama* penyebaran sekolah, *perpecahan* akibatnya meluas dalam ruang maupun sepanjang garis status. Penerimaan sekolah di atas (dan bahkan di bawah) tingkat wajib tidak sama di antara distrik-distrik dan daerah-daerah. Pendidikan umum ternyata lebih berguna di sementara daerah daripada di lain-lain, dan di sementara distrik dia bisa cepat membimbing menuju penerimaan pendidikan menengah dan tinggi. Penduduk sementara daerah mendahului penduduk lain-lain daerah dalam pengetahuan dan kemakmuran, dalam menikmati secara aktif kebudayaan nasional, dan dalam kemampuan menikmati fasilitas-fasilitas suatu masyarakat yang maju. Perbedaan ini paling besar dalam masyarakat majemuk yang tidak mempunyai satu bahasa umum dan khususnya dalam bangsa-bangsa baru, di mana - pada tingkat tanpa tara dalam sejarah - sekolah-sekolah diandalkan untuk menciptakan satu rakyat bersatu dari banyak suku. Kalau bahasa daerah dipakai pada tingkat-tingkat awal, sekolah umum mungkin hanya mempunyai sedikit daya mempersatu.

Di mana sekolah-sekolah diselenggarakan oleh *kelompok-kelompok keagamaan* - bahkan di mana ada inspeksi sentral - isi nilai kurikulum mungkin menjadi bermata dua. Sejarah setiap bangsa mempengaruhi perimbangan pengaruh-pengaruh yang menjembatani agama-agama atau memperkuat kecenderungan-kecenderungan yang melihat ke dalam. Akan tetapi persaingan untuk mendapatkan otonomi dan bantuan keuangan dari pusat dapat meningkatkan penguasaan sentral atas kurikulum. Di mana banyak kekuatan berjuang untuk menciptakan suatu kesatuan nasional yang luas sebagai landasan, sekolah-sekolah terpisah mungkin mempunyai sedikit akibat memecah belah. Dalam kenyataan untuk minoritas keagamaan dan lain-lain sekolah-sekolah paroki berfungsi sebagai tahap-tahap dalam jalan menuju asimilasi, khususnya di mana satu bahasa digunakan oleh semua. Yang umum dalam pelajaran-pelajaran dan suasana semua sekolah membimbing kelompok masing-masing menuju asimilasi cara-cara hidup nasional yang meresap.

Ketika wajib sekolah umum diperpanjang, diperpanjang pula periode di mana sekolah-sekolah dapat melakukan fungsi-fungsi integrasi sosialnya dan tahun-tahun kehidupan sekolah bagi mereka yang meneruskan ke program-program pendidikan menengah dan tinggi yang semakin diperluas. Sekali lagi kita menyaksikan beraksinya kekuatan-kekuatan pemersatu dan pemisah karena sekolah-sekolah memegang peranan yang meningkat dalam masyarakat. Kebudayaan-kebudayaan khusus berbagai kelompok yang mempunyai pendidikan lebih baik yang dibina oleh persekolahan mereka kurang eksklusif daripada mereka dalam masyarakat-masyarakat elitis yang lebih sederhana; kebudayaan-kebudayaan yang terbatas ini pada tingkat yang lebih besar adalah suatu perluasan mendalam dari tema-tema dan praktek-praktek yang juga meresapi sekolah-sekolah yang lebih rendah.

Dengan demikian pendidikan secara terus menerus menciptakan *hambatan-hambatan komunikasi* di antara para warga masyarakat, bahkan kalau dia juga secara terus menerus *mengurangi isolasi*. Berkaitan dengan persekolahan adalah spesialisasi-spesialisasi pekerjaan dalam suatu masyarakat kompleks, dan sementara kelompok itu memanfaatkan sekolah-sekolah untuk memperkuat kedudukan-kedudukan istimewa mereka dengan membatasi jumlah calon-calon yang berkualifikasi. Tetapi meningkatnya permintaan dari tekanan-tekanan ekonomi dan penduduk juga memaksa penyingkiran hambatan-hambatan serupa itu. Sementara itu, meningkatnya standar persekolahan rata-rata berarti bahwa lebih sedikit batas-batas pekerjaan merupakan jurang antara kebodohan dan kepandaian.

Penyebaran persekolahan dan barang-barang konsumsi menciptakan *keaneka ragaman cara hidup* yang semakin besar biarpun juga membina kesinambungan status dalam masyarakat. Proses ini menemukan ungkapannya yang paling lengkap dalam universitas, karena betapa banyak pun suatu masyarakat memperjuangkan pendidikan komprehensif dan bukan pendidikan yang

beraneka ragam untuk berbagai bagian penduduknya, spesialisasi yang jauh pada tingkat universitas tak dapat dihindari. Dan adalah di universitas-universitas, waktu belakangan ini, bahwa telah timbul keinginan yang paling kuat agar orang-orang pandai mempunyai satu kebudayaan bersama.

3. KONSERVASI DAN INOVASI

Tugas pokok pendidikan formal di masa lampau ialah *menanamkan warisan kumpulan informasi dan kepercayaan untuk memelihara dan meneruskannya*. Akan tetapi dalam masyarakat-masyarakat yang lebih dinamis sekolah-sekolah ditugaskan untuk memainkan *peranan yang lebih kreatif dengan mendukung atau membina perubahan*; di mana-mana mereka secara tidak langsung memberikan dukungan kepada perubahan dengan memberikan kepada orang-orang alat-alat dasar untuk memperluas pengetahuan mereka secara tak terbatas dan untuk mengelolanya secara kreatif. Titik temu sosialisasi dan individualisasi dengan demikian aktif lagi.

Konservatisme pendidikan yang berakar pada agama atau moral yang telah mapan mempunyai salah satu contohnya dalam kepandaian Konfusian dan ujian-ujian birokratis di Cina dan dalam pengembangan pendidikan juru tulis di Eropa Abad Pertengahan. Namun bahkan dalam situasi-situasi itu, persekolahan tidak hanya berfungsi untuk membekukan gagasan-gagasan, karena di antara para elit *spekulasi filosofis tidak dapat dibatasi*. Dan di samping pendidikan kepandaian itu juga muncul jenis-jenis lain yang lebih populer dan praktis. Segera setelah ditemukan seni cetak, buku-buku yang mengutarakan hal-hal baru yang praktis untuk kehidupan sehari-hari dan praktek pertukangan mengalir dari percetakan - dan di Cina berabad-abad dari tangan penyalin - yang membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi orang-orang yang bahkan hanya mempunyai kemampuan minimal membaca dan menulis. Dana gagasan yang sama *merangsang inovasi keagamaan dan politik*, yang dalam sementara masyarakat ditunjang pembacaan buku-buku suci oleh rakyat.

Jaman modern menganggap soal biasa bahwa *perubahan adalah alamiah*. Kemampuan membaca-menulis berarti pertemuan dengan soal-soal baru dan menyiapkan orang-orang dari bermacam-macam kedudukan untuk bereaksi terhadap ide-ide baru dari banyak tempat. Mempertahankan kesinambungan meluasnya pengetahuan telah menjadi sumber pokok inovasi. Adalah berarti bahwa sebagian besar revolusi teknologi Barat adalah pekerjaan tukang-tukang yang memadukan daya temu mereka dengan buku-buku pegangan yang diterbitkan untuk mempercepat laju penemuan. Dalam kenyataan kaum terpelajar dan tukang-tukang yang dapat membaca-menulis mengadakan antar aksi yang lebih intensif pada abad-abad yang lampau daripada sekarang.

Secara progresif kemungkinan-kemungkinan komunikasi lewat tulisan dimanfaatkan oleh para pejuang pembaharuan politik dan sosial, oleh pemimpin-pemimpin keagamaan, dan oleh para penjual barang-barang. Pada abad kita dengan banyak persekolahan kita lupa bahwa orang hanya membutuhkan sedikit persekolahan untuk memanfaatkan kemampuan membaca-menulis, seperti kita juga melupakan kemampuan tradisi lisan.

Modernisasi Bangsa-bangsa Baru

Perkembangan-perkembangan pendidikan yang pelan-pelan berlangsung dalam sejarah negara-negara Barat diperas dalam bangsa-bangsa yang dewasa ini meminjam sistem-sistem pendidikan, tetapi peminjaman serupa itu berlangsung juga di antara negara-negara Barat ketika mereka menyusun sistem-sistem pendidikan mereka sesuai dengan berubahnya konsep-konsep mengenai kebutuhan sosial. Bangsa-bangsa baru menemukan bahwa penyesuaian itu lebih sulit karena mereka ingin menyalurkan suatu kebudayaan kesatuan tradisional yang tidak jelas batasannya dan kerap kali tidak ada, dan juga ingin menggunakan sekolah-sekolah untuk menghasilkan suatu teknologi dengan mana kebudayaan tradisional hanya mempunyai sedikit kaitan. Kerap kali pendidikan Barat yang ditanamkan itu pada pokoknya menghasilkan suatu *kelompok kecil yang bertekad untuk melakukan modernisasi*. Biarpun mungkin menyerap cerita-cerita rakyat dalam mata-mata pelajaran sejarah dan literatur, unsur-unsur lain kebudayaan tradisional tidak dapat disesuaikan semudah itu dengan tuntutan-tuntutan modernisasi. Dalam masyarakat-masyarakat di mana fusi cara-cara tradisional dengan cara-cara teknologis berlangsung secara lebih berangsur-angsur, lebih banyak unsur kebudayaan tradisional dipertahankan.

Dengan meningkatnya jumlah murid, satu akibat pokok ialah suatu penilaian yang lebih mendalam mengenai *manfaat pendidikan* dan secara demikian juga timbulnya rangsangan-rangsangan untuk jenis-jenis pendidikan tambahan dan berlainan. Sikap-sikap itu meluas di kalangan penduduk seperti lain-lain unsur kebudayaan baru, dengan foci dan gradien perkembangan pendidikan yang terpola; daerah-daerah klimaks umumnya adalah daerah-daerah di mana rangsangan-rangsangan lain ke arah perubahan sosial juga kuat.

Bilamana sekolah-sekolah jenis Barat berakar, kegiatan-kegiatannya berkaitan dengan keterbukaan terhadap ide-ide dan praktek-praktek baru di banyak bidang kehidupan, dan *orang dengan lebih banyak pendidikan sekolah memiliki lebih banyak ciri modernisasi*. Dia lebih banyak mengetahui dunia, kemungkinan lebih besar menerima yang baru, lebih mengetahui kompleksitas masyarakatnya, dan lebih mampu untuk mengerti kekuatan-kekuatan kompleks yang aktif di sekitarnya. Asimilasi persekolahan oleh kaum wanita

secara istimewa memperbanyak perubahan-perubahan ini dan juga ikut merubah kehidupan keluarga secara yang membina anak-anak yang lebih adaptif. Akan tetapi dalam hal-hal ini terdapat banyak tumpang tindih di antara bagian-bagian penduduk. Yang kurang terdidik sering lebih mengetahui soal-soal pragmatis dari pada yang sangat terdidik, dan mereka bisa lebih terbuka untuk hal-hal baru. Orang-orang buta huruf dalam masyarakat-masyarakat dengan tradisi lisan yang kuat mungkin mempunyai perspektif-perspektif yang luas.

Dengan meluasnya persekolahan umum, fungsinya mempertahankan kebudayaan tinggi meluas ke lebih banyak orang. Pada waktu yang sama, pengaruh sekolah yang mendukung perubahan meresapi bagian-bagian masyarakat yang lebih luas dan menantang praktek-praktek elitis. Lagi pula cara-cara mengajar yang lebih dinamis dan kreatif mulai efektif bahkan di sekolah-sekolah umum, yang mulai mencakup unsur-unsur studi-studi ilmu-ilmu alam dan sosial bersama-sama dengan membaca, menulis dan menghitung, seluruhnya dalam konteks perubahan. Pendidikan menengah dan khususnya tinggi secara predomnan menjadi terarah pada mata-mata kuliah yang berkaitan dengan bagian-bagian kebudayaan yang kurang konservatif.

Sangat penting adalah *transformasi kemahiran bahasa* anak-anak oleh sekolah. Bukan saja bahasa anak meluas tetapi juga menjadi semakin terarah pada pemakaian dengan cara-cara yang menunjang perubahan. Akan tetapi dalam proses ini handikap kelompok-kelompok yang paling sedikit dipengaruhi oleh pendidikan formal maupun informal menjadi lebih jelas. Kelompok-kelompok terbelakang hanya secara pelan-pelan diserap dalam sekolah, dan dalam banyak masyarakat maju tugas membuat pendidikan formal efektif bagi kelompok-kelompok serupa itu muncul sebagai menentukan pada waktu perubahan okupasional yang cepat.

Sekolah Sebagai Faktor Perubahan

Adalah pendidikan Barat, yaitu pendidikan peradaban yang ilmu dan teknologinya kini menyebar ke mana-mana, yang menyaksikan penggunaan sekolah-sekolah secara paling eksplisit sebagai *faktor-faktor perubahan*. Tanggapan terhadap tuntutan teknologi pertama-tama muncul pada tingkat menengah sekolah-sekolah. Terlepas dari proliferasi sekolah-sekolah praktek, permintaan akan pengajaran teknis formal di banyak negara dipenuhi lewat diversifikasi program-program kejuruan menengah, institut-institut teknik, dan pendidikan teknologis tingkat universitas yang kerap kali dipisahkan dari universitasnya itu sendiri. Kolese-kolese pertanian dan mekanik Amerika Serikat mengambil alih banyak komponen dari Eropa dan dari komponen-

komponen itu menciptakan suatu sistem yang lebih bebas dan beraneka ragam, yang pada gilirannya ditiru di Eropa dan di lain-lain kawasan. Di luar cabang-cabang prestise pendidikan, latihan praktis yang beraneka ragam menggantikan mata-mata pelajaran budaya tradisional dan memulai suatu orientasi pendidikan pada program-program yang menunjang perubahan.

Akan tetapi di hampir semua masyarakat universitas adalah *tempat suci analisa masyarakat yang kritis*; bahkan di mana dia sedikit menggunakan privilesi itu, hal itu tersedia. Dan sejauh latihan intelektual tingkat tinggi dibutuhkan oleh kegiatan-kegiatan praktis, universitas diyakinkan untuk memberikan pengajaran itu. Biarpun lamban memberikan tanggapan, universitas-universitas kini merupakan *pusat-pusat perubahan yang digerakkan*; mereka mendidik semakin banyak bagian elit nasional. Di beberapa negara telah diterima bahwa banyak jenis pekerjaan harus disponsori universitas, bahwa profesi-profesi baru membutuhkan jenis-jenis profesor baru, dan bahwa berbagai alasan dan standar kompetensi secara legitim bisa menjadi bagian kehidupan universitas.

Sekolah-sekolah menentang perubahan dengan perlawanan pasif maupun aktif. Adalah lebih mudah mengikuti jalan-jalan yang sudah dikenal dan banyak digunakan, dan secara khas yang baru tidak disambut dengan baik oleh guru-guru, yang kebanyakan menghabiskan sebagian besar kehidupan mereka di sekolah. Pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi, perlawanan untuk sebagian mengungkapkan devosi terhadap tradisi-tradisi intelektual tertentu, yang sering dikacaukan dengan konvensi-konvensi mengenai standar yang harus dijunjung tinggi oleh universitas. Konvensi-konvensi itu hanya kehilangan dayanya setelah ilmu dan teknologi menunjukkan daya tahan dan arti yang menentukan untuk kelangsungan hidup bangsa.

Terlepas dari maksud, *sekolah-sekolah menunjang perubahan* apabila memberikan kemampuan membaca-menulis yang memungkinkan orang-orang membaca dan inti pendidikan dalam cabang-cabang pengetahuan tradisional. Mereka juga mendukung perubahan dengan mengidentifikasi dan memajukan orang-orang berbakat, yang bahkan jika ditempatkan dalam kedudukan-kedudukan prestise yang dianggap mengekang, kerap kali ternyata membangkang terhadap kebiasaan. Mereka menunjang perubahan secara lebih langsung apabila mereka menerima material baru di ruang kelas atau menerima tanggung jawab untuk melatih orang-orang untuk profesi-profesi baru. Mereka terlibat sama sekali bila atau kalau mereka mendorong pemikiran yang merdeka dan kritis (pada tingkat mana pun) dan bila mereka mengadakan riset ilmiah dan melaksanakan apa yang disebut graduate study. Akhirnya perluasan pendidikan dewasa dan kursus-kursus penyegar pada segala tingkat pendidikan menjadi suatu bagian integral organisasi sosial untuk menangkis keusangan dan membina perubahan yang lebih cepat.

Kombinasi dikotomi homogenisasi-diferensiasi dan dikotomi pemeliharaan-perubahan memberikan kepada kita empat kategori dengan mana kita dapat membatasi tahap-tahap pendidikan. Adalah dalam persekolahan umum (yang bisa berlangsung 12 atau bahkan 14 tahun) bahwa fungsi-fungsi homogenisasi dan konservasi bergabung secara yang paling jelas. Lagi pula setiap pemisahan sekolah-sekolah untuk bagian-bagian penduduk yang berbeda-beda, yang menyerahkan kebanyakan anak kepada sekolah-sekolah yang kurang bermutu, juga mempertahankan tradisi. Di lain pihak, kalau lebih banyak orang menikmati pendidikan bersama-sama selama bertahun-tahun, perubahan ditunjang semata-mata karena orang-orang mulai mengenal ide-ide ilmiah dan teknik yang menjalin mereka dengan pengaruh-pengaruh lain yang mendukung perubahan. Adalah pada tingkat universitas bahwa spesialisasi yang disertai perguruan tinggi memadukan diferensiasi dengan pemudahan perubahan.

4. PENDIDIKAN DAN KELAS SOSIAL

Penyusunan suatu sistem persekolahan sehingga murid-murid naik dari kelas yang satu ke kelas berikutnya untuk sebagian adalah jawaban atas masalah-masalah skala dan untuk sebagian berkaitan dengan suatu isi pengajaran yang lebih terperinci. Hal itu juga bisa mengungkapkan suatu pergeseran dari suatu sistem elitis yang misalnya tampak dalam berkurangnya prerogatif-prerogatif golongan atas di universitas dan penetapan *kompetisi angka* untuk penerimaan. Sistem promosi yang paling tua, yaitu sistem Cina, menekankan kemajuan dari satu tingkat ujian ke diijinkannya menghadapi ujian berikutnya. Selama sebagian besar sejarahnya sistem itu menggunakan kriteria prestasi untuk kemajuan dengan hanya komplikasi kecil akibat pertimbangan status, dan Cina adalah sumber ujian-ujian untuk mentes kompetensi yang kini dilakukan di seluruh dunia.

Sekali persekolahan meluas melintasi batas-batas gereja atau praktek tutorial untuk pembentukan suatu elit, muncul suatu *sistem tiga tingkat* di negara-negara Eropa Barat: universitas untuk elit, sekolah grammar untuk juru-juru tulis dan sebagai persiapan untuk universitas, dan sekolah-sekolah dasar untuk rakyat banyak. Sistem ini menjadi mapan bahkan setelah persekolahan menyebar secara luas. Sementara itu, adalah keterbatasan ekonomi maupun snobisme (sikap sok) yang mempertahankan gagasan bahwa proporsi anak yang diterima harus menurun dengan cepat pada setiap tingkat sekolah berikutnya. Secara diam-diam atau eksplisit orang juga menganggap bahwa pelajaran-pelajaran semakin sulit dengan tingkat dan bahwa semakin sedikit anak dapat mengikutinya dengan baik. Dalam ekonomi-ekonomi pramodern relatif

sedikit orang diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan non-manual (bukan tangan). Kondisi dan asumsi-asumsi ini secara pelan-pelan berubah di negara-negara yang lebih maju karena rakyat mulai percaya bahwa lebih banyak pendidikan dibutuhkan di kalangan warga negara suatu demokrasi dan bahwa pendidikan adalah suatu barang pemuas tersendiri yang menjadi hak semua orang. Akan tetapi *bentuk piramidenya* tetap bertahan, dan di antara fungsi-fungsi sistem pendidikan adalah seleksi murid-murid yang boleh meneruskan ke kursus-kursus yang lebih tinggi berikutnya dan juga - dengan diversifikasi sekolah-sekolah - alokasi mereka yang meneruskan di antara berbagai jenis dan mutu sekolah.

Dalam masyarakat-masyarakat yang mempunyai sistem-sistem sekolah yang berkembang terdapat sejumlah pekerjaan dewasa yang sebagai persyaratan minimal menuntut tingkat-tingkat atau jenis-jenis persekolahan yang sesuai. Seleksi untuk meneruskan sekolah dengan demikian pada waktu yang sama menjadi satu faktor dalam alokasi peranan-peranan dalam masyarakat, dan alokasi di antara kursus-kursus spesialisasi menjalin ikatan dengan kedudukan-kedudukan dewasa tertentu dalam kategori-kategori lebih luas yang diantisipasi oleh seleksi pendidikan. Dengan demikian sekolah-sekolah menjadi terikat secara yang semakin kompleks dengan stratifikasi ekonomi dan sosial dan dengan struktur-struktur mobilitas masyarakat. Bersamaan dengan itu, prosedur yang dianut untuk seleksi dan alokasi dalam sekolah mempunyai reperkusi-reperkusi atas proses-proses pendidikan, orientasi-orientasi guru, dan suasana umum sekolah.

Status yang Ditentukan Pendidikan

Secara demikian suatu sistem sekolah formal tidak pernah ada semata-mata sebagai suatu hiasan menurut selera suatu lapisan yang diistimewakan tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menentukan orang-orang mana akan menempati kedudukan-kedudukan dalam masyarakat. Secara tradisional sedikit anak dari keluarga-keluarga sederhana diterima di sekolah-sekolah klasik. Karena menyelesaikan sekolah-sekolah serupa itu mempermudah usaha untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dan kedudukan-kedudukan elitis, pendidikan menyumbang pada stabilitas antar generasi maupun mobilitas dalam status. Akan tetapi setelah anak-anak status rendah merupakan suatu proporsi yang cukup besar dalam penerimaan di sekolah-sekolah menengah, persekolahan memainkan peranan yang lebih penting dalam membagi orang-orang di antara pekerjaan-pekerjaan dan tingkat-tingkat status; anak-anak pekerja yang terdidik dan cakap mengisi kedudukan-kedudukan pegawai dan profesi yang menjadi lebih banyak dan bahkan menggeser anak-anak elit lama yang kurang cakap. Akan tetapi dalam ekonomi-ekonomi terbuka, setelah perseko-

lahan yang diperpanjang menjadi luas, akibat terpisah dan tersendiri dari jumlah persekolahan atas status ekonomi dan sosial dihapus. Status orang tua hanya akan memainkan peranan kecil, tetapi kemampuan bawaan, semangat, kesehatan dan nasib baik menciptakan keaneka ragaman status di antara orang-orang yang sama persekolahannya.

Dengan demikian kaitan persekolahan dengan status orang tua maupun kaitannya dengan status dewasa individu tidak sederhana atau mantab. Contoh yang paling jelas dari status yang ditentukan pendidikan terdapat di mana status individu ditetapkan oleh kedudukannya dalam suatu birokrasi dan di mana kedudukan serupa itu bergantung pada pemilikan suatu sertifikat tertentu. Masyarakat-masyarakat berkembang dalam periode ketika kesempatan-kesempatan bersekolah masih dibagi di kalangan kecil merupakan contoh yang paling menyolok dari status yang ditentukan pendidikan; tetapi mereka juga mempunyai pengaruh politik tidak menentu seperti kaum elit terpelajar kalau praktek-praktek politik populis berakar. Lagi pula, dalam masyarakat-masyarakat serupa itu status yang berkaitan dengan tahun-tahun di sekolah adalah status dalam suatu struktur baru yang berkembang di samping sistem lama. Hubungan antara sistem status lama dan baru mungkin lemah dan peranan-peranan orang-orang terdidik di sekolah di dalamnya cukup tidak sama, biarpun kita baru mengetahui sedikit tentang hubungan ini.

MENYONGSONG PELAKSANAAN KEWAJIBAN BELAJAR TINGKAT PENDIDIKAN DASAR SUATU PENGANTAR

E. SOENARYA*

I. PENDAHULUAN

Mukadimah Undang-undang Dasar 1945 antara lain dengan tegas menggariskan bahwa tujuan Pemerintah Indonesia yang selanjutnya menjadi tujuan nasional adalah "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Undang-undang Dasar 1945, Bab 13, pasal 31, ayat (3) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran (pendidikan). Ini berarti bahwa kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi semua warga negara adalah sama.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara menegaskan bahwa tujuan pertama Pelita III adalah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil.

Penjabaran tujuan ini terutama yang menyangkut *kecerdasan* seluruh rakyat, digariskan; bahwa titik berat program pendidikan selama Pelita III diletakkan pada perluasan pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan pelaksanaan wajib belajar yang sekaligus memberikan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungannya dan seterusnya. Berkaitan dengan hal tersebut secara eksplisit usaha perluasan pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kewajiban belajar ini telah dituangkan dalam Rancangan Repelita III (Bab 17), di mana telah diproyeksikan angka partisipasi tingkat pendidikan dasar terhadap anak usia 7 - 12 tahun yang akan mencapai 100 persen

* Drs. Endang Soenarya adalah dari Biro Perencanaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan menjabat sebagai Kepala Sekretariat Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional Departemen yang sama

pada akhir Repelita III tahun 1983/1984.

Seandainya angka partisipasi pendidikan dasar pada akhir Repelita III telah mencapai 100 persen dari anak usia 7 - 12 tahun, apakah sudah dapat dianggap kita melaksanakan kewajiban belajar? Jawabnya, belum, karena masalah kewajiban belajar bukan hanya sekedar memberikan kesempatan memperoleh pendidikan dasar kepada 100 persen anak usia 7 - 12 tahun, namun lebih dari itu.

Berkenaan dengan hal tersebut, marilah kita telusuri dan amati masalah-masalah apa saja yang perlu bila diperhatikan dalam rangka pelaksanaan kewajiban belajar itu.

II. BEBERAPA PENGAMATAN

Sebelum menelusuri dan mengamati masalah-masalah Kewajiban Belajar dengan segala komplisitasnya, ada baiknya bila diamati hal-hal berikut ini.

Pengamatan 1: Kedudukan Pendidikan Dasar Dalam Rangka Kewajiban Belajar

Sementara anggapan bahwa jenjang-jenjang pendidikan itu merupakan anak tangga yang semakin ke atas semakin dianggap penting. Apabila anggapan tersebut diikuti maka pendidikan tinggi adalah suatu jenjang pendidikan yang amat sulit dan terpenting, sehingga segala dana dan daya harus mendapat perhatian paling utama. Oleh karena pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang paling bawah, maka menurut anggapan ini ia tidak perlu diperhatikan karena setiap orang dapat menyelenggarakannya. Pendapat ini sangat keliru bila kita ingat bahwa tidak semua warga negara mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi setelah pendidikan dasar, dan pendidikan dasar merupakan tingkat minimum yang mungkin dicapai oleh seluruh anak Indonesia.

Bertitik tolak dari pendapat tersebut di atas, ditinjau dari kemampuan orang tua, masyarakat dan pemerintah, maka *pendidikan dasar* merupakan lembaga pendidikan minimal bagi bangsa Indonesia *saat ini* yang dapat dijangkau dalam rangka mempergunakan hak kesempatan memperoleh pendidikan.

Satu dasawarsa yang lalu, salah satu indikator utama yang dipakai sebagai ukuran kemajuan suatu bangsa adalah tinggi rendahnya pendapatan nasional perkapita (rata-rata). Dewasa ini indikator tersebut mulai ditinggalkan dan beralih ke suatu indikator baru yaitu ukuran kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Salah satu indikator yang dipakai bagi kemajuan suatu bangsa

dewasa ini dihitung dari tingginya prosentase jumlah warga negara yang melek huruf. Dengan perkataan lain salah satu ukuran minimal kemajuan suatu bangsa adalah apabila sebagian besar warganya telah memperoleh pendidikan minimal. Indikator selanjutnya adalah suatu negara lebih maju apabila negara itu telah mentargetkan suatu pendidikan dasar semesta (*universal primary education*), dan akan lebih maju lagi apabila bangsa tersebut sudah melaksanakan kewajiban belajar yang ditetapkan dengan undang-undang.

Bertitik tolak dari asumsi tersebut di atas, maka pendidikan dasar dalam fungsinya sebagai wahana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menduduki peranan amat penting dan strategis dalam dasa warsa mendatang, mengingat tingkat pendidikan ini yang baru dapat diikuti oleh sebagian terbesar warga negara. Dipandang dari sudut pengembangan kebudayaan nasional dalam rangka pengembangan bangsa, haruslah ditetapkan bahwa kepada seluruh rakyat di seluruh tumpah darah Indonesia ini diberikan pendidikan dasar, sebab dengan dan melalui pendidikan dasar kepada seluruh rakyat Indonesia diberikan bekal-bekal dasar pengembangan kebudayaan yang memungkinkan rakyat hidup sebagai warga negara yang menyadari hak dan melaksanakan kewajibannya dengan baik dan sebagai pribadi dapat meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat.

Pengamatan 2: Apa Yang Telah Dirintis Dalam Rangka Kewajiban Belajar

Periode 1950 - 1960

Adanya keyakinan bahwa melalui kewajiban belajar bangsa Indonesia akan dapat mencapai kemajuan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan telah menimbulkan keinginan untuk melaksanakan kewajiban belajar. Keinginan tersebut telah ada pada bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan, tetapi baru dapat menjadi kenyataan persiapannya beberapa waktu setelah proklamasi kemerdekaan.

Usaha perintisan dan persiapan kewajiban belajar di Indonesia dimulai pertama kali pada tahun 1949 di Yogyakarta. Usaha ini disusul dengan penyusunan rencana sepuluh tahun. Dalam rencana tersebut tercantum adanya usaha pendidikan guru darurat agar dalam waktu 9 tahun guru sekolah dasar dapat ditingkatkan jumlahnya dari 83.000 orang menjadi 180.000 orang. Usaha ini dijalankan dengan mengadakan pembukaan secara besar-besaran Kursus Pengajar Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar (KPKPKB). Dalam pada itu, dibuka secara besar-besaran sekolah dasar darurat untuk tempat praktek para siswa KPKPKB. Sekolah dasar darurat tersebut kemudian diubah menjadi sekolah dasar enam tahun biasa. Sesudah berjalan kira-kira dua tahun KPKPKB diubah menjadi Sekolah Guru Bawah (SGB) biasa.

Usaha mempelajari masalah kewajiban belajar ini diteruskan dengan mengirim tenaga-tenaga terpilih dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran

dan Kebudayaan ke berbagai negara. Usaha ini dilanjutkan dengan memberikan penjelasan tentang kewajiban belajar oleh pimpinan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian disusul dengan penerangan ke propinsi-propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa-desa.

Untuk memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap pelaksanaan kewajiban belajar, pada tahun 1956 diresmikan pembentukan Biro Urusan Kewajiban Belajar pada Jawatan Pengajaran Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan yang sesudah berjalan beberapa tahun diubah menjadi Urusan Kewajiban Belajar sebagai salah satu dari Inspeksi Pusat Sekolah Rakyat. Belum adanya pengalaman tentang kewajiban belajar dan tidak tersedianya biaya mengakibatkan ketidakmantapan Biro Urusan Kewajiban Belajar untuk menjalankan tugasnya. Meskipun begitu diambil jalan praktis langsung turun ke daerah dengan tujuan antara lain membangkitkan keyakinan kepada masyarakat dan orang tua bahwa pendidikan bagi anaknya adalah sangat penting, dan memberikan pengertian secara luas bahwa sekolah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari desa. Sangat kurangnya biaya perjalanan dinas pada waktu itu menimbulkan pengorbanan yang tidak sedikit dari petugasnya.

Pada tahun 1959 diadakan konperensi kewajiban belajar di Purworejo untuk menilai hasil-hasil yang telah dicapai dan menentukan langkah-langkah selanjutnya atas dasar pengalaman selama lima tahun. Pada tahun 1960 diadakan percobaan kewajiban belajar di 27 daerah yang meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Lombok. Pada waktu itu terdapat tiga macam daerah percobaan, yaitu: (a) yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan; (b) yang dibiayai oleh Biro Pembangunan Masyarakat Desa antara lain seperti Sukabumi, Wuryanto dan Kepanjen; dan (c) atas inisiatif sendiri antara lain seperti Purwakarta dan Ciamis. Syarat ditunjuk menjadi daerah percobaan menurut perumusan yang terakhir yaitu: (a) masyarakat menyediakan bangunan sekolah beserta halaman, sebidang tanah untuk kegiatan kurikular, tempat tinggal/pemondokan untuk guru dan alat-alat perlengkapan; dan (b) pemerintah bertanggung jawab atas tersedianya guru dan alat-alat pelajaran.

Pengamatan 3: Apa Yang Telah Kita Laksanakan Dalam Menyongsong Kewajiban Belajar

Periode Pelita I dan II

Usaha perintisan menuju pelaksanaan kewajiban belajar pada periode Pelita ini dinyatakan dalam perumusan perluasan kesempatan belajar bagi anak-

anak kelompok umur 7 - 12 tahun yang mendaftar di sekolah dasar. Dalam target-target prosentase anak kelompok umur 7 - 12 tahun yang mendaftar di sekolah dasar, di mana ditetapkan target akhir Pelita II adalah 85 persen anak kelompok umur 7 - 12 tahun harus sudah ditampung di sekolah dasar. Menurut kenyataan hingga akhir Pelita II, jumlah murid sekolah dasar seluruhnya ternyata adalah 19 juta yang berarti bahwa 85 persen dari keseluruhan 22 juta anak kelompok umur 7 - 12 tahun telah tertampung pada sekolah dasar. Dengan demikian, target Pelita II boleh dikatakan telah berhasil. Meskipun demikian, dari jumlah 19 juta murid sekolah dasar itu tidak termasuk anak putus sekolah sebanyak 5 juta dan murid madrasah ibtidaiyah sebanyak 3 juta. Andaikata jumlah murid sekolah dasar tersebut tidak termasuk anak putus sekolah maka prosentase anak kelompok umur 7 - 12 tahun yang terdaftar di sekolah dasar adalah 81 persen. Usaha-usaha tersebut di atas diikuti dengan pembangunan gedung sekolah dasar Inpres, rehabilitasi gedung, dan pengangkatan guru. Untuk memberikan gambaran secara nasional mengenai hasil yang telah dicapai pada akhir Repelita II perlu diadakan tinjauan dari tiga segi: Segi pertama menyangkut *Pengunduran Tahun Ajaran 1978*, segi kedua menyangkut *apa yang dinamakan dengan sudah dapat bersekolah*, dan segi ketiga, menyangkut *madrasah ibtidaiyah yang sesungguhnya merupakan juga lembaga pendidikan dasar seperti halnya SD*. Dengan menggunakan ketiga tinjauan tersebut akan diperoleh gambaran hasil yang berbeda sebagai berikut:

- a. Tinjauan dari segi pengunduran Ajaran Tahun 1978. Sekiranya tahun ajaran tidak diundurkan, maka hasil perluasan kesempatan belajar pada pendidikan dasar bagi anak umur 7 - 12 tahun tergambar pada jumlah murid SD pada Tahun Ajaran 1979. Pada kenyataannya Tahun Ajaran 1979 sebenarnya tidak ada. Dengan demikian, maka menurut tinjauan ini hasil yang dimaksud dapat digambarkan dengan dua cara: gambaran melalui jumlah murid pada Tahun Ajaran 1978 (lihat Tabel 1 kolom 2) dan gambar fiktif melalui jumlah murid Tahun Ajaran 1979 yang sebenarnya tidak ada (lihat Tabel 1 kolom 3).
- b. Tinjauan dari segi apa yang dimaksudkan dengan sudah dapat bersekolah. Sekiranya yang dimaksud *anak umur 7 - 12 tahun sudah dapat bersekolah di SD* ialah anak umur 7 - 12 tahun yang saat itu bersekolah di SD dan tidak termasuk anak umur 7 - 12 tahun yang pernah bersekolah di SD, maka hasil pemerataan kesempatan belajar tingkat SD pada akhir Repelita II adalah sebesar 75,1 persen pada 1978 (lihat Tabel 1 kolom 2, B.1.1.) dan 81,7 persen tahun 1979 fiktif (Tabel 1 kolom 3, B.1.2.). Sekiranya yang dimaksud *anak umur 7 - 12 tahun yang bersekolah di SD* ialah baik yang saat itu bersekolah maupun yang pernah bersekolah, maka hasil pemerataan kesempatan belajar tingkat SD pada akhir Repelita II adalah sebesar 81,1 per-

sen pada tahun 1978 (lihat Tabel 1 kolom 2 B.2.1.) dan 88,3 persen untuk tahun 1979 fiktif (Tabel 1 kolom 3 B.2.2.).

- c. Tinjauan dari segi yang menyangkut murid madrasah ibtidaiyah. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan dasar yang menyangkut aspek pemerataan meliputi pula pemerataan madrasah ibtidaiyah. Apabila hal ini digunakan sebagai segi tinjauan dalam memberikan gambaran hasil, maka apa yang telah digambarkan pada segi tinjauan pertama dan kedua masing-masing masih perlu ditambah dengan jumlah murid madrasah ibtidaiyah

Tabel 1

GAMBARAN KEADAAN AKHIR PELITA II

(1)	Tahun Ajaran 1978 (2)	Tahun Ajaran 1979 fiktif (3)
A. DATA PENDUDUK MURID DAN PUTUS SEKOLAH		
1. Jumlah anak 7 - 12 tahun	21,6	21,8
2. Jumlah murid SD (× 1 juta)	19,1	20,9
3. % murid SD umur 7 - 12 tahun	85,2%	85,3%
4. Jumlah murid MI (× 1 juta)	3,0	3,0
5. Putus SD (× 1 juta)	5,0	5,8
B. PERSENTASE ANAK 7 - 12 YANG SUDAH DAPAT BERSEKOLAH (HASIL PELITA II)		
1. <i>Segi tinjauan 1</i>		
1.1. Pelita II berakhir 1978	75,1%	
1.2. Pelita II berakhir 1979		81,7%
2. <i>Segi tinjauan 2</i>		
2.1. Keadaan 1.1. + putus SD 7 - 12 tahun	81,1%	
2.2. Keadaan 1.2. + putus SD 7 - 12 tahun		88,3%
C. 3. <i>Segi tinjauan 3</i> Dengan memperhitungkan murid MI		
3.1. Keadaan 1.1. + MI	87,2%	
3.2. Keadaan 1.2. + MI		93%
3.3. Keadaan 2.1. + MI	89,4%	
3.4. Keadaan 2.2. + MI		99,0%

yang berumur 7 - 12 tahun. Menurut tinjauan ini, maka hasil pemerataan kesempatan belajar tingkat sekolah dasar pada akhir Repelita II adalah: (1) 87,2 persen untuk tahun 1978 dan 93 persen untuk tahun 1979 fiktif bila yang diperhitungkan adalah jumlah murid SD dan MI (7 - 12 tahun) yang bersekolah saat itu (lihat Tabel 1 kolom 2 C.3.1. dan kolom 3 C.3.2.) dan (2) 89,4 persen untuk tahun 1979 dan 99,0 persen untuk tahun 1979 fiktif bila yang diperhitungkan adalah jumlah anak 7 - 12 tahun, baik yang saat itu bersekolah di SD dan MI maupun yang pernah bersekolah di SD dan MI (lihat Tabel 1 kolom 2 C.3.3.).

Tabel 2

PROSENTASE MURID SD, MI, DAN SD + MI TERHADAP PENDUDUK 7 - 12 TAHUN TAHUN 1978 PER PROPINSI

	PROPINSI	SD	MI	SD + MI
1.	DKI Jakarta Raya	81,16	13,52	94,68
2.	Jawa Barat	76,04	12,82	88,86
3.	Jawa Tengah	72,29	10,76	83,05
4.	DI Yogyakarta	85,35	4,10	89,45
5.	Jawa Timur	72,15	18,87	91,02
6.	DI Aceh	72,67	25,26	98,23
7.	Sumatera Utara	74,72	5,69	80,41
8.	Sumatera Barat	96,31	3,17	99,48
9.	Riau	76,51	6,14	82,65
10.	Jambi	74,28	22,93	97,21
11.	Sumatera Selatan	81,14	12,62	93,76
12.	Lampung	79,15	9,14	88,29
13.	Kalimantan Barat	61,84	9,15	70,99
14.	Kalimantan Tengah	70,34	11,64	81,98
15.	Kalimantan Selatan	62,85	26,63	89,48
16.	Kalimantan Timur	82,26	5,73	87,99
17.	Sulawesi Utara	80,37	3,23	83,60
18.	Sulawesi Tengah	86,30	12,02	98,38
19.	Sulawesi Selatan	77,93	3,12	81,05
20.	Sulawesi Tenggara	83,60	4,53	88,13
21.	Maluku	80,78	4,43	85,21
22.	Bali	87,79	4,43	85,21
23.	N.T.B.	69,97	11,03	81,00
24.	N.T.T.	77,22	2,58	79,80
25.	Irian Jaya	71,28	0,82	72,20
26.	Bengkulu	85,08	9,58	94,66
27.	Timor Timur	-	-	-

Usaha pemerataan kesempatan belajar tingkat sekolah dasar untuk semua propinsi ditempuh dengan pola yang sama yaitu melalui program Inpres.

Hasil usaha pemerataan kesempatan belajar pada tingkat propinsi menunjukkan adanya disparitas. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 3

PROYEK PERKEMBANGAN MURID PENDIDIKAN DASAR							
	Tahun Ajaran						
	1978	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85
1. Murid baru kelas I Pendidikan Dasar ($\times 1000$)		5.538	4.068	4.094	4.165	4.243	
2. Jumlah murid ($\times 1000$)	22.025	24.179	24.949	25.491	25.739	25.894	
1. Sekolah Dasar	19.075	21.177	21.889	22.331	22.459	22.484	22.504
- Negeri	16.775	18.634	19.262	19.652	19.765	19.786	19.803
- Swasta	2.300	2.543	2.627	2.679	2.694	2.698	2.701
2. Madrasah Ibtidaiyah	2.950	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250
3. Pamong/Kejar	-	2	10	60	130	210	-
3. Jumlah guru SD yang ada ($\times 1000$)	637						
1. Negeri	564						
2. Swasta	73						
4. Tambahan guru SD yang diperlukan ($\times 1000$)		43,2	26,3	17,0	14,0	13,8	
1. Negeri		30,0	22,9	14,8	12,2	12,0	
5. Jumlah anak usia 7-12 th. ($\times 1000$)		21.839	21.895	21.802	21.945	22.011	
6. Persentase murid yang berusia 7 - 12 th. terhadap jumlah murid		84,6	84,7	84,8	84,9	85	
7. Angka partisipasi tingkat Pend. dasar terhadap anak usia 7 - 12 th.		93,7	96,5	99,1	9,6	100	
$\frac{(6) \times (2)}{(5)} \times 100\%$							
8. Jumlah lulusan SD pada akhir tahun ajaran	1.546	1.745	1.818	2.077	2.274	2.617	

Jikalau diperhatikan angka-angka partisipasi usia pendidikan dasar sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 dan 2 serta proyeksi perkembangan murid pendidikan dasar pada akhir Repelita III, (Tabel 3) maka sudah dapat dipastikan jika ditinjau dari segi partisipasi tingkat pendidikan dasar terhadap usia anak 7 - 12 tahun, pada awal Repelita IV nanti sudah dapat dimulai perluasan Kewajiban Belajar di seluruh tanah air. Namun seperti dikemukakan di atas masalah Kewajiban Belajar bukan hanya masalah pemerataan memperoleh pendidikan, tetapi menyangkut aspek-aspek lain yang perlu ditelaah.

Berkenaan dengan hal itu, perlu ditelusuri kembali pengalaman-pengalaman perintisan pelaksanaan Kewajiban Belajar dengan segala kekomplekan masalahnya, dan juga pengalaman pelaksanaan program pemerataan pendidikan dasar selama melaksanakan Repelita I dan II.

III. MASALAH-MASALAH PELAKSANAAN KEWAJIBAN BELAJAR

1. Periode Perintisan (1950 - 1960)

Usaha Perintisan Kewajiban Belajar pada periode 1950 - 1960, merupakan usaha yang sangat berani, namun penuh dedikasi. Sangat berani, jikalau ditinjau dari situasi, stabilitas politis, keadaan ekonomi, sosial dan infrastruktur pada waktu itu. Pengalaman para pelaku perintisan itu menunjukkan bahwa masalah-masalah yang dihadapi adalah aspek yang sangat menentukan dalam setiap usaha, yaitu kurang biaya, kurang tenaga, kurang fasilitas kerja dan kurang pengalaman. Satu-satunya modal yang ada pada waktu itu adalah idealisme dan dedikasi terhadap tugas yang dihadapi. Dengan segala keterbatasan yang ada, namun dengan iktikad dan dengan jiwa gotong royong masalah-masalah tersebut dapat dipecahkan berkat adanya kerja sama antar instansi pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah; kesadaran rakyat bahwa mereka merasa ikut memiliki sekolah yang ada di desanya; adanya manfaat bahwa pendidikan dasar berguna bagi penghidupan mereka di masyarakat; dan berbagai kesulitan yang dihadapi sebagian besar dapat dipecahkan di daerah sendiri.

Masalah pembosan, rasanya merupakan ciri umum, terutama dalam kegiatan pembinaan dan pemeliharaan sesuatu pekerjaan, yang kurang menarik dan kurang insentive material.

Masalah janji-janji sekarang barangkali sudah agak bisa dikurangi, karena para pejabat sudah mulai memahami, bahwa setiap janji mempunyai konsekuensi.

Masalah bantuan terlalu besar. Masalah ini kiranya sekarang yang sangat penting kita perhatikan seperti disebutkan di atas, masalah Kewajiban Belajar

belum cukup dengan pemberian segala fasilitas dan pembiayaan yang selama ini kita berikan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, apabila penerangan dan partisipasi masyarakat tidak digarap sejak awal.

2. Periode Pelita I dan II

Tidak ada di dunia ini suatu negara sedang berkembang seperti Indonesia yang begitu besar perhatiannya terhadap pemberian kesempatan belajar kepada rakyatnya dengan mendirikan sekolah-sekolah dasar hampir pada setiap desa dan dusun. Program Inpres SD telah membuka mata dunia tentang kemampuan dan kesungguhan pemerintah dan rakyat Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tugas para perintis tampaknya sudah mulai berhasil, tetapi kemudian timbul hambatan-hambatan yang dirasakan merintangai keberhasilan perintisan kewajiban belajar. Hambatan-hambatan itu antara lain: (a) tabiat pembosan; (b) janji-janji yang tidak dipenuhi sehingga mengecewakan rakyat; (c) bantuan terlampau besar sehingga mematikan inisiatif rakyat dan menghilangkan rasa percaya pada kekuatan dan kemampuan diri sendiri.

Cuplikan pengalaman di atas perlu diperhatikan, paling tidak agar masalah-masalah itu sekurang-kurangnya dapat kita perkecil. Masalah ini kini menurut pendapat saya akan lebih gawat dan besar lagi, karena sekarang sudah mulai timbul gejala-gejala apatisme masyarakat terhadap penanggulangan masalah pendidikan yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut di atas.

Masalah biaya, tenaga dan fasilitas saya kira akan tetap merupakan masalah akut, di mana antar *supply* dan *demand* tidak seimbang.

Mengenai keberhasilan tugas dan cara memecahkan masalah sangat penting dijadikan salah satu cara dalam pelaksanaan kewajiban belajar yang akan dilaksanakan kelak.

Jika ditinjau/dihitung secara nasional, ratio murid: kelas sekarang sekitar 1 : 18, sehingga banyak SD di desa-desa sekarang kekurangan murid. Tapi jika kita lihat dari Tabel 2 ternyata disparitas masih tetap ada. Hal ini disebabkan oleh luasnya daerah serta keadaan pemukiman penduduk yang terpencah/terpencil dan belum dapat menyerap anak usia sekolah secara tuntas dan merata. Masalah ini sudah kita pecahkan melalui program pembentukan sekolah-sekolah kecil/program kejar. Apabila dilihat dari sasaran populasi usia 7-12, garapan selama Repelita III sebenarnya berkisar antara:

- a. menurut perhitungan/keadaan C.3.1. sekitar 12,8 persen;
- b. menurut perhitungan/keadaan C.3.2. sekitar 7,0 persen;
- c. menurut perhitungan/keadaan C.3.3. sekitar 10,6 persen; dan
- d. menurut perhitungan/keadaan C.3.4. sekitar 1,0 persen.

Fasilitas fisik pendidikan dasar sudah hampir mencukupi, namun masalah pemerataan *riil* belum dapat kita capai sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab antara lain: (1) lokasi/letak sekolah kurang cocok dengan lokasi pemukiman penduduk; (2) putus sekolah masih cukup tinggi; (3) penyebaran tenaga guru masih kurang seimbang, yang antara lain disebabkan cara menghitung dengan mempergunakan ratio guru : murid; (4) adanya penduduk yang berpindah-pindah; (5) adanya sekolah musiman; serta (6) motivasi belajar kurang.

IV. STRATEGI PELAKSANAAN KEWAJIBAN BELAJAR

1. Strategi Jangka Panjang

Dari pengalaman sebelum masa Pelita dapat di lihat bahwa pelaksanaan kewajiban belajar ternyata mendapat dukungan dan bantuan seluruh lapisan masyarakat terutama di daerah-daerah percobaan kewajiban belajar, karena adanya manfaat langsung bahwa isi pendidikan dasar berguna bagi penghidupan mereka di masyarakat.

Meskipun dalam masa Pelita II telah dilaksanakan usaha perluasan kesempatan belajar, disparitas perluasan kesempatan belajar secara tajam masih terdapat baik pada tingkat propinsi, kabupaten kecamatan, dan lebih-lebih pada tingkat desa. Selain itu peningkatan aspek kualitatif dari perluasan kesempatan belajar atau peningkatan mutu pendidikan murid sekolah dasar ini belum dapat diketahui secara baik.

Berdasarkan pengalaman tersebut di atas maka strategi pelaksanaan kewajiban belajar tidaklah dapat dilepaskan dari usaha: (1) perluasan kesempatan belajar; (2) peningkatan motivasi atau kegairahan berpartisipasi dalam melaksanakan kewajiban belajar; (3) peningkatan penerangan mengenai pengertian praktis kewajiban belajar kepada segenap lapisan masyarakat; (4) peningkatan mutu pendidikan murid sekolah dasar; (5) pengembangan hubungan langsung antara isi pendidikan dasar dan dunia kerja dalam kegunaannya bagi penghidupan mereka sebagai pribadi dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat dan (6) penyusunan undang-undang tentang kewajiban belajar.

Usaha perluasan kesempatan belajar ini merupakan langkah pertama untuk mengadakan kewajiban belajar. Konsekuensi dari perluasan kesempatan belajar pada tingkat sekolah dasar ini haruslah dilihat dalam kaitannya dengan kemampuan sekolah lanjutan pertama dalam menampung lulusan sekolah dasar tersebut pada kurun waktu yang akan datang. Kemampuan menampung sekolah lanjutan pertama di masa yang akan datang ini haruslah dili-

hat kaitannya dengan perluasan angkatan kerja yang menuntut adanya perluasan kesempatan kerja. Dalam perluasan kesempatan kerja ini perlu diamati secara tajam murid sekolah dasar yang putus sekolah. Dari data tahun 1978 dapat dilihat bahwa sejumlah 5 juta dari 19 juta murid sekolah dasar telah putus sekolah (drop out).

Perluasan usaha meningkatkan motivasi berpartisipasi dalam melaksanakan kewajiban belajar ini menjadi sangat penting mengingat banyak sekali orang tua dan masyarakat yang belum melihat manfaat menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah dasar meskipun gedung sekolah sudah tersedia di daerah mereka. Usaha meningkatkan motivasi berpartisipasi melaksanakan kewajiban belajar ini pada hakekatnya sama pentingnya dengan usaha pengadaan perluasan kesempatan belajar. Bahkan dalam bentuknya yang ekstrim, usaha perluasan kesempatan belajar mungkin sekali dihambat oleh ketidakmampuan meningkatkan partisipasi orang tua murid dan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban belajar.

Pada hakekatnya usaha meningkatkan penerangan ke segenap lapisan masyarakat ini ditujukan untuk membangkitkan motivasi untuk berpartisipasi terhadap pelaksanaan kewajiban belajar. Pengalaman pada tahun 1960-an menyatakan bahwa penerangan mengenai kewajiban belajar ini merupakan suatu faktor pendukung penting keberhasilan program kewajiban belajar pada waktu itu. Perumusan perluasan kesempatan belajar dalam Pelita pada dasarnya hanyalah dimengerti oleh para perencana saja. Masyarakat luas yang menjalankan kewajiban belajar memerlukan penerangan yang tegasnya menyangkut hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan kewajiban dan kegunaan praktis kewajiban belajar dalam usaha meningkatkan kualitas hidup mereka.

Peningkatan mutu murid sekolah dasar ini merupakan salah satu usaha terpadu untuk meningkatkan mutu tingkat-tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dalam penelitian terakhir yang dilaporkan dapat dilihat bahwa mutu murid sekolah dasar pada umumnya adalah rendah. Lebih daripada itu perbedaan mutu murid sekolah dasar tersebut tersebar di seluruh pelosok tanah air dalam proposi yang tidak merata. Terdapat daerah dengan mutu murid pendidikan dasar yang relatif tinggi di samping terdapat daerah dengan mutu murid pendidikan dasar yang relatif rendah. Ketimpangan mutu murid sekolah dasar di berbagai daerah tersebut haruslah diatasi bersamaan dengan usaha perluasan kesempatan belajar.

Usaha mengkaitkan isi pendidikan dengan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas kehidupan ini sangat penting. Adanya kaitan antara kedua hal tersebut melancarkan pemberian bekal-bekal dasar pengembangan kebudayaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat. Hal ini menjadi semakin lebih penting mengingat tidak semua lulusan sekolah

dasar berhasil dengan segera dan berkeinginan melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Kaitan yang erat antara kedua hal tersebut akan menunjang "Wiraswasta-wiraswasta".

Penyusunan undang-undang kewajiban belajar merupakan suatu tindak konkrit untuk menerbitkan usaha pelaksanaan kewajiban belajar. Atas dasar undang-undang ini dapat diturunkan berbagai peraturan pelaksanaan yang lebih terperinci.

Ringkasan gambaran pengalaman dan strategi umum pelaksanaan kewajiban belajar dapat di lihat dalam Skema 1 terlampir.

2. Strategi Jangka Pendek (Repelita III)

Berdasarkan pengamatan tersebut di atas dan strategi umum pelaksanaan kewajiban belajar dapat disusun strategi jangka pendek pelaksanaan kewajiban belajar.

1. Identifikasi permasalahan kewajiban belajar.
2. Penentuan kriteria pemilihan 27 kecamatan dalam 27 propinsi sebagai daerah percobaan pelaksanaan kewajiban belajar.
3. Percobaan pelaksanaan kewajiban belajar di kecamatan.
4. Penilaian terhadap hasil percobaan pelaksanaan kewajiban belajar terutama dengan mengadakan perbandingan terhadap hasil percobaan pelaksanaan kewajiban belajar di antara berbagai kecamatan.
5. Penyusunan pola kewajiban belajar.

Pelaksanaan percobaan pelaksanaan kewajiban belajar ini dijalankan dalam waktu satu tahun (lihat Skema 2: Pola Penyusunan Kewajiban Belajar).

PENUTUP

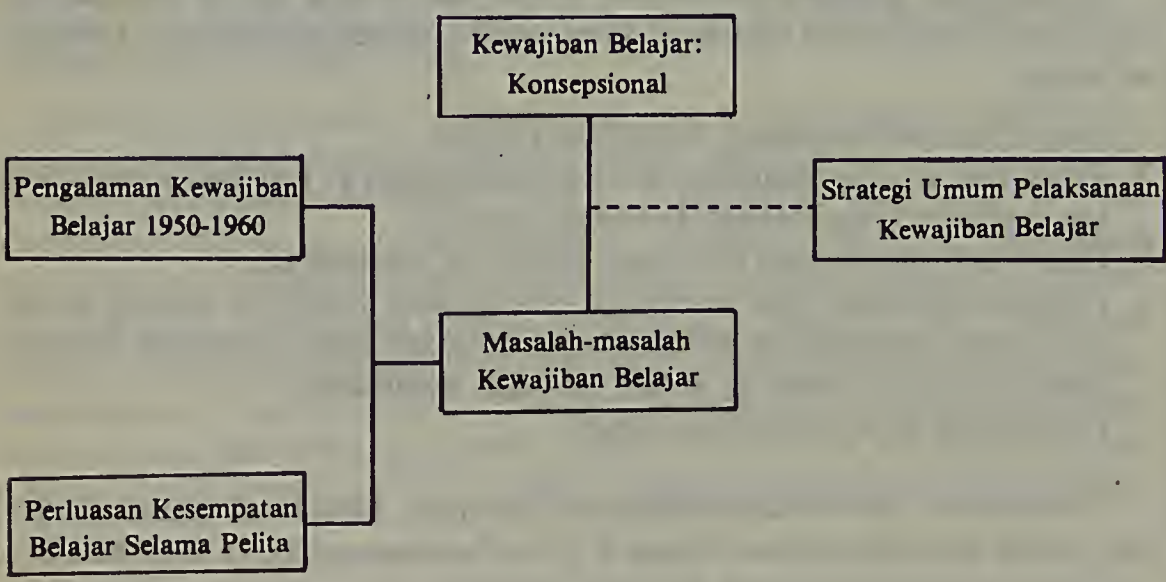
Pembahasan dalam tulisan ini menekankan diri pada pengalaman pelaksanaan kewajiban belajar pada masa lalu dan pengamatan singkat mengenai konsep kewajiban belajar dalam usaha untuk menyusun strategi pelaksanaan kewajiban belajar.

Secara singkat seperti telah diuraikan dalam pembahasan yang lalu, strategi pelaksanaan kewajiban belajar haruslah mengingat berbagai usaha seperti perluasan kesempatan belajar, peningkatan motivasi berpartisipasi dalam pelaksanaan kewajiban belajar, peningkatan penerangan kewajiban belajar ke segenap lapisan masyarakat, peningkatan kualitas murid sekolah dasar, pengembangan hubungan antara isi pendidikan dasar dan dunia kerja dan penyusunan undang-undang kewajiban belajar.

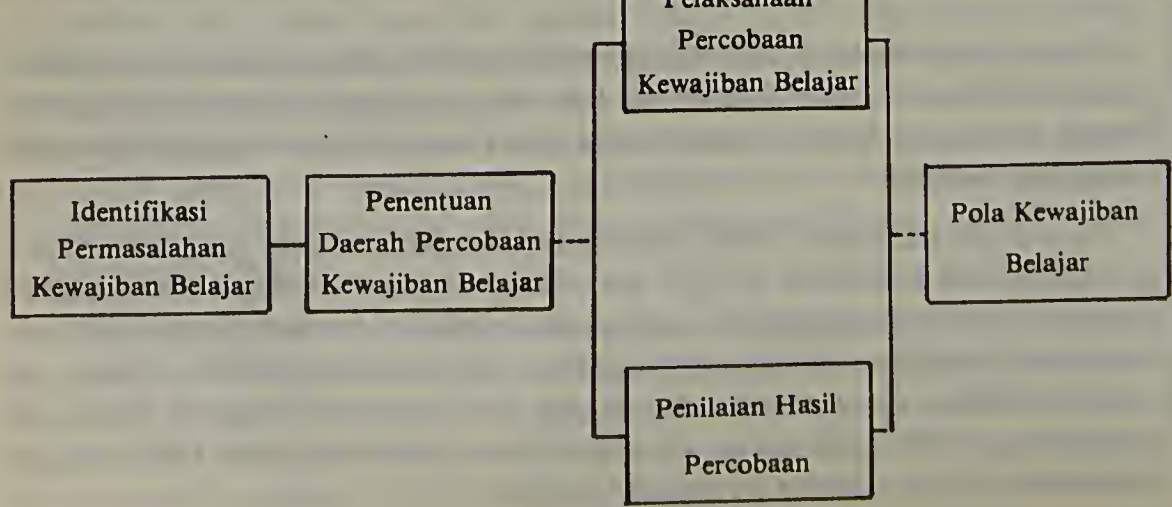
Usaha untuk menjalankan kewajiban belajar hanya semata-mata menekankan pada perluasan kesempatan belajar akan menimbulkan berbagai permasalahan lanjutan yang bersifat kumulatif karena meluasnya kesempatan belajar tersebut. Dengan perkataan lain, strategi pelaksanaan kesempatan belajar haruslah mengingat berbagai usaha atau kegiatan seperti dijelaskan di atas.

Strategi pelaksanaan kewajiban belajar jangka pendek dijalankan dengan mengadakan percobaan pelaksanaan kewajiban belajar di berbagai kecamatan dalam berbagai propinsi selama satu tahun. Dengan memperbandingkan hasil percobaan tersebut di antara berbagai kecamatan di berbagai propinsi akan dapat dimantapkan suatu pola kewajiban belajar.

Skema 1. Pengalaman dan Strategi Umum Pelaksanaan Kewajiban Belajar



Skema 2. Pola Penyusunan Kewajiban Belajar



PENDIDIKAN SEBAGAI SARANA PEMERATAAN PENDAPATAN

Murwatie B. RAHARDJO *

PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain disebutkan bahwa salah satu tugas nasional pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Khususnya di bidang pendidikan disebutkan (Bab XII, pasal 31, ayat 1) bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Selanjutnya (ayat 2) dinyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pengajaran Nasional yang diatur dengan Undang-undang. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) antara lain dikatakan bahwa usaha pendidikan juga harus meliputi program-program luar sekolah, yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan, termasuk kepramukaan, latihan-latihan ketrampilan dan pemberantasan buta huruf dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.

Pernyataan-pernyataan di atas jelas merupakan suatu cita-cita agar seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang golongan, usia, laki-laki atau perempuan, memperoleh kesempatan pendidikan guna mengejar keterbelakangan dan mencapai kepandaian, kecerdasan dan ketrampilan. Karena dengan mendapatkan pendidikan diharapkan bahwa penduduk, terutama sebagian besar yang masih hidup dalam lingkaran kemiskinan, dapat meningkatkan hidupnya dengan lebih baik.¹ Keharusan ini lebih dipertegas lagi dalam alam pembangunan lima tahun tahap ketiga (Pelita III), di mana cita-cita pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan mendapat perhatian yang utama.

* Staf CSIS

1 Yang dimaksudkan dengan "lingkaran kemiskinan" adalah keadaan hidup yang dari dirinya sendiri tidak dapat mencapai perbaikan, jadi berada dalam suatu lingkaran. Untuk dapat keluar dari lingkaran ini pendidikan merupakan faktor yang penting. Tetapi, tanpa bantuan luar pendidikan tidak dapat diperoleh, karena tidak "terbeli" oleh penduduk yang miskin.

Seperti tertuang dalam Repelita III, yang menjadi pusat perhatian kita sekarang ini adalah usaha-usaha untuk mencapai pemerataan pembangunan di segala bidang, menuju kepada pemerataan pendapatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini mutlak diperlukan adanya sarana-sarana penunjangnya. Salah satu di antaranya yang terpenting adalah pembangunan bidang pendidikan.

Di bawah ini akan diuraikan tentang hubungan timbal-balik antara pendidikan dengan pendapatan dengan meninjau kenyataan-kenyataan yang ada di Indonesia dewasa ini.

PENGARUH PENDAPATAN MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN

Peledakan jumlah penduduk di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pada abad ke-20 ini, selain memerlukan peningkatan jumlah pangan, pakaian dan tempat tinggal, juga meminta peningkatan sarana dan kesempatan pendidikan.

Di Indonesia, taraf pendidikan yang masih rendah merupakan salah satu tantangan besar dalam pembangunan bangsa Indonesia. Taraf pendidikan yang masih rendah itu tidak hanya tercermin dari jumlah rakyat yang masih buta huruf atau yang belum berkesempatan sekolah dan putus sekolah, akan tetapi dapat kita lihat dari kehidupan sehari-hari, misalnya taraf kebersihan dan taraf kesehatan yang masih rendah karena kurang dipahami dan diterapkan prinsip-prinsip hidup sehat, pemborosan waktu dan tenaga terutama bagi buruh berpenghasilan sangat rendah, pemborosan uang terutama pada waktu sehabis panen, cara bertani dengan produktivitas rendah, dan sebagainya. Gambaran ini akan terlihat jelas pada kehidupan daerah pedesaan di mana lebih dari 80% penduduk Indonesia berada.

Diperkirakan dewasa ini sejumlah 21 juta penduduk berusia 10 - 45 tahun masih buta huruf latin dan sejumlah 1.677.000 anak putus Sekolah Dasar. Pada tahun 1970, dari penduduk berumur sekolah hanya 28,5% yang sempat memperoleh pendidikan dalam berbagai tingkat pendidikan (Tabel 1). Kenyataan ini menunjukkan perlunya peningkatan pendidikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Seperti diketahui, untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik diperlukan pembiayaan yang besar. Tenaga pendidik yang baik perlu memperoleh imbalan yang cukup agar supaya dapat bekerja dengan baik. Selain itu juga sarana-sarana lain terutama untuk pendidikan formal, seperti gedung sekolah, peralatan dan lain-lain, semuanya memerlukan biaya.

Tabel 1

JUMLAH MURID DAN PENDUDUK BERUMUR SEKOLAH DI INDONESIA 1970					
Tingkat pendidikan	Murid		Penduduk umur sekolah		% jumlah murid terhadap penduduk umur sekolah yang bersangkutan
	Jumlah	% jumlah murid	Jumlah	% jumlah penduduk	
SD	12.804.000	85,5	23.106.900	44,1	55,4
SLP	1.341.170	9,0	10.235.500	19,5	13,1
SLA	583.580	3,8	9.605.500	18,3	6,1
PT	237.842	1,7	2.450.000	18,1	2,8
Jumlah	14.966.592	100,0	52.399.900	100,0	28,5

Sumber: BPP, Departemen P dan K, dalam Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, *Situasi Pendidikan di Indonesia Selama Sepuluh Tahun Terakhir*, Bagian I (Jakarta: CSIS, 1979), hal. 39

Kemampuan sosial ekonomi yang masih rendah dari sebagian besar rumah tangga di Indonesia, menyebabkan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah juga masih rendah. Ketimpangan pembagian pendapatan terutama masyarakat pedesaan yang pada umumnya bekerja di lapangan pertanian, menjadi salah satu sebab ketimpangan dalam kesempatan memperoleh pendidikan. Tabel 2 kiranya akan memperkuat pernyataan ini. Pada tahun 1976 sekitar 65,8% penduduk di sektor pertanian berada di bawah hidup yang layak dengan pendapatan kurang dari Rp 4.000,00 per kapita per bulan.¹ Sedangkan di luar sektor pertanian 41,9% penduduk Indonesia mempunyai pendapatan di bawah Rp 4.000,00 per kapita per bulan. Kenyataan di dunia pendidikan pada waktu itu menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya.

Di lain pihak memang secara nasional belum tersedia lembaga-lembaga pendidikan yang cukup. Hal ini terlihat dari perbedaan antara jumlah murid yang meminta pendidikan dengan jumlah tempat yang tersedia. Data arus lulus Sekolah Dasar tahun 1976 menyebutkan bahwa pada tahun sesu-

¹ Suatu batasan garis kemiskinan yang dibuat oleh Sayogyo, bahwa untuk hidup secara layak, dalam tahun 1976 diperlukan penghasilan lebih dari Rp 4.000,00 atau tepatnya Rp 4.330,00 (untuk daerah kota dan pedesaan) per kapita per bulan

Tabel 2

PEMBAGIAN PENDAPATAN PENDUDUK INDONESIA TAHUN 1976*						
Kelompok Pendapatan (Rupiah)	Sektor Pertanian		Di luar Sektor Pertanian		Sektor Buruh	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
- 1.000	2.242	6,6	838	3,6	1.141	3,8
1.000 - 2.000	5.605	16,5	1.511	6,5	2.655	8,7
2.000 - 4.000	14.486	42,7	7.377	31,8	8.601	28,3
4.000 - 10.000	10.789	31,7	10.824	46,8	13.615	44,9
10.000 - ke atas	854	2,5	2.617	11,3	4.340	14,3
Jumlah	33.976	100,0	23.167	100,0	30.352	100,0

Catatan: * Berdasarkan pengeluaran rumah tangga

Sumber: Biro Pusat Statistik, *Data Susenas V 1976*

dahnya (1977) hanya 65,3% yang melanjutkan Sekolah Lanjutan Pertama.¹ Ada kemungkinan bahwa tarif uang sekolah tidak berada di luar batas kemampuan banyak orang tua murid. Tetapi di lain pihak, tidak diketahui bagaimana sekolah-sekolah menentukan syarat-syarat penerimaan murid misalnya sejauh mana murid-murid yang mampu membayar, uang sekolah didahulukan dari mereka yang tidak mampu membayar, terutama pada sekolah-sekolah yang kekurangan tempat. Syarat-syarat penerimaan murid berbeda-beda di setiap sekolah, misalnya menurut umur, testing, tempat tinggal, kemampuan membayar uang sekolah dan sebagainya. Tetapi jelas bahwa pada tahun 1972 beban pembayaran uang sekolah sudah terlalu berat bagi kebanyakan golongan berpendapatan rendah.² Memang benar beban itu harus dipikul juga oleh orang tua murid dan bukan saja oleh pemerintah. Untuk golongan berpendapatan rendah dirasakan beban itu sudah terlalu berat dan kenaikan uang sekolah mungkin sekali akan mengakibatkan pendidikan hanya dapat dinikmati orang-orang yang mampu.

Di Indonesia, meskipun tidak ada data-data pasti yang mengungkapkan pengaruh pendapatan masyarakat terhadap pendidikan, tetapi secara umum dapat dilihat bahwa rendahnya tingkat pendidikan berhubungan dengan tingkat pendapatan sebagian besar masyarakat yang masih rendah.

1 Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen P dan K, *Rangkuman Statistik Persekolahan Departemen P dan K*, Jakarta, 1978
2 Ruth Daroesman, *Pembiayaan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Indonesia Raya, 1975), hal. 29

Di negara berkembang seperti Indonesia peranan pemerintah dalam dunia pendidikan sangat penting. Pemerintah diharapkan mengatur pelaksanaan pendidikan dengan sebaik-baiknya dengan pertimbangan bahwa pembangunan itu sendiri memerlukan tenaga-tenaga yang trampil. Sistem pemberian subsidi oleh pemerintah di bidang pendidikan mempunyai pengaruh yang berarti. Subsidi ini sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Selama ini hanya golongan berpendapatan tinggi saja yang dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih luas. Namun pemberian subsidi bukanlah satu-satunya usaha dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Sesuai dengan asas pendidikan yang kita anut, masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan. Dalam hal ini golongan berpendapatan tinggi diharapkan membantu golongan berpendapatan rendah dalam bidang pendidikan. Sebenarnya, melalui sistem perpajakan secara tidak langsung golongan berpendapatan tinggi membantu pembiayaan pendidikan. Di beberapa negara maju penyelenggaraan pendidikan ditanggung oleh masyarakat melalui sistem perpajakan progresif yang mampu membiayai sektor pendidikan yang terbuka untuk semua.¹ Sedangkan sistem perpajakan yang ada di Indonesia belum mampu memberikan hasil yang sepenuhnya dapat membantu kemajuan pendidikan. Pemberian subsidi bagi sekolah-sekolah juga masih terbatas.

Pelaksanaan keluarga berencana juga secara tidak langsung merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat berpendapatan rendah dalam mengatasi pembiayaan pendidikan. Dengan membatasi jumlah anak, maka makin memberi banyak kesempatan kepada anak-anaknya untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Di Korea Selatan dunia industri terlibat langsung dan aktif dalam dunia pendidikan, sebab disadari bahwa kemajuan industri hanya bisa ditunjang oleh pendidikan yang baik.²

Pembangunan yang diukur melalui berbagai indikator-indikator ekonomi belum memberikan gambaran yang utuh. Keberhasilan pembangunan juga diukur dari tingkat pembangunan sosial ekonomi.³ Salah satu petunjuk kemajuan ekonomi Indonesia adalah meningkatnya produk domestik bruto (GDP). Sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1977 terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang cukup berarti: nilai produk domestik bruto atas dasar harga konstan tahun 1973 rata-rata mengalami kenaikan sekitar 8,0% tiap tahun. Peningkatan pendapatan secara nasional belum tentu dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

1 Jean Pierre Jallade, "Financing Education for Income Distribution", *Finance & Development*, Maret 1979, hal. 36

2 *Kompas*, 16 Agustus 1979

3 Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan* (Jakarta: Gunung Agung, 1977), hal. 29

Untuk menimbulkan efek pemencaran (spreading effect) dalam pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia telah memperhatikan perencanaan yang bersifat regional. Rencana pembangunan daerah meliputi program-program dan proyek-proyek pemerintahan pusat yang berada di daerah tertentu, dan program-program serta proyek-proyek daerah sendiri. Satu bentuk program yang dewasa ini di Indonesia cukup berhasil adalah program-program bantuan untuk daerah-daerah. Program-program ini secara populer disebut program-program Inpres (Instruksi Presiden). Dalam bidang pendidikan, program bantuan ini menyangkut pembangunan sarana pendidikan dasar yang dikenal dengan program SD Inpres. Dalam tahun 1977, dari keseluruhan jumlah SD sebanyak 83.539 buah, 18,6% merupakan SD Inpres (15.566 buah).¹ Pada permulaan Repelita II, jumlah SD Inpres baru mencapai sekitar 6.000 buah. Dengan perkembangan yang pesat ini diharapkan bahwa semakin besar persentase penduduk umur sekolah yang dapat memperoleh pendidikan. Dalam tahun 1970, baru sekitar 55% penduduk umur sekolah (7-12 tahun) yang dapat ditampung (Tabel 1). Dalam Tabel 2 terlihat perkembangan peningkatan persentase penduduk umur sekolah antara 7 - 12 tahun yang dapat ditampung selama periode 1974 - 1978: 60,1% pada tahun 1974 meningkat menjadi 76,4% pada tahun 1978. Diharapkan bahwa pada akhir Repelita III seluruh (100%) jumlah penduduk umur sekolah antara 7 - 12 tahun dapat ditampung di SD.

Walaupun pelaksanaan pembangunan SD-SD Inpres secara fungsional masih belum seluruhnya mengenai sasaran, namun telah memberikan dasar konkrit bagi pelaksanaan pemerataan di bidang pendidikan. Belum tercapainya sasaran fungsional pembangunan SD-SD Inpres disebabkan oleh:²

- a. kesulitan mendapatkan tanah, terutama di kota-kota;
- b. kesulitan mencari lokasi yang tepat berhubungan dengan tersebarnya permukiman penduduk, khususnya di daerah-daerah terpencil;
- c. kurangnya persediaan tenaga calon guru di daerah-daerah tertentu sehingga harus dipindahkan dari daerah surplus guru;
- d. kesulitan mendapatkan tempat tinggal bagi guru-guru di daerah-daerah terpencil;
- e. masih banyak orang tua yang belum dapat menyekolahkan anaknya antara lain karena diperlukan untuk ikut mencari nafkah;
- f. kurang lengkapnya alat pendidikan yang tersedia, karena terbatasnya anggaran;
- g. prinsip bahwa setiap Kecamatan mendapat SD Inpres mengakibatkan pendirian SD tersebut kadang-kadang tidak sesuai dengan keperluan.

1 Lihat Lampiran Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan RI di depan Sidang Umum MPR, 11 Maret 1978

2 Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, *Situasi Pendidikan di Indonesia Selama Sepuluh Tahun Terakhir*, Bagian I (Jakarta: CSIS, 1979), hal. 46

Tabel 3

JUMLAH PARTISIPASI SEKOLAH DASAR			
Tahun	Jumlah		
	Penduduk usia 7-12 (I)	Murid usia 7-12 (II)	% II terhadap I
1974	21.214.120	12.748.347	60,1
1975	21.757.307	13.280.546	61,4
1976	22.256.269	14.461.606	64,9
1977	22.671.002	16.056.721	70,8
1978	23.092.683	17.651.826	76,4

Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depertemen P dan K, *Beberapa Masalah Pokok yang Masih Perlu Dipecahkan yang Menyangkut Pendidikan Dasar*, 1978

PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PENDAPATAN

Pendapatan seseorang, apabila dilihat sebagai output pendidikan, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: sifat pekerjaan yang tersedia, daerah pemukiman tenaga pekerja, kesempatan untuk mendapatkan kerja sesuai dengan pendidikannya, kemampuan yang dapat diketahui pada waktu pendidikannya, dan lain-lain. Untuk memperkirakan hubungan antara pendidikan dan pendapatan perlu digunakan ukuran-ukuran yang operatif. Walaupun pendidikan bukan merupakan satu-satunya jenis investasi tenaga kerja (human capital), tetapi merupakan faktor yang penting dalam kehidupan (life cycle) seorang pekerja.¹ Perbedaan pendapatan karena perbedaan pendidikan di antara pekerja tidak dapat ditetapkan dengan pasti. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh faktor-faktor lain, misalnya pengalaman bekerja. Hubungan antara pendidikan dengan pendapatan sangat jelas terlihat apabila pendidikan pekerja tersebut sesuai dengan sifat pekerjaan. Faktor usia hampir-hampir tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan seorang pekerja. Pertumbuhan pendapatan karena usia lebih banyak merupakan konsekuensi dari lamanya (pengalaman) kerja.

Di Indonesia, masalah pendidikan berhubungan dengan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Beberapa faktor menyebabkan sulitnya para lulusan sekolah di berbagai tingkatan dalam memperoleh lapangan kerja: terba-

1 F. Thomas Juster, *Education, Income, and Human Behavior*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1974, hal. 72

tasnya kesempatan kerja di satu pihak dan rendahnya mutu pendidikan di pihak lain.¹ Dalam konsep Pokok-pokok Pikiran Pembaharuan Pendidikan Nasional, mutu pendidikan dilihat dari segi pengetahuan, ketrampilan dan keilmuan, tetapi sebenarnya mutu pendidikan itu relatif sifatnya. Sesuai dengan tuntutan pembangunan bangsa Indonesia sekarang ini, arah pembangunan di bidang pendidikan dititikberatkan kepada pemerataan pendidikan. Kebijakan ini ditujukan untuk memungkinkan semua orang memperoleh sekurang-kurangnya taraf pendidikan minimal serta kesempatan yang sama untuk memasuki pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan. Tetapi asas pemerataan pendidikan itu tidak akan mengabaikan peningkatan mutu pendidikan. Diharapkan agar sejak pendidikan dasar sudah dapat dipersiapkan tenaga-tenaga yang mampu mengambil manfaat pendidikan dan segera dapat menjadi tenaga kerja apabila diperlukan. Sasaran dari pemerataan pendidikan adalah untuk mempersiapkan tenaga-tenaga trampil dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Menanggapi konsep Pokok-pokok Pikiran Pembaharuan Pendidikan Nasional tentang penjenjangan sistem pendidikan, Dr. J. Muller berpendapat bahwa mengingat Sekolah Lanjutan Pertama mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai kelanjutan pendidikan dasar dan sebagai masa peralihan ke pendidikan yang lebih tinggi, maka pendidikan dasar dapat diperluas menjadi delapan tahun.² Tetapi ditambahkannya bahwa pendidikan dasar pada pokoknya harus bersifat "terminal", artinya harus merupakan persiapan nyata untuk menyelenggarakan pekerjaan kelak. Perubahan ini dapat memperbaiki mutu SD dan sekaligus membantu rakyat banyak yang untuk sebagian besar hanya bisa menempuh taraf pendidikan dasar.

Pengaruh pendidikan terhadap pendapatan dapat ditunjukkan dari perbedaan nilai median pendapatan/pegawai menurut tingkat pendidikan, seperti terlihat dalam Tabel 4. Tabel 4 yang menunjukkan peningkatan nilai median pendapatan buruh/pegawai menurut tingkat pendidikan, kiranya dapat menunjang pendapat Dr. J. Muller di atas. Dasar pemikiran yang dapat dipakai adalah sebagai berikut. Nilai median sebesar Rp 4.580,00 per bulan untuk buruh/pegawai yang tidak sekolah, berarti bahwa 50% dari kelompok tersebut menerima pendapatan di bawah Rp 4.580,00 per bulan. Nilai median pendapatan mereka yang bersekolah tetapi tidak menamatkan SD adalah sekitar 40% lebih tinggi daripada mereka yang tidak bersekolah; lulusan SD menerima pendapatan (nilai median) sekitar 2 kali, lulusan SLP 4 kali, lulusan SLA sekitar 5 kali, lulusan akademi sekitar 8 kali, dan lulusan universitas sekitar 12 kali lebih besar daripada pendapatan (nilai median) mereka yang tidak bersekolah.

1 *Kompas*, 16 Oktober 1979

2 *Kompas*, 17 Oktober 1979

Dengan perkataan lain, investasi untuk pendidikan — dinyatakan dalam jumlah tahun pendidikan — memberikan hasil (rate of return) yang tidak linier; artinya, setiap tambahan satu tahun pendidikan tidak memberikan tambahan pendapatan yang sama besarnya. Lulusan SLP (9 tahun pendidikan) memperoleh kenaikan pendapatan yang cukup berarti (2 kali pendapatan lulusan SD); tetapi pendapatan lulusan SLA (12 tahun pendidikan) hanya 25% di atas pendapatan lulusan SLP. Dengan demikian, dari sudut ekonomi, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah, apabila memang tidak berniat meneruskan jenjang pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi (akademi atau universitas), adalah efisien untuk menghentikan pendidikannya setelah tingkat SLP.

Tabel 4

PENDAPATAN (NILAI MEDIAN) BURUH/PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN							
	Tidak sekolah	Belum tamat SD	SD	SLP	SLA	Akademi	Universitas
Jumlah tahun pendidikan *	0	< 6	6	9	12	15	17
Median pendapatan (Rp/bulan)	4.580	6.363	9.672	18.273	23.349	37.178	54.741
Indeks	(100)	(139)	(211)	(399)	(510)	(812)	(1.195)

* Dalam arti jumlah minimum tahun pendidikan di tiap jenjang pendidikan

Sumber: Diolah dari Lampiran 1

Sudah barang tentu pernyataan tersebut telah mengesampingkan faktor-faktor: (1) Usia pekerja, yang dapat ditunjukkan dengan lamanya kerja maupun jumlah jam kerja dalam sehari/seminggu, pada saat itu di mana faktor-faktor tersebut mempunyai konsekuensi terhadap pendapatan maupun pertumbuhan; (2) Adanya tuntutan pribadi, yaitu adanya keinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, tetapi karena sesuatu hal misalnya alasan biaya maka terpaksa ia memasuki lapangan kerja dan apabila keadaan memungkinkan sebagian pendapatannya untuk membiayai pendidikan selanjutnya. Data mengenai hal ini memang tidak ada, namun apabila kita amati lebih dalam masalah ini kiranya cukup banyak terdapat terutama di kota-kota besar di mana sarana-sarana untuk memenuhi tujuan ini lebih memungkinkan; (3) Adanya sekolah kejuruan di samping sekolah umum. Dan

apakah dengan mengikuti pendidikan pada sekolah kejuruan akan mempengaruhi pendapatan seseorang, memang benar, tetapi perbedaannya relatif tidaklah besar. Dari data yang ada (Lampiran 1) ternyata jumlah buruh/pegawai yang berpendidikan tamat tingkat SLP kejuruan untuk semua golongan pendapatan masih lebih kecil (kurang dari 30%) daripada buruh/pegawai yang berpendidikan tamat tingkat SLP umum.

Contoh lain yang menggambarkan pengaruh pendidikan terhadap pendapatan seseorang adalah Peraturan Gaji Pegawai Sipil. Gaji pegawai negeri secara jelas mencerminkan sekaligus tingkat pendidikan dan masa kerja (lihat Lampiran 4). Selain gaji pokok besarnya pendapatan yang diperoleh seorang pegawai negeri tergantung dari berbagai macam tunjangan yang ditetapkan berdasarkan: (a) jumlah keluarga; (b) tingkat kemahalan hidup; (c) tugas-tugas yang menjadi kewajibannya; dan (e) tunjangan lain-lain. Gaji pertama seorang pegawai negeri yang diangkat dalam suatu pangkat menurut peraturan PGPS diberikan menurut ruang/golongan gaji yang ditentukan untuk pangkat itu, akan tetapi faktor masa kerja atau pengalaman kerja juga diperhatikan dalam penetapan gaji permulaan pegawai tersebut.¹

Contoh di atas adalah sistem penetapan gaji seorang pegawai menurut pendidikannya. Sistem pemberian gaji di masing-masing tempat bekerja akan berlainan, bisa berdasarkan sistem borongan, sistem prestasi, sistem karier dan sebagainya, di mana faktor pendidikan dapat atau tidak berpengaruh terhadap pendapatan seorang pekerja.

Seperti dikatakan di atas, hubungan antara pendidikan dengan pendapatan seseorang tergantung dari berbagai faktor. Seseorang dapat berprestasi tinggi biarpun pendidikannya relatif rendah, misalnya karena dapat mengembangkan kemampuan fisiknya. Tenaga kerja semacam ini biasa disebut sebagai tenaga kerja tanpa ketrampilan (unskilled) bila tidak memiliki pendidikan sama sekali dan tenaga kerja semi-skilled bila memiliki ketrampilan yang diperoleh dari pendidikan yang tidak penuh. Sedangkan adanya tenaga kerja yang berpendidikan tinggi (lulusan Perguruan Tinggi) tetapi mempunyai pendapatan yang relatif rendah dapat juga disebabkan berbagai faktor, misalnya: sifat/macam pekerjaan yang tidak cocok dengan pendidikan yang didapat; atau kurangnya kesempatan kerja yang telah tersedia; dan sebagainya.

PENDIDIKAN DI MASA PEMBANGUNAN

Hasil pembangunan di bidang pendidikan, secara ekonomi tidak dapat dirasakan dalam jangka waktu yang singkat. Namun pendidikan sebagai salah

1 Drs. Marsono, *Pembahasan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian*, PT Ichtiar Baru - Van Hoeve, Jakarta, 1974, hal. 48

satu unsur dari investasi tenaga kerja (human capital) sangat berpengaruh terhadap keseluruhan hasil pembangunan. Tanpa peningkatan mutu pendidikan tenaga kerja yang menunjang masing-masing kegiatan pembangunan, tidak akan dapat meningkatkan hasil pembangunan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Tetapi pengaruh pendidikan ini tidak hanya harus dilihat secara makro, melainkan juga secara mikro, yaitu terhadap peningkatan pendapatan penduduk.

Sebagai penyelenggara dan pengelola sistem pendidikan nasional pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar, khususnya untuk mengatasi persoalan yang timbul karena rendahnya pendapatan sebagian besar penduduk. Di sini diartikan bahwa dipandang dari perorangan, pendidikan adalah sesuatu yang dikonsumsi. Oleh karena itu biaya pendidikan juga harus dipikul oleh masyarakat (perorangan). Maka berdasarkan alasan tersebut dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan (umum) yang membebaskan sama sekali biaya pendidikan sangat tidak mendidik masyarakat itu sendiri. Akan tetapi untuk memperkirakan berapa besar nilai tambah (dalam arti keuntungan) dari pendidikan setelah memasuki lapangan kerja adalah sangat sulit.

Sementara ini pembangunan telah menjangkau masalah-masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak terutama masyarakat berpendapatan rendah. Sistem pendidikan yang baik dipastikan dapat menopang keberhasilan kegiatan pembangunan dimaksud. Dengan demikian keadaan pembagian pendapatan penduduk Indonesia dapat diperbaiki. Menurut data tahun 1976 tenaga kerja yang berpendidikan tinggi (lulusan Sekolah Lanjutan Atas dan Perguruan Tinggi) hanya sekitar 4,1% dari seluruh jumlah tenaga kerja di berbagai kegiatan lapangan pekerjaan. Tenaga kerja di bidang pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan sebagian terbesar berpendidikan Sekolah Dasar ke bawah. Sekitar 36,8% tenaga kerja pertanian tidak pernah sekolah; 38,6% pernah sekolah tetapi tidak tamat SD; sedangkan sejumlah 22,7% telah menamatkan SD. Tenaga kerja yang berpendidikan SLA dan Perguruan Tinggi sebagian besar (63,3%) bekerja di bidang jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Di sektor industri, sektor yang diberi peranan penting dalam Repelita III dan seterusnya, ternyata hanya 3,3% dari seluruh tenaganya berpendidikan SLA dan Perguruan Tinggi, sedangkan 91,5% berpendidikan SD ke bawah.¹ Dari gambaran keadaan pendidikan pada tahun 1976 tersebut terlihat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih rendah pendidikannya.

Dengan adanya sekolah kejuruan tampaknya lulusan SLP kejuruan saat ini belum menunjukkan pengaruh yang besar terhadap pendapatannya. Ada kemungkinan bahwa bagi lulusan SLP maupun SLA kejuruan lebih mudah

1 Lihat Lampiran 2

mendapatkan lapangan pekerjaan daripada lulusan SLP maupun SLA umum dalam alam pembangunan sekarang ini.

Dalam hubungannya dengan pengembangan sumber-sumber alam yang merupakan potensi utama kekayaan negara, sangat dibutuhkan tenaga-tenaga kerja yang trampil. Manusia merupakan pengelola yang harus memanfaatkan, memelihara dan mengamankan kekayaan alam. Tanpa adanya peningkatan kualitas dari manusia-manusianya bukan tidak mungkin kekayaan alam yang tersedia akan rusak. Pendidikan juga mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Lampiran 1

JUMLAH BURUH/PEGAWAI MENURUT BESARNYA PENDAPATAN SEBULAN DARI PEKERJAAN UTAMA DAN PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN, TAHUN 1976

Besarnya pendapat- an sebulan (Rp)			Pendidikan yang ditamatkan					Univer- sitas
	Tidak sekolah	belum tamat SD	SD	SLP	SLA	Akademi		
- 3.000	1.049.561	785.941	248.159	25.920	13.570	750	-	
3.000 - 4.999	1.311.194	1.114.786	507.278	37.286	25.156	1.037	145	
5.000 - 6.999	692.141	898.471	531.550	58.834	32.713	1.810	-	
7.000 - 9.999	600.165	911.573	642.409	101.844	61.732	1.353	108	
10.000 - 14.999	292.748	629.866	644.808	234.656	199.918	6.142	2.021	
15.000 - 19.999	149.727	383.868	514.861	229.438	227.468	13.686	2.023	
20.000 - 29.999	54.991	211.845	392.688	254.863	344.520	29.940	7.739	
30.000 - 39.999	13.125	63.375	140.735	153.258	241.271	32.279	11.980	
40.000 - 49.999	4.194	13.493	52.947	61.741	98.567	24.554	15.827	
50.000 - 74.999	2.285	10.580	32.416	44.128	74.277	26.942	20.073	
75.000 - 99.999	1.133	1.875	6.575	11.542	19.169	9.190	12.516	
100.000 - 149.999	192	615	1.305	1.795	7.200	4.681	5.779	
150.000 - 249.999	-	131	2.931	1.439	3.369	2.618	5.388	
250.000 - 299.999	-	-	102	20	302	178	872	
300.000 +	511	-	99	198	1.316	620	2.904	
Jumlah	4.171.967	5.026.419	3.718.875	1.217.555	1.351.864	155.780	87.375	

Sumber: Biro Pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*, 1976, vus 79-27, hal. 174

Lampiran 2

JUMLAH PENDUDUK INDONESIA YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN DAN PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN TAHUN 1976

Lapangan pekerjaan	Tidak sekolah	Belum tamat SD	Pendidikan				Jumlah
			SD	SLP	SLA	PT	
1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	10.592.253	11.238.421	6.621.253	537.829	119.422	7.005	29.117.283
2. Pertambangan, Penggalian	28.398	44.105	24.511	6.117	7.132	3.102	113.365
3. Industri Pengolahan	1.203.427	1.490.324	936.844	206.366	117.926	13.385	3.968.272
4. Listrik, Gas, Air	178	3.897	7.274	6.581	7.717	1.398	27.045
5. Bangunan	138.392	310.190	270.202	55.950	34.867	5.661	815.262
6. Perdagangan besar eceran serta Rumah makan dan Hotel	2.041.177	2.257.877	1.821.566	434.908	234.773	23.594	6.813.895
7. Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi	158.130	416.489	481.475	141.916	74.741	11.232	1.283.983
8. Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan & Tanah dan Jasa Perusahaan	1.988	11.887	20.384	13.647	35.809	10.718	94.433
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Perorangan	729.422	1.055.732	1.255.805	775.892	1.039.530	190.403	5.048.784
10. Lain-lain	7.608	5.591	6.878	1.960	2.857	1.021	25.915
Jumlah	14.900.973	16.834.513	11.446.192	2.181.166	1.674.774	268.619	47.306.237

Sumber: BPS, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*, Sakernas 1976

Lampiran 3

JUMLAH SEKOLAH MENURUT STATUS TIAP TINGKATAN DAN JENIS SEKOLAH

Tingkatan dan jenis sekolah	Negeri		Integrasi	Swasta			Jumlah
	Induk	Filial		Subsidi	Bantuan	Swasta	
Sekolah Dasar/SD	72.011	-	-	4.700	1.201	5.627	83.539
SD Biasa	56.445	-	-	4.700	1.201	5.627	67.973
SD Inpres	15.566	-	-	-	-	-	15.566
Sekolah Lanjutan Pertama	1.961	373	1.574	432	421	4.634	9.395
SMP	1.567	347	787	341	383	4.093	7.518
SMEP (SM Ekonomi Pertama)	37	10	376	25	6	276	730
SKKP (Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama)	110	-	96	42	24	84	356
ST (Sekolah Teknik)	247	16	315	24	8	181	791
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	1.143	107	7	263	135	1.705	3.360
SMA	483	43	-	116	62	660	1.364
SMEA	234	27	4	30	31	348	674
SKKA	48	9	1	11	8	80	157
STM	129	16	2	42	16	364	569
SPG (Sekolah Pendidikan Guru)	199	12	-	64	18	252	545
SGO (Sekolah Guru Olahraga)	50	-	-	-	-	1	51

Sumber: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Statistik Persekolahan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1977, 1977*

GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV			
MASA KERJA GOL.	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK			MASA KERJA GOL.	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK			MASA KERJA GOL.	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK			MASA KERJA GOL.	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK		
	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	12.000				21.200					34.100	35.900	37.800	39.800	42.200	44.700
1	-				-				0	-	-	-	-	-	-
2	13.200				23.400	26.900	28.200	29.600	1	34.100	35.900	37.800	39.800	42.200	44.700
3	-	15.700	16.500		-				2	37.500	39.500	41.600	43.800	47.000	49.700
4	14.400	-	-		25.600	29.300	30.800	32.400	3	40.900	43.100	45.400	47.800	51.800	54.700
5	-	17.100	18.100		-				4	44.300	46.700	49.200	51.800	56.600	59.700
6	15.600	-	-		27.800	31.700	33.400	35.200	5	47.700	50.300	53.000	55.800	61.400	64.700
7	-	18.500	19.700		30.000	34.100	36.000	38.000	6	51.100	53.900	56.800	59.800	66.200	69.700
8	16.800	-	-		32.200	36.500	38.600	40.800	7	54.500	57.500	60.600	63.800	71.000	74.700
9	-	19.900	21.300		-				8	57.900	61.100	64.400	67.800	75.800	79.700
10	18.000	-	-		25.600	29.300	30.800	32.400	9	61.300	64.700	68.200	71.800	80.600	84.700
11	-	21.300	22.900		27.800	31.700	33.400	35.200	10	64.700	68.300	72.000	75.800	85.400	89.700
12	19.200	-	-		30.000	34.100	36.000	38.000	11	68.100	72.000	76.000	80.000	90.000	94.100
13	-	22.700	24.500		32.200	36.500	38.600	40.800	12	71.500	75.600	79.800	84.000	94.100	98.200
14	20.400	-	-		-				13	74.900	79.100	83.400	87.800	98.800	103.200
15	-	24.100	26.100		34.400	38.900	41.200	43.600	14	78.300	82.700	87.200	91.800	102.800	107.200
16	21.600	-	-		36.600	41.300	43.800	46.400	15	81.700	86.300	91.000	95.800	106.800	111.600
17	-	25.500	27.700		38.800	43.700	46.400	49.200	16	85.100	90.000	95.000	100.000	111.000	116.000
18	22.800	-	-		41.000	46.100	49.000	52.000	17	88.500	93.600	98.800	104.000	115.200	120.000
19	-	26.900	29.300		43.200	48.500	51.600	54.800	18	91.900	97.200	102.600	108.000		
20	-	28.300	30.900		45.400	51.100	54.500	59.000	19	95.300	100.700	106.200	111.600		
21	24.600	-	-		47.600	52.100	55.500	59.000	20	98.700	103.300	108.000	112.800		
22	-	-	-		49.800	54.300	57.800	61.300	21	102.100	106.800	111.600	116.400		
23	-	30.400	33.300		52.000	56.500	59.400	63.200	22	105.500	110.300	115.200	120.000		
24					54.200	58.700	61.600	65.000	23	108.900	113.800	118.800			
					56.400	60.900	63.800	67.200	24	112.300	117.400	122.400			

Catatan Lampiran 4

Syarat pengangkatan:

Gol. I. Sekurang-kurangnya tamat Sekolah Dasar VI tahun.

Untuk golongan I/b, c, d,:

- (1) sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama jurusan yang diperlukan atau sederajat dengan itu, atau
- (2) mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan untuk pangkat-pangkat golongan gaji I.

Gol. II. (1) Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas jurusan yang diperlukan atau yang sederajat dengan itu, atau

- (2) mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan dan lulusan ujian dinas tingkat I yang disyaratkan untuk pangkat-pangkat tersebut dalam daftar pangkat-pangkat golongan gaji II.

Untuk golongan II/b, c, d,

Sekurang-kurangnya berijazah pendidikan kejuruan khusus 2 tahun di atas SLTA, Sarjana Muda/Bakaloreat Perguruan Tinggi menurut jurusan yang diperlukan atau yang sederajat dengan itu.

Gol. III dan IV

- (1) Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Tinggi tingkat Sarjana menurut jurusan yang diperlukan atau yang sederajat dengan itu, atau

Untuk golongan III:

- (2) Mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan serta lulus ujian dinas tingkat II yang disyaratkan untuk pangkat-pangkat tersebut dalam daftar pangkat golongan gaji III.

Untuk golongan IV:

- (3) Mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan serta lulus ujian dinas tingkat III yang disyaratkan untuk pangkat-pangkat tersebut dalam daftar pangkat-pangkat golongan gaji IV.

DIMENSI PENDIDIKAN, PEMBAURAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Sudiharto DJIWANDONO

PERMASALAHAN

Masalah pembauran atau juga dikenal sebagai asimilasi, yaitu proses penyatuan ataupun pengintegrasian golongan Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan Asing ke dalam kesatuan bangsa Indonesia sehingga menjadi satu kesatuan sosiologis yang harmonis, merupakan suatu masalah yang cukup pelik. Masalahnya memang tidak sederhana, sebaliknya sangat kompleks, bercampur-baur antara faktor-faktor obyektif dan faktor-faktor psikologis-emosional.

Tidak bisa dihindari bahwa pembicaraan mengenai masalah pembauran atau asimilasi hampir selalu diartikan atau diasosiasikan dengan "masalah Cina" di Indonesia dengan segala macam citra negatif dan prasangka di dalamnya. Di masyarakat masih banyak orang yang tidak dapat atau tidak mau membedakan apakah seseorang keturunan asing itu WNI atau WNA, dan sejauh hal itu menyangkut seorang Cina banyak orang tidak mau tahu apakah ia seorang peranakan (babah) atau seorang totok (sinkhe). Kebanyakan orang akan menganggapnya sebagai seorang totok (sinkhe) dengan prasangka-prasangka tertentu yang terkandung dalam anggapan tersebut. Di kalangan masyarakat seperti antara lain di kalangan masyarakat Jawa, sebutan atau istilah sinkhe (orang Jawa menyebutnya "singkek") pada umumnya mempunyai konotasi yang tidak baik. Hari Poerwanto dalam artikelnya yang berjudul "The Problem of Chinese Assimilation and Integration in Indonesia" antara lain mengatakan bahwa di kalangan orang-orang Jawa istilah itu mempunyai konotasi "impoliteness" (sinkhe means an impolite person).¹

Dalam hal ini "sinkhe" yang konon berarti "tamu-tamu baru" telah

1 Hari Poerwanto "The Problem of Chinese Assimilation and Integration in Indonesia", *Philippine Sociological Review*, 24 (1-4), January-October 1974, p. 52

memperoleh nuansa yang mengandung pengertian tidak baik, yang sama sekali lain dari arti yang sebenarnya.

Bahwa asimilasi selalu diartikan atau diasosiasikan dengan masalah Cina kiranya dapat dimengerti mengingat adanya kenyataan bahwa dibandingkan dengan golongan-golongan minoritas lainnya, golongan minoritas dari etnik Cina jumlahnya relatif besar dan mempunyai peranan besar di bidang ekonomi, khususnya di sektor perdagangan. Namun apabila karena kenyataan itu orang lalu meninggalkan akal sehat dan secara terus-menerus mendasarkan sikap dan penilaiannya pada prasangka dan asumsi-asumsi yang stereotif mengenai masalah Cina dan masalah pembauran pada umumnya, tentu hal itu merupakan gejala yang tidak sehat dan masalahnya tidak akan pernah terselesaikan.

Kenyataan di masyarakat adalah sedemikian rupa, antara lain sebagaimana diungkapkan oleh Majalah *Tempo*: "Di Indonesia, bagi kebanyakan orang, kata 'Cina' punya konotasi yang tidak enak. Untuk mengucapkan bahwa 'orang Cina juga manusia' bukan saja akan terdengar klise, tetapipun bertentangan dengan prasangka yang berakar dalam di sini. Untuk mengatakan bahwa 'kita semua sebenarnya Cina' bisa kian berabe - meskipun kita tahu, bahwa kitapun bisa berhitung keburukan dan keunggulan yang terdapat pada diri kita."¹

Ungkapan tersebut, meskipun terasa agak didramatisir, kiranya memang mengandung kebenaran. Adanya prasangka di masyarakat terhadap golongan etnik Cina misalnya merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dan ini jelas merupakan faktor penghambat yang perlu diperhitungkan dalam usaha pembauran.

Secara umum dapat dikatakan bahwa prasangka adalah suatu anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum seseorang mengetahui, menyaksikan ataupun menyelidiki sendiri sesuatu itu. Prasangka telah membuat orang berpikir dan mengambil sikap dalam suatu pola tertentu yang negatif, dan sering kali membuat dirinya tertutup terhadap pandangan lain yang tidak sesuai dengan pola yang dianutnya, tidak peduli apakah pandangan lain itu rasional dan secara obyektif benar.

Ada banyak pendapat maupun teori mengenai prasangka, tetapi dalam rangka kehidupan kemasyarakatan prasangka itu selalu berkenaan dengan penilaian atau sikap dari kelompok yang satu terhadap kelompok lain yang termasuk dalam kategori tertentu, suatu penilaian yang menganggap rendah atau sikap yang tidak bersahabat atas dasar perbedaan suku, ras, agama, tingkatan sosial, maupun ideologi atau jenis kelamin.²

1 Majalah *Tempo*, No. 8 Tahun X, 19 April 1980, Catatan Pinggir

2 Lihat antara lain: Ernst M. Wallner: "Prejudice and Society", *Education*, Vol. II p. 94-95, Institute for Scientific Cooperation, Tubingen, 1975

Apa yang dikemukakan di muka tentang pandangan yang masih terdapat di (sebagian) kalangan masyarakat Jawa terhadap orang-orang Cina sehingga sebutan "sinkhe" mempunyai konotasi yang tidak baik, merupakan satu contoh bagaimana prasangka itu "bekerja" dan mempengaruhi pandangan orang. Di sini juga tampak adanya sikap yang apriori dan pandangan yang bersifat generalisasi yang semuanya itu bersumber dari prasangka. Bahwa semua orang Cina adalah sinkhe, bahwa antara yang WNA dan yang WNI tiada beda dan karena itu mereka pada umumnya tidak baik.

Sebab-musabab dari timbulnya prasangka demikian mungkin dapat ditelusur kembali dari kejadian-kejadian maupun pengalaman-pengalaman sejarah di masa lalu. Sebagai pendatang-pendatang baru dengan latar belakang kebudayaan yang lain, bisa dimengerti apabila mereka menunjukkan tingkah laku dan kebiasaan-kebiasaan yang dalam pandangan masyarakat setempat dianggap kurang baik. Lebih-lebih di masa lalu di mana adat dan tradisionalisme masih sangat kuat pengaruhnya, sesuatu yang baru yang datang dari luar lingkungannya selalu menimbulkan perasaan curiga yang dapat berkembang menjadi antipati bahkan sikap permusuhan.

Keadaan ini lebih dipertajam lagi oleh campur tangan pihak penguasa pada waktu itu sehingga proses penyesuaian (adaptasi) dan pembauran tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya dari pihak pendatang, situasi lingkungan baru yang tampak kurang akomodatif bahkan kadang-kadang memusuhi, mendorong mereka untuk bersikap eksklusif, menyendiri dalam kelompok mereka di tengah-tengah masyarakat pribumi yang mayoritas. Eksklusivisme ini makin terpujuk oleh berbagai macam kebijaksanaan pemerintah kolonial pada waktu itu baik di bidang hukum, pemukiman, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain.

Masalahnya menjadi semakin kompleks sejalan dengan kompleksitas kehidupan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya kita tidak hanya berhadapan dengan masalah perbedaan latar belakang kebudayaan, tetapi di dalamnya telah bercampur-baur dengan permasalahan yang bersifat ekonomi, sosial, dan juga politik. Sementara orang memandang bidang ekonomi dan sosial merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab utama kurang serasnya hubungan antara golongan pribumi dan nonpribumi sehingga proses pembauran tidak berjalan lancar. Pandangan ini lebih melihat peranan golongan nonpribumi yang begitu besar di bidang ekonomi serta perbedaan kekayaan yang menyolok di antara kedua golongan sebagai faktor-faktor dominan yang memisahkan kedua belah pihak.

Tanpa mengingkari bahwa masalah di bidang ekonomi dan perbedaan kaya miskin merupakan faktor-faktor yang penting yang harus diperhitungkan dalam rangka usaha pembauran, menurut hemat penulis faktor utama yang merupakan hambatan terbesar adalah *prasangka* yang dalam sejarah te-

lah tumbuh dan tertanam dalam di masyarakat. Sehingga oleh karenanya yang kiranya paling penting dilakukan ialah mengeliminir kalau tidak menghilangkan prasangka itu dari masyarakat.

PERLU PERUBAHAN SIKAP MENTAL

Masalah pembauran pada hakikatnya adalah masalah hubungan antar manusia, dan ini tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya selama didasarkan atas atau selalu dibayangi oleh prasangka. Sebaliknya hubungan itu akan berjalan wajar manakala prasangka itu melalui suatu proses dapat dihapuskan, sekaligus dibina dan dikembangkan sikap-sikap positif seperti tenggang rasa, saling pengertian dan saling menghargai. Artinya mutlak diperlukannya suatu perubahan sikap mental dari yang negatif ke arah sikap mental yang lebih positif secara individual maupun kelompok, dari kedua belah pihak.

Proses demikian kiranya dapat diharapkan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal atau pendidikan kemasyarakatan, baik di sekolah maupun di luar sekolah khususnya di lingkungan keluarga.

Hubungan antara pendidikan dan masalah pembauran harus dilihat dalam kerangka pemikiran ini. Terutama aspek-aspek kognitif dan afektif dari pendidikan diharapkan akan membawa orang ke arah sikap yang lebih terbuka, berpikir dan bertindak secara lebih rasional dan bertanggung jawab. Dengan demikian melalui proses pendidikan prasangka dapat dieliminir dan berbarengan dengan itu proses pembauran diharapkan dapat berjalan lebih lancar.

''Melalui pendidikan kiranya kita akan dapat secara bertahap mengarahkan emosi dan tindakan-tindakan yang bersifat impulsif ke arah saluran yang sehat, dan apabila orang masih memerlukan kambing hitam untuk menyalurkan perasaan-perasaan agresinya, kita seyogyanya mencari dan memerangi musuh dalam kemiskinan, kelaparan, penyakit dan penderitaan, tidak pada sesama manusia, yang seharusnya kita perlakukan sebagai saudara tanpa memandang asal-usulnya, agama, ras atau kelas. Itulah yang seharusnya, tanpa prasangka, menjadi harapan dalam abad kita sekarang.''¹

Apabila kita tarik ke alam dan suasana Bangsa Indonesia, memperlakukan sesama manusia sebagai saudara sebagaimana dianjurkan oleh Ernst M. Wallner di atas, sangat sesuai dengan asas Peri Kemanusiaan dari Pancasila dasar falsafah negara kita.

Seperti ditegaskan oleh almarhum Prof. Dr. N. Drijarkara, Peri Kemanu-

1 Ernst M. Wallner: *Ibid.*, p. 109

siaan berarti menghormati, menjunjung tinggi sesama manusia, setiap manusia, segala manusia. Dalam hubungan ini antara lain beliau mengemukakan, rumusan negatif dari Peri Kemanusiaan adalah: "Apa yang tidak diinginkan untuk dirimu sendiri, janganlah itu kau lakukan terhadap sesama manusia." Sedangkan rumusan positifnya berbunyi: "Cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri, perlakukanlah kepadanya apa yang kau inginkan untuk diri sendiri." Jika manusia taat pada prinsip ini, maka hidup bersama merupakan *persaudaraan*. Persaudaraan itu harus dijalankan baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang besar dari seluruh bangsa.¹

Sudah barang tentu bahwa pendidikan bukan satu-satunya jalan. Usaha melalui bidang pendidikan harus dibarengi dengan usaha dan kegiatan di bidang-bidang lain yang saling menunjang satu sama lain.

Seperti di muka sudah disinggung tentang kompleksitas permasalahan yang ada dan kita hadapi sekarang yang merupakan warisan sejarah masa lalu. Meskipun kita tentu tidak dapat menyalahkan sejarah, tetapi kenyataan-kenyataan yang ada sekarang di sekitar masalah golongan Cina atau keturunan Cina memang tidak dapat dilepaskan kaitannya dari sejarah masa lalu.

Perbedaan latar belakang kebudayaan antara golongan pribumi dan non-pribumi sejak semula telah menimbulkan semacam garis pemisah di antara keduanya. Ini tidak berarti bahwa dalam perkembangan selanjutnya tidak terjadi perubahan ke arah saling mendekatkan kedua golongan tersebut. Pada sementara orang baik individu maupun kelompok dari kedua golongan terbina hubungan-hubungan yang wajar, bahkan "asimilasi fisik" dalam bentuk perkawinan campuran antara golongan pribumi dan nonpribumi sudah terjadi sejak lama. Timbulnya golongan keturunan tentu sebagai akibat dari perkawinan-perkawinan campuran semacam itu pada masa-masa yang lalu.

Selanjutnya perkawinan antara orang-orang keturunan atau peranakan Cina dengan orang-orang pribumi dan antar keturunan mereka terus-menerus terjadi, sehingga menurut G. William Skinner, sebagai akibat dari perkawinan campuran serta asimilasi yang mendalam, sukarlah untuk memastikan siapa yang tergolong orang Tionghoa berdasarkan kriteria ras belaka. Karena itu menurut Skinner, batasan yang memadai tidaklah berdasarkan pada kriteria ras, hukum ataupun budaya, tetapi pada *identifikasi sosial*. "Di Indonesia seorang keturunan Tionghoa disebut orang Tionghoa, jika ia bertindak sebagai anggota dari dan mengidentifikasikan dirinya dengan masyarakat Tionghoa."²

1 Lihat: Prof. Dr. N. Drijarkara, "Pancasila dan Religi", Prasaran pada Seminar Pancasila, Yogyakarta, 17 Pebruari 1959

2 Mely G. Tan (Ed.): *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*, Leknas-LIPI dan Yayasan Obor Indonesia, PT Gramedia Jakarta, 1979, hal. IX

Dengan demikian kita melihat adanya dua pokok masalah yang perlu ditangani secara sungguh-sungguh dalam rangka usaha pembauran, ialah adanya prasangka di satu pihak dan masalah identifikasi sosial di pihak lain. Keduanya menyangkut sikap dan nilai dari kedua belah pihak.

Sejarah masa lalu memang menampilkan berbagai macam pengaruh pada sikap dan pandangan orang dari masa ke masa. Dan keadaan demikian tampaknya cenderung untuk bertahan terus manakala tidak terjadi sesuatu yang mendorong ke arah perubahan.

Sikap dan nilai seseorang tentu banyak dipengaruhi bahkan sebagian dibentuk oleh lingkungannya. Dalam hal ini sikap dan pandangan dalam masyarakat yang kurang baik dalam hubungan dengan masalah pribumi dan nonpribumi yang lebih bersifat memisah daripada mempersatukan sebagian juga timbul karena suasana lingkungan, baik pada masa lalu, sekarang dan yang akan datang.

Kebijaksanaan politik penguasa kolonial pada masa lalu mengenai orang-orang Tionghoa di Indonesia telah menciptakan suasana lingkungan kehidupan yang memisahkan mereka dari golongan pribumi, yang pada dasarnya secara potensial telah mengandung faktor disintegratif di dalamnya. Kebijakan-sanksi tersebut berupa pengaturan-pengaturan dan perlakuan-perlakuan yang khusus ditujukan atau diberlakukan terhadap golongan Tionghoa dalam beberapa bidang kehidupan.

Di bidang hukum misalnya, terdapat tiga ketentuan hukum yang berlaku, masing-masing bagi golongan Eropa, golongan Timur Asing (Vreemde Oosterlingen) yaitu golongan penduduk nonpribumi bukan Eropa yang kebanyakan terdiri dari orang-orang Cina dan Arab, dan golongan pribumi (Inlanders atau Inheemse). Dari segi kelembagaan pengadilan diadakan perbedaan, yaitu lembaga pengadilan "Raad van Justitie" untuk golongan Eropa dan golongan Timur Asing, khusus dalam perkara-perkara perdata dan dagang, yang kedua adalah lembaga pengadilan yang disebut "Landraad" yang khusus diperuntukkan bagi golongan pribumi dan golongan Timur Asing, khusus dalam perkara-perkara yang bersifat kriminal.

Di lapangan pendidikan, golongan Tionghoa sejak lama memiliki sendiri lembaga-lembaga pendidikan yang bercorak khas Tionghoa, antara lain THHK (Tiong Hoa Hwee Koan) yang memakai bahasa Cina sebagai bahasa pengantarnya. Kemudian sejak permulaan abad ke-20 didirikan pula sekolah-sekolah yang berbahasa pengantar bahasa Belanda khusus bagi golongan Tionghoa, yaitu yang dikenal sebagai HCS (Hollands Chinese School) dan MCS (Middelbare Chinese School).

Kecuali bidang hukum dan bidang pendidikan di atas, terdapat pula bidang-bidang lain yang diatur secara khusus bagi penduduk golongan Tionghoa yang pengaruhnya masih cukup terasa sampai dewasa ini.

Antara lain ketentuan tentang daerah pemukiman khusus bagi penduduk golongan Tionghoa telah mewariskan keadaan yang masih dapat disaksikan sampai hari ini. Di hampir setiap kota masih dapat dijumpai satu wilayah yang dikenal sebagai daerah "pecinan" yang mengingatkan kita bahwa di masa lalu daerah itu merupakan daerah pemukiman khusus orang-orang Cina dengan segala bentuk kebudayaan maupun gaya dan cara hidup yang khas. Para pemuka masyarakat di kalangan mereka mendapatkan kepangkatan seperti dikenal di kalangan militer seperti letnan, kapten dan mayor sehingga kita mengenal istilah-istilah *Luitenant der Chinesen*, *Kapitein der Chinesen* dan *Majoor der Chinesen*.

Seperti di muka sudah disinggung, sementara orang berpendapat bahwa peranan yang besar dari golongan Tionghoa di bidang ekonomi serta perbedaan kekayaan yang menyolok antara golongan pribumi dan nonpribumi merupakan faktor yang dominan yang memisahkan kedua belah pihak. Apabila kita meninjau kembali ke belakang, tampak bahwa kebijaksanaan pemerintah kolonial pada masa lalu memang seolah-olah "menggiring" golongan Tionghoa untuk menempati posisi sebagai orang-orang perantara, tentu berdasarkan perhitungan kepentingan pihak penguasa. Fungsi perantara ini tidak saja di bidang kegiatan ekonomi (perdagangan) tetapi juga dalam memungut cukai dari rakyat. Di lain pihak orang-orang Tionghoa tidak diperkenankan bekerja di lingkungan pemerintahan sebagai pegawai negeri.¹

Kebijaksanaan tersebut menimbulkan pengaruh yang cukup mendalam di dalam masyarakat. Penggunaan tenaga orang-orang Cina sebagai pemungut (atau "pemborong") pajak dari rakyat sering kali menimbulkan praktek-praktek yang di mata rakyat dirasakan sebagai tindakan kasar, keras dan menekan, yang tentu menimbulkan rasa benci dan sikap permusuhan terhadap orang-orang Cina pada umumnya. Sedangkan larangan orang-orang Cina untuk bekerja sebagai pegawai negeri mendorong mereka untuk bekerja di luar sektor pemerintahan. Kebanyakan mereka terjun ke dunia perdagangan atau bekerja sebagai pegawai partikelir pada perusahaan-perusahaan milik orang-orang Belanda dan Eropa lainnya atau orang-orang Tionghoa, terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam kegiatan ekonomi khususnya sektor perdagangan.

Tidak mengherankan apabila makin lama mereka makin trampil di bidang perdagangan, makin ulet dan makin kuat, karena praktis hampir tidak ada pilihan lain. Di situlah tempat mereka mengadu nasib, dan di situlah mereka harus berjuang dan berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Perdagangan seolah-olah sudah menjadi "way of life" mereka yang secara turun-temurun diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Umumnya mereka cukup

1 Bahan-bahan antara lain dari: Hari Poerwanto, *op. cit.*, hal. 53

berhasil sehingga di mata pengusaha pribumi tampak sebagai suatu ancaman, di samping makin lebarnya perbedaan kekayaan di antara kedua golongan.

Ada kemungkinan bahwa pengaturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan khusus seperti dikemukakan di muka dilakukan justru karena pemerintah kolonial pada masa lalu sejak semula telah menyadari adanya prasangka di kalangan masyarakat terhadap orang-orang Cina. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak penguasa demi kepentingannya. Dengan menempatkan mereka dalam posisi sebagai orang-orang perantara atau golongan menengah dalam strata sosial di Indonesia waktu itu pihak penguasa dapat memetik banyak keuntungan. Dalam hal pemungutan cukai dari rakyat misalnya, pihak penguasa dapat "memborongkan" cukai yang harus masuk ke kas pemerintah kepada beberapa orang Cina yang bermodal dan dapat dipercaya. Yang terakhir inilah yang akan langsung berhadapan dengan rakyat untuk menagih atau memungut cukai yang harus dibayar. Dapat dimengerti apabila dalam pelaksanaannya sering kali timbul ekses-ekses, sesuatu yang jelas lebih menambah dan memperdalam prasangka di kalangan orang-orang pribumi terhadap orang-orang Cina. Sementara itu pihak penguasa yang "lebih beruntung", cukai masuk tanpa resiko terkena luapan emosi rakyat karena perasaan dendam dan benci lebih terarah kepada orang-orang Cina yang secara langsung berhadapan dengan mereka.

Oleh karena itu tidak mengherankan apabila seorang sejarawan Inggris seperti dikutip oleh Majalah Tempo, pernah menulis "bahwa orang bumi putera pada umumnya tak membenci orang Belanda benar". Selanjutnya Tempo menulis: Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa nasionalisme kita tidak "rasialis". Tetapi soalnya lain dalam hal menghadapi orang Cinadan seterusnya.¹

Apa yang dapat ditarik sebagai suatu pelajaran dari pengalaman-pengalaman di masa lalu itu ialah antara lain bahwa kebijaksanaan yang tidak tepat dapat mengakibatkan permasalahan menjadi seperti melingkar, semakin kompleks dan semakin sulit pemecahannya. Sekalipun itikad yang melandasi sesuatu kebijaksanaan itu baik, kemungkinan terjadinya salah tindak yang berakibat sebaliknya dari yang diharapkan tetap ada. Apalagi dalam kasus-kasus seperti diuraikan di muka yang motivasinya jelas berdasarkan kepentingan penguasa kolonial pada waktu itu.

Dari uraian sejauh ini kiranya jelas bahwa *perubahan sikap mental* adalah sangat perlu. Sikap mental yang bersumber pada prasangka, pemikiran atau anggapan yang tidak rasional yang telah menimbulkan asumsi-asumsi yang kurang tepat, identifikasi sosial yang salah arah, semuanya itu memerlukan pengarahannya baru, terutama melalui pendidikan dalam arti luas.

¹ Majalah Tempo, No. 8 Tahun X, April 1980, Catatan Pinggir

PEMBAURAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BANGSA

Pada hakikatnya dalam rangka pembangunan nasional pembauran mempunyai peranan yang cukup penting. Dapat dikatakan bahwa berhasilnya usaha pembauran akan memberikan pengaruh yang cukup penting bagi tercapainya pembangunan nasional jangka panjang.

Sebagaimana diketahui, titik sentral dari pembangunan nasional yang kita laksanakan melalui serangkaian Repelita pada hakikatnya adalah manusia, dalam hal ini manusia Indonesia.

Ini berarti bahwa dalam rangka pembangunan nasional unsur manusia dipandang dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga ia tidak hanya diperlakukan sebagai obyek atau sebagai salah satu faktor produksi, tetapi baik dalam kapasitasnya sebagai produsen maupun sebagai konsumen, merupakan tujuan akhir dari semua kegiatan ekonomi.

Hal ini sesuai dengan gejala umum pada jaman kita sekarang ialah bahwa pembangunan yang bertema sentral ekonomi (*econo-mo-centrism*) pada prinsipnya telah ditinggalkan karena orang menyadari bahwa ukuran-ukuran ekonomi saja tidak dapat dijadikan ukuran yang memadai bagi kesejahteraan manusia dan kualitas hidup (*human well-being and quality of life*). Apa yang hendak dicapai dari suatu usaha pembangunan dalam jangka panjangnya dengan demikian tidak hanya tujuan-tujuan yang bersifat ekonomi semata-mata, tetapi hal-hal yang berkenaan dengan kesejahteraan dan peningkatan mutu hidup manusia atau apa yang disebut sebagai tujuan sosial budaya.

Dari "*econo-mo-centrism*" ke "*homino-centrism*", di mana faktor-faktor sosial budaya yang menentukan sekaligus sebagai hasil akhir dari usaha pembangunan.¹

Kita melaksanakan pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah maupun kepuasan batiniah saja, tetapi keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya. Selanjutnya pembangunan itu harus merata di seluruh Tanah Air, bukan hanya untuk sesuatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat. Hasil-hasil pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup, yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan kita.

Pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh Masyarakat Indonesia. Pembangunan bidang ekonomi yang dalam arah pembangunan jangka panjang menjadi titik berat dari usaha pembangunan haruslah dipan-

1 Lihat antara lain: Janusz Ziolkowski: "*Cultural Dimension of Development*", dalam *Cultures*, Vol. VI No. 1, UNESCO, 1979, p. 17-18

dang sebagai cara atau sarana yang perlu dan harus ditempuh demi terciptanya landasan yang kuat bagi Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju tercapainya tujuan utama pembangunan sebagaimana telah dikemukakan. Suatu keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan di akhirat, pendeknya suatu kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras.¹

Masalah pembauran kiranya perlu dilihat dari prinsip keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam rangka usaha pembangunan nasional kita.

Keadaan yang serba selaras itu hanya akan tercipta apabila rangkaian usaha pembangunan nasional yang dilakukan itu tidak saja berhasil meningkatkan kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia secara ekonomis, tetapi sekaligus juga berhasil meniadakan hal-hal dan keadaan-keadaan yang merupakan faktor penghambat terciptanya keselarasan dan keseimbangan itu. Dengan perkataan lain keberhasilan pembangunan ekonomi saja tidak dengan sendirinya menjamin terciptanya kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras sebagaimana dicita-citakan.

Keselarasan dan keserasian kehidupan manusia dan masyarakat sebagai mana digambarkan dalam GBHN atau dengan perkataan lain suatu kehidupan yang sejahtera material dan spiritual berarti juga bahwa kualitas hidup manusia telah berhasil ditingkatkan ke suatu tingkat yang tinggi. Tetapi adalah tidak mudah untuk menentukan ataupun mengukur keadaan itu.

Apa yang disebut "kualitas hidup" itu sendiri memang merupakan suatu istilah atau pengertian yang masih memerlukan pembatasan secara lebih jelas. Kualitas selalu berkenaan dengan masalah penaksiran, persepsi dan penilaian. Salah satu pendapat mengatakan bahwa kualitas hidup pada hakikatnya merupakan masalah politik, atau mungkin juga etis.²

Dalam hubungan ini apabila ia diartikan sebagai kehidupan yang serba selaras dan serasi, jelas tidak semata-mata ditentukan oleh kesejahteraan ekonomi (material) saja. Dalam kehidupan individual betapa pun seseorang telah berhasil mencapai kesejahteraan material belum berarti bahwa ia juga sudah mencapai peningkatan kualitas hidupnya dalam pengertian sejahtera dalam suatu suasana kehidupan yang selaras dan seimbang. Keselarasan dan keseimbangan lebih terletak pada suasana mental-spiritual, suatu suasana di mana orang merasa terbebas dari tekanan-tekanan kehidupan masyarakat di

1 Disarikan dari GBHN

2 Peter Atteslander: "Reflection on the 'Quality of Life' as a Function of Social Structures and Social Change - Sociological Perceptions", dalam *Universitas*, Vol. 22 No. 1, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft M.B.H., Stuttgart, 1980, p. 63

mana ia hidup. Bebas dari ketegangan dan konflik serta memiliki kepercayaan dan rasa aman menghadapi hari esok.

Secara nasional disadari bahwa keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi an sich dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh negatif dalam masyarakat berupa ketegangan-ketegangan dan konflik sosial, misalnya apabila keberhasilan itu hanya dinikmati oleh segolongan anggota masyarakat. Dari segi ini maka usaha pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta cara-cara yang "bersih" dalam penanganan program-program pembangunan merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Aspek keadilan dari suatu usaha pembangunan harus sungguh-sungguh mendapatkan perhatian.

Pengaruh positif dari keberhasilan pembauran dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilihat dalam hubungannya dengan terciptanya kondisi masyarakat yang relatif bebas dari ketegangan maupun konflik sosial yang mengganggu keselarasan dan keserasian hidup. Memang ini bukan satu-satunya sumber ketegangan, tetapi sekurang-kurangnya merupakan salah satu sumber yang harus diatasi apabila tujuan pembangunan jangka panjang yaitu kehidupan yang serba selaras dan serba seimbang itu benar-benar hendak diwujudkan.

Dengan demikian tampak adanya tiga hal yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara tepat dalam usaha pembangunan bangsa, *pertama*, masalah pembangunan ekonomi, *kedua*, masalah usaha menghilangkan sumber-sumber ketegangan sosial, dan *ketiga*, usaha menanamkan kepercayaan dan rasa aman masyarakat terhadap masa depan.

Dari ketiga masalah tersebut pembangunan ekonomi tampak menonjol karena pengaruhnya yang besar terhadap masalah kedua dan ketiga. Oleh karena itu adalah pada tempatnya bahwa titik berat usaha pembangunan diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi sebagai cara dan sarana yang perlu dan harus ditempuh demi tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Yang penting kiranya ialah menjaga agar jalannya pembangunan ekonomi tersebut tetap pada rel yang sudah ditetapkan sehingga tidak sampai berkembang ke arah yang menyimpang. Program pembangunan ekonomi harus dijaga untuk selalu sinkron dengan tujuan utama pembangunan nasional seperti telah dikemukakan di muka. Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan ekonomi perlu dijaga tidak justru menimbulkan ketegangan-ketegangan baru dalam masyarakat, sebaliknya harus secara nyata memberikan dampak positif dalam arti makin mengurangi ketegangan. Asas pemerataan yang telah diprogramkan dalam Repelita III ini melalui delapan jalur pemerataan perlu benar-benar dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat diharapkan akan memberikan hasil-hasil nyata dalam masa-masa mendatang. Dengan perkataan lain pembangunan ekonomi harus makin menonjolkan aspek-aspek sosialnya.

Masalah ketiga juga banyak ditentukan oleh keberhasilan usaha pembangunan ekonomi dan suasana lingkungan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Bahwa memang terdapat kemajuan secara mantap, bahwa kestabilan sosial dan politik memang terjamin secara wajar, artinya suatu kestabilan yang sungguh-sungguh timbul dan terbina karena kondisi obyektif dalam masyarakat dan bukan suatu kestabilan semu.

Jelas bahwa semuanya itu merupakan tantangan yang harus kita hadapi dalam pembangunan bangsa ini.

PENDIDIKAN DALAM PROSES INTEGRASI NASIONAL

Masyarakat kita adalah masyarakat yang beraneka ragam atau yang oleh sementara ahli disebut sebagai masyarakat pluralistik. Ia terdiri dari banyak suku bangsa dengan bermacam ragam adat dan kebudayaannya, namun semuanya itu berada dalam satu kesatuan Bangsa Indonesia. Ditinjau dari segi asal keturunan, kita mengenal adanya golongan masyarakat yang disebut "asli" atau pribumi, dan golongan keturunan asing atau nonpribumi, di mana golongan keturunan Cina merupakan golongan yang dominan, baik dari segi jumlah maupun dari segi peranannya di bidang ekonomi.

Keanekaragaman ini terdapat pula dalam kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun mayoritas penduduk beragama Islam, agama-agama lain juga cukup berkembang dan cukup banyak penganutnya, di samping aliran-aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pula sebagai suatu negara yang demokratis, di masyarakat kita terdapat pula aliran-aliran ideologi politik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Semuanya itu memberi warna dan corak tersendiri dari masyarakat Bangsa Indonesia yang beraneka ragam tetapi satu jua adanya.

Sepantasnya kita bersyukur atas kenyataan-kenyataan ini, karena kenyataan tersebut ditunjang oleh potensi kekayaan alam Tanah Air kita merupakan faktor penting yang telah membuat kita sebagai bangsa yang besar.

Tetapi di samping itu selayaknya kita menyadari pula bahwa keanekaragaman itu secara potensial mengandung pula unsur disintegratif yang dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial bahkan memecah dan menceraiberaikan masyarakat. Kenyataan itulah yang pada masa lalu telah dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial dengan politik "devide et impera" yang terkenal itu.

Sementara orang menyebut faktor-faktor disintegratif tersebut dengan istilah "SARA", singkatan dari Suku, Agama, Ras dan Antar golongan/kekuat-

an sosial, yaitu faktor-faktor yang dengan mudah dapat menimbulkan ketegangan dan kerusuhan sosial karena kepekaan orang pada umumnya terhadap hal-hal yang bersangkutan dengan masalah-masalah tersebut.

Memang kita beruntung bahwa berkat usaha dan perjuangan sejak bangsa Indonesia masih di bawah penjajahan asing, kita telah memiliki landasan ideal dan sarana-sarana pokok yang diperlukan bagi pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa. Kita telah memiliki Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, kita telah memiliki asas Wawasan Nusantara, demikian pula kita telah memiliki bahasa nasional.

Salah satu aspek dari Pancasila ialah bahwa, Pancasila sebagai dasar negara RI adalah suatu konsensus yang harus dipegang dengan teguh untuk mencegah terjadinya perpecahan, ketegangan dan konflik sosial, dan untuk memelihara persatuan dan perdamaian antar golongan.¹

Sedangkan Wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik, satu Kesatuan Sosial dan Budaya, satu Kesatuan Ekonomi, dan satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan. Beberapa hal dalam konsepsi Wawasan Nusantara dapat dikutip, antara lain:

- Bahwa Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu Kesatuan Bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya;
- Bahwa secara psikologis, Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, se-Bangsa dan se-Tanah Air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita Bangsa.

Selanjutnya juga:

- Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan Bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan Bangsa;
- Bahwa Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu; sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan Budaya Bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan Budaya Bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh Bangsa.²

Mengenai masalah aneka warna suku bangsa, seperti dikemukakan oleh Prof. Koentjaraningrat, negara kita ada dalam keadaan satu tingkat lebih maju daripada negara-negara lain yang juga berpenduduk suku bangsa pluralistis

1 Kirdi Dipoyudo: "Pancasila, Arti dan Penerapannya", *Analisa*, Tahun VII, No. 3, Maret 1978, hal. 181

2 Dikutip dari GBHN 1978

seperti India, Birma, Pilipina, bahkan Sri Langka. Ini disebabkan karena kita sudah memiliki bahasa nasional, sehingga kita tinggal mengembangkan suatu kebudayaan nasional, yang sebaliknya prosesnya dapat sangat dibantu oleh keadaan telah adanya suatu bahasa nasional itu.¹

Namun demikian adalah suatu kenyataan bahwa kita masih menghadapi masalah dalam proses integrasi nasional, sekurang-kurangnya dalam pengertian perlunya peningkatan usaha ke arah makin mantapnya proses integrasi nasional tersebut. Usaha-usaha demikian harus dilakukan secara sadar dan terus-menerus mengingat bahwa proses integrasi nasional memang suatu proses yang makan waktu. Dalam hal ini kita tidak hanya berhadapan dengan masalah-masalah yang rasional tetapi banyak juga berkaitan dengan hal-hal yang lebih bersifat psikologis dan emosional.

Kiranya adalah sangat perlu setiap orang secara akal sehat menyadari pentingnya integrasi nasional dan secara emosional merasakan bahwa dalam situasi kehidupan masyarakat yang stabil, yang tidak dirongrong oleh ketegangan, konflik dan perpecahan, masing-masing akan lebih mampu mengembangkan dan meningkatkan mutu hidupnya.

Seperti di muka sudah disinggung, salah satu faktor disintegratif dalam kehidupan masyarakat adalah *ras*. Sebenarnya apa yang disebut masalah pribumi dan nonpribumi tidak perlu ada seandainya orang dapat membebaskan diri dari "sentimen ras" dan satu sama lain dapat saling menerima sebagai sesama.

Tetapi kenyataannya tidaklah selalu demikian. Sejarah kita sejak masih dalam masa penjajahan sampai dewasa ini mencatat beberapa kali peristiwa-peristiwa ketegangan, konflik, bahkan kadang-kadang kekerasan dan kerusuhan sosial, yang apabila diteliti bersumber dari ketidakserasian hubungan antara golongan pribumi dan golongan nonpribumi, khususnya golongan keturunan Cina.

Dari uraian-uraian di muka dapat ditarik kesimpulan adanya dua faktor yang paling menonjol yang dapat dianggap sebagai sumber ketidakserasian hubungan antara kedua golongan, yaitu *prasangka* di satu pihak (Ernst M. Wallner) dan *identifikasi sosial* di pihak lain (G. William Skinner).

Sejalan dengan pikiran ini maka usaha mengatasi masalah pembauran ke arah persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka pembangunan nasional yang bertitik sentral manusia yang sedang kita laksanakan ini haruslah diarahkan pada menghilangkan prasangka dalam masyarakat dan mengarahkan identifikasi sosial secara positif.

Kedua-duanya bersumber dari suatu pandangan atau anggapan yang lebih

1 *Prisma*, No. 8 Tahun V, Agustus 1976, hal. 45

bersifat emosional daripada rasional. Anggapan ini harus diubah, di-"rasionalisasi", antara lain kiranya perlu mendapatkan perhatian, seperti telah disinggung di muka, melalui *pendidikan*.

Pendidikan pada umumnya mencakup segala usaha dan kegiatan untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan dan ketrampilan guna memungkinkan seseorang melakukan fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama dengan sebaik-baiknya.¹

Orang tidak dapat hidup sendirian. Sebaliknya setiap orang hanya dapat hidup sebagai manusia dan mengembangkan dirinya dalam dan bersama dengan sesamanya atau dalam interaksi dengan manusia-manusia lainnya. Dalam hubungan ini maka pendidikan berfungsi membantu orang untuk dapat melakukan fungsi hidupnya dalam kebersamaan dengan sesamanya tersebut, karena interaksi dengan manusia lainnya tidak hanya didasarkan pada naluri, tetapi pada daya pikir ataupun akal sehat (*mind*) dan nilai-nilai tertentu, yang kesemuanya itu terbina dan dikembangkan oleh pendidikan.

Setiap orang membutuhkan hubungan dengan orang lain, butuh mengerti dan dimengerti, memperhatikan dan diperhatikan, pendeknya suatu hubungan timbal-balik yang serasi yang akan membuat dirinya merasakan kepuasan dan rasa bahagia. Dengan cara demikian ia membebaskan dirinya dari rasa kesepian yang menyiksa. Proses ini terjadi karena dalam diri manusia terdapat nilai yang disebut "nilai solidaritas" (*value of solidarity*), salah satu dari nilai-nilai yang ada dalam pergaulan bersama antar manusia (*social values*).

Dalam pada itu, di dalam pergaulan dengan sesamanya manusia sekaligus berusaha untuk mengembangkan dirinya sedemikian rupa sehingga timbul dalam dirinya rasa harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri. Inilah apa yang disebut "nilai kekuasaan" (*value of power*), sebagai dimensi lain dalam hidup kemasyarakatan.²

Di muka sudah dikemukakan, bahwa masalah pembauran pada hakikatnya adalah masalah hubungan antar manusia. Sudah sewajarnya apabila dalam membina dan mengembangkan proses pembauran ini nilai-nilai sosial itu diperkembangkan sehingga setiap orang menjadi lebih peka terhadap nilai-nilai yang harus ada di dalam setiap hubungan antar manusia.

Pengembangan daya intelektual akan membuat orang lebih mudah mengerti akan sesuatu secara rasional, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan akan lebih memungkinkan seseorang untuk mengembangkan dirinya da-

1 Bandingkan dengan: Prof. Soegarda Poerbakawatja: *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*, Gunung Agung, Jakarta, 1970, hal. 11

2 Lihat antara lain: S. Takdir Alisjahbana, *Values as Integrating Forces in Personality, Society and Culture*, University of Malaya, Kuala Lumpur, 1966, hal. 73-74

lam hidup kemasyarakatannya, dan pengembangan nilai-nilai akan membuat orang lebih bersikap positif terhadap orang-orang lain di sekitarnya dalam kehidupan kemasyarakatan, sikap toleran, saling mengerti dan selalu memperlakukan orang lain sebagai sesama. Yang terakhir ini lebih-lebih harus selalu tercermin dalam setiap sikap, langkah dan perbuatan setiap orang yang mengaku dan merasa dirinya sebagai orang atau warga negara Indonesia, sebagai konsekuensi dari sila kedua dari Pancasila. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab menunjuk pada sikap yang selalu memperlakukan orang lain sebagai sesama, sebagai manusia seutuhnya dengan segala hak dan martabatnya.

Semuanya itu merupakan "target" pendidikan dalam rangka proses integrasi nasional, khususnya dalam hubungannya dengan masalah pembauran yang menjadi fokus dalam tulisan ini. Selanjutnya pendidikan itu dalam tulisan ini diartikan secara luas, meliputi tidak saja pendidikan formal, yaitu pendidikan yang dilakukan di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya, tetapi juga pendidikan dalam lingkungan keluarga dan dalam masyarakat, yang terakhir ini khususnya pendidikan dalam arti pengembangan nilai-nilai sosial sebagaimana sudah dikemukakan di muka.

Dan dalam rangka pemikiran untuk lebih memperlancar proses pembauran, secara eksplisit ingin diketengahkan bahwa usaha dan kegiatan pendidikan dalam arti luas tersebut diarahkan kepada dihilangkannya prasangka sebagai faktor penghambat keserasian hubungan seperti di muka telah diuraikan. Sedangkan pengarahannya identifikasi sosial secara positif dimaksudkan agar mereka yang termasuk dalam golongan nonpribumi benar-benar mengidentifikasi dirinya sebagai orang Indonesia. Identifikasi diri ini terutama harus tampak dalam sikap, tindakan dan perbuatan nyata dalam pergaulan hidup sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun di lingkungan pergaulan hidup kemasyarakatan yang lebih luas.

Apa yang ingin kita wujudkan melalui proses pembauran kiranya bukan sekedar suatu "koeksistensi damai" antara golongan pribumi dan nonpribumi, tetapi lebih daripada itu, benar-benar suatu integrasi dalam satu kesatuan bangsa, Bangsa Indonesia.

Satu hal perlu dicatat bahwa salah satu unsur dalam pendidikan yang akan sangat menentukan keberhasilannya adalah faktor "pendidik". Di lingkungan pendidikan di sekolah, guru memegang peranan penting dalam menciptakan situasi edukasi yang sehat, di lingkungan keluarga adalah para orang tua dan orang-orang lain yang di dalam sistem kekerabatan yang berlaku merupakan orang-orang yang berpengaruh, sedangkan di lingkungan masyarakat dan pemerintah, para pemuka masyarakat dan para pejabat dari semua tingkat berfungsi sebagai "pendidik". Dari merekalah pada tempat pertama, diharapkan peranan yang positif, terutama melalui pemberian contoh dan suri

tauladan secara nyata serta kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tepat dan bernilai edukatif.

Keberhasilan kita dalam proses pembauran dalam rangka integrasi nasional mempunyai arti besar dalam mencapai tujuan utama pembangunan nasional, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Pembangunan bidang ekonomi adalah sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum. Tetapi ini harus dibarengi dengan usaha penciptaan kondisi sosial yang sehat, yang memungkinkan setiap orang menikmati kehidupan individual dan sosial yang selaras dan seimbang. Dalam arti demikian usaha pembangunan nasional kita berhasil meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia Indonesia.

BEBERAPA CATATAN PENUTUP

Pendidikan dalam proses integrasi nasional merupakan masalah yang umum dihadapi oleh "negara-negara baru" sesudah Perang Dunia kedua, di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Masalah pokoknya ialah bagaimana melaksanakan "nation building" setelah kemerdekaan politik diperoleh, membangun bangsa dan masyarakat dari tata kehidupan yang tradisional ke arah tata kehidupan masyarakat yang modern, yang lebih rasional. Bagaimana mempersatukan suku-suku bangsa dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang pada umumnya tradisional itu ke dalam satu kesatuan bangsa dalam suatu negara bangsa yang modern, yang memiliki satu cita-cita dan tujuan nasional serta memiliki kesadaran akan tanggung jawab bersama terhadap cita-cita dan tujuan nasional itu, adalah suatu masalah besar yang dihadapi dan harus dipecahkan. Hal ini berkenaan dengan proses politik yang ditempuh serta sistem pendidikan nasional yang dipilih oleh masing-masing bangsa atau negara, sesuai dengan ideologi dan pandangan hidup masing-masing.

Seperti telah disinggung di muka, kita beruntung telah memiliki landasan dan sarana yang diperlukan dalam proses integrasi nasional. Bahkan dasar-dasar ke arah "nation building" telah lama diletakkan, jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, antara lain dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Namun demikian dalam implementasinya tampak masih adanya beberapa kelemahan yang perlu mendapatkan perhatian.

Dalam proses kehidupan politik sering kali dijumpai praktek-praktek yang justru bertentangan dengan ide persatuan dan kesatuan bangsa karena kepentingan politik golongan sering kali ditempatkan secara tidak proporsional, yaitu di atas kepentingan bangsa. Demi kepentingan politik golongan kadang-

kadang faktor-faktor disintegratif seperti telah disinggung di muka "dieks-ploitasi" sedemikian rupa, sehingga apa yang terjadi bukannya makin kukuh-nya persatuan, tetapi sebaliknya.

Sudah barang tentu bahwa hal semacam itu harus dicegah. Proses kehi-dupan politik harus sejajar dengan dan menunjang proses "nation building". Kehidupan politik seharusnya juga selalu bernapaskan pendidikan. Ia harus makin mendewasakan bangsa, mampu menciptakan kondisi sosial politik yang sehat menuju tercapainya tujuan pembangunan bangsa.

Dari segi lain perlu dicatat, bahwa peranan pemerintah adalah begitu besar dan sangat menentukan. Seyogyanya apabila setiap keputusan yang diambil selalu didasarkan atas dan mencerminkan kemauan politik yang sehat, yang selalu makin mendekatkan pada tercapainya cita-cita dan tujuan nasional.

Sejauh menyangkut sistem pendidikan nasional, umumnya sudah disadari sejak semula bahwa sistem pendidikan kolonial tidak lagi sesuai dan harus segera diganti dengan sistem pendidikan nasional. Peranan kunci bidang pen-didikan terhadap nation building merupakan kesadaran umum dari semua negara berkembang. Umumnya mereka mengkritik sistem pendidikan kolonial karena isi pendidikan yang tidak realistis dan ruang lingkupnya yang terbatas, yang tidak memadai bagi kebutuhan pembangunan ekonomi dan perombakan sosial.¹

Namun sejauh ini tampak bahwa kita masih belum sepenuhnya berhasil dalam menangani bidang ini, baik dari segi konsepsional maupun dari segi pelaksanaannya.

Dari segi konsepsional kita masih dalam taraf memproses suatu pemba-ruan sistem pendidikan nasional, yang sekaligus diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah umum yang masih kita hadapi di bidang pen-didikan, yaitu masalah kuantitatif dan kualitatif, masalah relevansi, efisiensi dan efektivitas.²

Kemajuan-kemajuan tertentu baik dari segi konsepsional maupun dari segi pelaksanaan pendidikan bukannya tidak ada, tetapi apa yang telah dicapai itu masih belum memadai dan masih harus ditingkatkan. Proses demokratisasi dunia pendidikan sudah berjalan sejak kita memperoleh kemerdekaan kempa-li, jumlah murid dan mahasiswa menjadi berlipat ganda selama lebih dari 30 tahun merdeka, juga jumlah dan jenis lembaga-lembaga pendidikan sudah jauh berkembang. Namun tanpa adanya sistem pendidikan nasional yang terencana baik kita akan tetap ketinggalan. Secara kualitatif kita tidak akan

1 Lihat antara lain: Paul E. Sigmund (Ed.), *The Ideologies of the Developing Nations*, Frederick A. Praeger, 1967, p. 9

2 Lihat: *Laporan Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional*, Departemen Pendidikan dan Ke-budayaan, Jakarta, 1980, hal. 13

cukup mampu mengejar ketinggalan kemajuan-kemajuan di bidang ilmu dan teknologi, secara kuantitatif kita akan sulit menampung permintaan yang terus meningkat akan kesempatan memperoleh pendidikan sebagai akibat pertambahan penduduk dan makin meningkatnya kesadaran rakyat akan pentingnya pendidikan.

Dalam hubungannya dengan proses pembauran dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa melalui pendidikan formal kiranya perlu ditekankan perlunya menciptakan "situasi pedagogis" dalam seluruh sistem persekolahan kita, mulai dari sekolah dasar sampai pendidikan tinggi. Baik dalam rangka kegiatan intra-kurikuler maupun ekstra-kurikuler sekolah dengan seluruh lingkungannya harus dapat mendorong generasi muda kita untuk selalu peka terhadap hal-hal yang bersangkutan dengan kesatuan dan persatuan bangsa.

Untuk mencapai situasi yang demikian tentu diperlukan beberapa sarana dan prasarana yang memadai, baik yang fisik maupun yang nonfisik, baik berupa "hardware" maupun "software".

Di muka sudah disinggung secara umum pentingnya peranan "pendidik" dalam proses pendidikan. Dalam kerangka pemikiran ini tentulah secara implisit terdapat tuntutan terhadap para pengelola lembaga-lembaga pendidikan, para guru dan para dosen untuk menjalankan peranan yang aktif dan positif di lingkungan dan bidang masing-masing. Usaha untuk mengeliminasi prasangka di satu pihak dan mengarahkan identifikasi sosial di pihak lain dalam rangka memperlancar proses pembauran melalui proses pendidikan tidak hanya dapat dilakukan melalui bidang-bidang studi yang termasuk dalam kelompok IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), seperti lazimnya pendapat orang, tetapi pada hakikatnya secara langsung maupun tidak dapat pula dilakukan melalui bidang-bidang studi yang lain, bahkan melalui "situasi pedagogis" secara keseluruhan.

Dari segi pengelolaan kiranya perlu disinggung juga masalah kebijaksanaan penerimaan murid/mahasiswa atau kebijaksanaan enrolment. Prinsip tiadanya diskriminasi karena alasan apapun dalam hal ini perlu dikembangkan sebaik-baiknya, pada tempat pertama lebih-lebih pada sekolah-sekolah negeri.

Dalam hubungan ini dalam Laporan Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional (KPPN) terdapat perumusan sebagai berikut: "Dalam penerimaan murid, tidak ada diskriminasi baik atas dasar kesukuan, agama, asal-usul daerah, derajat dan kekayaan maupun atas dasar jenis kelamin. Untuk menja- ga agar prinsip ini dapat dilaksanakan, harus disediakan tempat secukupnya guna memenuhi permintaan enrolment serta diusahakan pemerataan kualitas pendidikan."¹

1 *Laporan KPPN*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1980, *Ibid.*, hal. 58

Tidak adanya diskriminasi atas dasar kesukuan tersebut kiranya perlu diartikan secara luas, termasuk pengertian tidak adanya diskriminasi atas dasar *ras*.¹

Ditinjau dari segi masalah pembauran hal ini penting, karena dalam rangka penerimaan murid/mahasiswa baru setiap tahun praktek diskriminasi atas dasar ras itu justru yang lebih menonjol, meskipun hal itu tidak pernah dipersoalkan secara terbuka.

Pemerintah tentu berwenang menentukan sesuatu kebijaksanaan mengenai masalah itu apabila melihat adanya alasan untuk itu, namun yang kiranya perlu mendapatkan perhatian ialah bahwa kebijaksanaan itu tidak sampai merugikan proses pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Kebijaksanaan itu seyogyanya dilakukan secara "terbuka", sehingga masyarakat dapat mengerti dan menerima bahwa kebijaksanaan dimaksud memang perlu dilakukan karena sesuatu pertimbangan yang obyektif dan rasional.

Tindakan pemerintah menutup semua sekolah Cina pada tahun 1967 berdasarkan Keputusan Sidang Presidium Kabinet tanggal 18 Mei 1966 yang kemudian dikukuhkan dengan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 37/U/IN/6/1967, adalah sangat tepat. Keadaan yang merupakan warisan kebijaksanaan politik kolonial pada masa lalu itu jelas tidak dapat dipertahankan karena pengaruhnya yang merugikan ditinjau dari segi integrasi nasional. Namun apabila tindakan tersebut tidak segera diikuti oleh langkah dan kebijaksanaan yang tepat dan memadai pada gilirannya juga akan menimbulkan permasalahan dengan pengaruh-pengaruhnya yang negatif.

Sebagai penutup ingin diketengahkan sekali lagi bahwa proses pembauran yang dalam rangka pembangunan nasional mempunyai arti strategis seperti telah diuraikan, harus digerakkan dari dua jurusan. Di satu pihak diarahkan kepada menghilangkan prasangka dari masyarakat, di lain pihak mengarahkan identifikasi sosial secara positif, menimbulkan dan memupuk kesamaan nilai, sikap hidup dan peri laku sehingga tercipta persatuan dan kesatuan bangsa, senasib seperjuangan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad bersama mencapai cita-cita bangsa.

1 Bandingkan dengan Draft Laporan terakhir KPPN, Dokumen D3.38, Kebijaksanaan Umum Enrolment. Kesukuan ditulis *ras*

BELAJAR DARI KEPELOPORAN PEMUDA 1928

Rufinus LAHUR

"Hanya bangsa yang dapat memetik pelajaran dari masa yang silam dan cakap mempergunakan pengalaman-pengalamannya dalam menghadapi masa depan, dapatlah bangsa itu menjadi bangsa yang besar." (SOEKARNO)

"Terpecahbelahnya generasi muda tidak saja merugikan generasi muda sendiri melainkan juga merugikan bangsa dan memudarkan harapan masa depan kita." (SOEHARTO)

PENGANTAR

Pada awal kelahiran Orde Baru tahun 1966, Mohammad Hatta mengajukan suatu pertanyaan apa sebab pemuda mahasiswa sewaktu-waktu melakukan peranan yang begitu penting dalam perkembangan politik dan haluan negara? Apa sebab pemuda sering-sering mendahului orang-orang tua yang sudah matang dalam politik? Kemudian beliau sendiri mengemukakan bahwa pertanyaan itu tidak sukar menjawabnya. Pertama, pemuda masih murni jiwanya dan ingin melihat pelaksanaan secara jujur apa-apa yang telah dijanjikan kepada rakyat. Pandangan politiknya terbatas kepada cara melaksanakan tujuan itu, yang dasar-dasarnya sudah tertanam dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, mahasiswa pada universitas dididik berpikir secara ilmiah. Dan ilmu tujuannya mencari kebenaran. Membela kebenaran menjadi tugas utama bagi orang yang menuntut ilmu. Pikiran yang diasah semacam itu bersikap kritis terhadap realitas dan perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran. Apabila negara kita menurut Undang-Undang Dasar 1945 berdasar kepada demokrasi, pikirannya yang kritis menolak tindakan pemerintah yang bertentangan dengan demokrasi.¹

Pertanyaan di atas ini rupanya juga dirangsang oleh adanya peranan pemuda dan mahasiswa tahun-tahun 1966. Dalam memperingati 50 tahun

1 Mohammad Hatta, *Peranan Pemuda Menuju Indonesia Merdeka Indonesia Adil dan Makmur*, Penerbit "Angkasa" Bandung, 1966, halaman 12; pemikiran dari Mohammad Hatta ini banyak persamaannya dengan apa yang pernah diajukannya 50 tahun yang lalu dalam pidato pembelaan di depan Pengadilan Den Haag tanggal 9 Maret 1928, yaitu antara lain apa sebabnya pemuda-pemuda, mahasiswa Indonesia, secara aktif ikut berpolitik; pidato ini kemudian diterbitkan dengan judul *Indonesia Merdeka*.

peranan pemuda tahun 1928 pertanyaan yang serupa juga secara tersirat dan tersurat diajukan oleh pelbagai pihak kepada pemuda tahun 1928 itu. Salah satu daripadanya dan yang mirip dengan pertanyaan Mohammad Hatta di atas ialah dari Harian Umum *Sinar Harapan* pada tanggal 16 Oktober 1978, yang menurunkan tajuk dengan judul "Rahasia Peranan Kepeloporan". Dikatakan bahwa "Peranan historis angkatan muda pada waktu itu ialah bahwa mereka lebih dahulu dan lebih jelas memahami tantangan Selanjutnya bahwa mereka memberikan jawab yang tegas terhadap tantangan itu, juga lebih dahulu daripada bangsa sebagai keseluruhan". Jadi "Semangat dan jiwa yang memahami dan menjawab secara tegas tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa dengan melihat jauh ke depan" inilah yang dikatakan sebagai letak "rahasia peranan kepeloporan" tersebut.

Dari dua cukilan tersebut di atas mungkin sudah kelihatan apa yang menjadi inti kepeloporan pemuda pada umumnya dan pemuda tahun 1928 pada khususnya. Juga dengan demikian lebih jelas apa yang bakal diambil sebagai pelajaran.

Dalam melihat peranan kepeloporan seperti halnya kepeloporan pemuda tahun 1928 dapat dikemukakan dua faktor utama yang universal. Yaitu pada satu pihak terdapat "masalah masyarakat", sedangkan pada pihak yang lain "masyarakat" sebagai subyek termasuk unsur pemudanya. Sejauh mana unsur pemuda menyadari masalah yang dihadapinya tergantung pada banyak faktor, tetapi yang pasti kadar jawaban yang bakal diberikan sangat tergantung pada kadar pengertian terhadap masalahnya. Ketepatan "tanya-jawab" inilah yang menentukan perkembangan masalah selanjutnya.

Bobot peranan pemuda umumnya juga dipengaruhi oleh dua kondisi; pertama, kondisi makro yang memberikan ruang gerak maksimal untuk berfungsi, dan kedua, kondisi mikro yaitu kondisi para pemuda itu sebagai keseluruhan. Pada jaman penjajahan kedua kondisi itu dialami sebagai berpengaruh negatif. Namun para pemudanya dapat menerobos kekangan ini dengan semangat berdikari, tanpa harus menyerah kalah terhadap suratan nasib yang pada waktu itu sangat ditentukan oleh suasana makro dari sistem penjajahan.

Sesudah 35 tahun merdeka masalah masyarakat telah berubah, begitu juga masyarakat termasuk unsur pemudanya. Dialog antara masalah masyarakat dan pemuda juga dipengaruhi oleh kedua kondisi tersebut di atas, yaitu kondisi mikro (pemuda) dan kondisi makro. Apakah pemuda dapat menghilangkan pengaruh negatif dari kedua kondisi itu dan mengembangkan segiseginya yang positif akan turut menentukan kondisi peranannya sekarang dan pada masa yang akan datang.

Dengan semangat seperti yang diuraikan di muka maka penulis ingin meninjau apa yang menjadi judul di atas, yaitu Belajar dari Kepeloporan

Pemuda 1928. Dengan Pemuda 1928 dimaksudkan ketekadan semangat pemuda waktu itu seperti yang tercermin dalam hasil kerapatan pemuda yang kemudian lebih dikenal sebagai Sumpah Pemuda.¹ Dalam tulisan ini, berturut-turut akan ditinjau mengapa Sumpah Pemuda itu menarik perhatian, apa yang dapat ditarik untuk dijadikan pelajaran, bagaimana kondisi persatuan dalam mengisi kemerdekaan sekarang ini, berikut semacam himbauan untuk mencari komponis sistem pembangunan masyarakat Pancasila, kemudian ditambah dengan uraian terakhir sebagai penutup.

MENGAPA SUMPAH PEMUDA MENARIK PERHATIAN

Selama ini telah dilaksanakan sembilan kali Kongres Pemuda Indonesia, enam diantaranya dilaksanakan sesudah kita merdeka. Yaitu antara lain kongres yang ketujuh berlangsung di Surabaya pada bulan Juni 1950, yang kedelapan di Bandung pada tahun 1960 dan 18 tahun kemudian yaitu pada tahun 1978 diadakan kongres lagi kalau dilihat sebagai kelanjutan dari kongres yang sebelumnya merupakan kongres yang kesembilan.² Atau kongres yang keenam sesudah kita merdeka. Akan tetapi penamaan kongres yang sekarang ini agak lain, yaitu "Kongres Pemuda/KNPI-II".

Apa arti penamaan ini terhadap kontinuitas sejarah kongres pemuda Indonesia keseluruhannya tidak begitu jelas dan tidak menjadi sasaran dari tulisan ini. Tetapi yang tidak dapat diragukan lagi ialah bahwa dari semua kongres pemuda yang pernah diadakan itu hanya satu yang sangat menarik perhatian seluruh bangsa yaitu kongres yang kedua pada bulan Oktober 1928 di Jakarta. Sedangkan kongres-kongres lainnya tidak begitu menarik perhatian seluruh bangsa bahkan kurang diperhatikan oleh pemuda sendiri apa sebenarnya yang telah menjadi keputusan kongres-kongres yang bersangkutan; kesan mana sangat merugikan image (gambaran diri) organisasi pemuda dalam masyarakat. Dalam hubungan ini tepat sekali konstataasi Presiden Soeharto bahwa "Bangsa kita akan mengalami kemunduran dan kehilangan

1 Mengenai peristiwa Kongres Pemuda Indonesia ke-2 ini dapat dibaca secara sepintas lalu dalam berbagai buku sejarah pergerakan bangsa Indonesia, antara lain Pringgodigdo A.K., *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Pustaka Rakyat N.V., Jakarta, 1950; Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia V*; Margono, *Ikhtisar Sejarah Pergerakan Nasional 1908-1945*; begitu juga buku *Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia* yang diterbitkan oleh Biro Pemuda Departemen P dan K, 1963; dan *Risalah Gerakan Pemuda* yang disusun oleh Sardjito; uraian yang agak banyak juga dapat dibaca dalam buku "45 Tahun Sumpah Pemuda" dan dalam buku *Bunga Rampai Sumpah Pemuda 50 Tahun*; akan tetapi uraian yang dapat dianggap agak menyeluruh dapat dilihat pada skripsi Suwarno yang berjudul *Kongres Pemuda Indonesia ke-2 menghasilkan "Sumpah Pemuda"*, 1972 (39 hal.)

2 Lihat *Ensiklopedi Umum*, Penerbit Yayasan Kanisius, 1973, hal. 690-694

elan dinamis apabila generasi muda hanya menjadi "pengekor" dan bukan "pelopor".¹

"Kerapatan pemuda-pemuda Indonesia" tahun 1928 ini mengambil putusan yang kemudian lebih dikenal sebagai SUMPAH PEMUDA, sedangkan tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda oleh seluruh bangsa, seperti halnya pada tahun 1978 dengan melakukan macam-macam kegiatan seperti Kongres Bahasa Indonesia yang ke-3, Munas Pramuka, dan lain-lain kegiatan yang bertema kepemudaan seperti lokakarya, dialog, seminar, Kongres Pemuda/KNPI-II, berikut pelbagai ulasan dan kenangan melalui pelbagai mass media. Pendeknya tampak sekali bahwa hasil kongres pemuda Indonesia yang ke-2 itu semakin menarik perhatian seluruh masyarakat.² Sejarahwan Arnold Toynbee dalam bukunya *A Study of History* (halaman 900) mengemukakan bahwa "the curiosity can be stimulated only when the process of social change is vividly and violently apparent".

Adanya perubahan sosial yang mendasar, misalnya di daratan Tiongkok pada abad ke-20 ini di bawah kepemimpinan Ketua Mao, mendorong keinginan dari banyak pihak, tidak saja dari kawan-kawannya akan tetapi juga dari lawannya.

Untuk meminjam istilah sejarahwan di atas, "perubahan sosial" apakah sebenarnya yang diciptakan oleh Sumpah Pemuda, sehingga mengundang keingintahuan orang kepadanya? Penulis melihat paling tidak secara positif ada dua hal. Pertama, melihat *isi* dari putusan kerapatan pemuda waktu itu yang menunjukkan adanya *mutasi nilai* dari masyarakat Indonesia seluruhnya, yaitu dari berorientasi pada *tanah air sempit* yaitu Sumatera, Jawa, Selebes, Ambon, dan sebagainya, *berubah menjadi* lebih luas yaitu *tanah air Indonesia*,³ begitupun dari *kebangsaan sempit* seperti Jawa, Selebes, Ambon, Sumatera, dan sebagainya menjadi *kebangsaan yang lebih luas* yaitu *satu bangsa Indonesia*. Sedangkan di bidang kebahasaan, menjunjung tinggi

-
- 1 Sambutan Presiden pada Upacara Pembukaan Lokakarya Nasional Pembinaan Generasi Muda pada tanggal 4 Oktober 1978 di Jakarta, Sekretariat Negara Republik Indonesia, hal. 3
 - 2 Lihat antara lain dalam Majalah *Tempo*, "Pemuda Dalam Tiga Kotak?" Nomor 33 Tahun VIII, 14 Oktober 1978; Majalah *Topik*, "KNPI dalam Ujian", Nomor 20-21, Oktober 1978; Majalah populer, *Dialog*, "Generasi Muda Kita Bersumpah Untuk Bersatu", Nomor 11, 20 Oktober - 4 Nopember 1978; Majalah *Pustaka*, "Indonesia yang kita Inginkan", Nomor 7 Tahun II; Majalah *Matahari*, Nomor 10, Tahun I, 16-31 Oktober 1978
 - 3 Ajip Rosidi mengungkapkan adanya "perubahan kaki langit kesadaran", seperti yang dilihatnya pada diri Moh. Yamin yang dalam memperingati Jong Sumatera Bond tahun 1921 menerbitkan sebuah buku kumpulan sajak yang berjudul *Tanah Air* yang dimaksud Andalas (Sumatera); kemudian pada tahun 1928 Moh. Yamin menerbitkan sebuah buku kumpulan sajak baru yang berjudul *Indonesia Tumpah Darahku* (Ajip Rosidi, Sumpah Pemuda yang Berubah, dalam buku *Bunga Rampai Sumpah Pemuda* tersebut di atas)

bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kedua, secara *nasional* disaksikan dan dialami sentuhan pengaruh (impact) dari putusan itu yang sangat mengarahkan dan menentukan perjuangan selanjutnya, termasuk proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 yang dicetuskan oleh Soekarno-Hatta *atas nama bangsa Indonesia*¹ yang satu itu. Jadi dewi sejarah telah membuktikan kebenaran dan ketepatan putusan kerapatan pemuda Indonesia ini yang bahkan diberlakukan selanjutnya sebagai *sumpah* dari *pemuda Indonesia*, yang dilaksanakan secara konsisten. Pendeknya sangat dirasakan kesatuan antara *kata* (Sumpah) dan *perbuatan*. Hal yang terakhir inilah yang sangat didambakan oleh para pemuda selanjutnya yang sangat gandrung kepada *kejujuran* dari *siapa saja* yang berbicara tentang hal yang *muluk-muluk*. Mereka ini menuntut bukti, dan inilah yang mereka tidak temukan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sejak kita merdeka demikian banyak dengungan sumpah dalam masyarakat, baik dari ruang pengadilan maupun di luarnya, seperti sumpah pegawai negeri, sumpah prajurit, sumpah anggota DPR, sumpah anggota MPR, dan lain-lain sumpah jabatan dan sumpah profesi.² Isi dari sumpah umumnya menjanjikan yang muluk-muluk dan luhur, seperti janji untuk melakukan tugas kewajiban sebaik-baiknya, mendahulukan kepentingan umum (bangsa) dan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan lain-lain peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi nyatanya pengaruh dari sumpah itu tidak terasa, tidak tampak dalam perbuatan sehari-hari. Bukan saja masyarakat umum yang tidak lagi seberapa menghiraukan isi dari sumpah-sumpah itu akan tetapi juga "ahli hukum maupun pihak ahli-ahli agama",³ dan bahkan mungkin juga pejabat yang bersumpah tidak mengetahuinya dan menyadari arti dan konsekuensinya.

Jadi orang memandang sumpah sebagai suatu upacara administrasi yang hampa, sekedar memenuhi persyaratan formal administrasi belaka. Sehingga bagi masyarakat umum, ada atau tidak ada sumpah sama saja. Mungkin kurang bermaknanya aneka sumpah yang ada selama ini turut mengakibatkan semakin menonjolnya SUMPAH PEMUDA tahun 1928 itu. Peringatan sumpah pemuda akhir-akhir ini dapat juga dianggap sebagai cermin kerinduan masyarakat sekarang ini kepada kejujuran semangat sumpah yaitu satunya kata dengan perbuatan. Dan mudah-mudahan dengan macam-macam peringatan sumpah pemuda sekarang ini, sumpah tahun 1928 itu dapat memberi semangat baru terhadap sumpah-sumpah lainnya sehingga lebih bermakna bagi masyarakat dan karenanya membawa perubahan yang memajukan masyarakat seluruhnya, sekaligus memulihkan dan mengembalikan makna yang

1 *Berita Republik Indonesia*, Tahun II No. 7, hal. 45, kolom 1

2 Bandingkan misalnya isi sumpah seperti yang tertuang dalam pasal 9 UUD 1945 serta 'Sumpah Prajurit', dalam buku *Dharma Pusaka* 45, Departemen Pertahanan Keamanan, 1972, hal. 16

3 Lihat St. Moh. Syah, "Kesimpangsiuran pada Penyumpahan", *Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Departemen Kehakiman, No. 1, 1978, hal. 6

terkandung dalam istilah sumpah yang tidak saja politis dan yuridis akan tetapi juga terutama ethis.

PELAJARAN APA YANG DAPAT DITARIK DARI SUMPAH PEMUDA?

Kongres ke-2 sebagai peristiwa sejarah yang telah terjadi 52 tahun lalu itu tidak mungkin berulang kembali sebagai halnya "siaran ulang" di TVRI. Bukan saja karena alamnya lain, yaitu dahulu alam penjajahan dan sekarang alam kemerdekaan, begitupun dimensi masalah berbeda serta pelaku-pelakunya berbeda juga termasuk latar belakang dan tingkat kedewasaan mereka, akan tetapi memang telah menjadi hukum masyarakat bahwa tidak mungkin ada dua peristiwa yang tepat sama. Walaupun begitu ungkapan di atas ini juga tidak berarti bahwa masa sekarang sama sekali tidak ada hubungan dengan masa lampau, yaitu satu sama lain terlepas dan terpisah. Akan tetapi sejarah masyarakat merupakan suatu kebulatan yang berlanjut yang satu sama lain saling berhubungan.¹ Malah masalah masa kini berakar pada masa silam dan karena itu seharusnya orang pada masa kini mempelajari masa lampau, mencari inspirasi untuk dapat lebih baik mempelajari duduk masalah yang dihadapi hari ini dan masa yang akan datang sehingga dapat mengetahuinya lebih tepat untuk selanjutnya ditanggapi secara tepat pula.² Semangat yang baru disebut inilah antara lain yang dapat dilihat juga dari suasana peringatan 50 tahun sumpah pemuda itu, baik melalui saksi-saksi yang masih hidup maupun para pengamat sejarah yang dengan caranya masing-masing menurunkan uraian baik mengenai peristiwanya, aneka kenangan, tafsiran serta harapan yang ditujukan kepada pemuda Indonesia pada umumnya.

Setiap peristiwa mengandung nilai yang tersurat dan terlebih-lebih yang tersirat; sejauh mana nilai itu dapat dilihat dan dimengerti serta dijadikan pedoman oleh suatu masyarakat sangat tergantung pada tingkat kedewasaan manusia dalam masyarakat yang bersangkutan; jadi setiap peristiwa apapun setiap kali akan mendapat makna baru dalam sejarah dan dalam lingkungan hidup manusia selanjutnya.³ Ada banyak hal dari sumpah pemuda itu yang

1 H. Roeslan Abdulgani, "Api Ilmu Sejarah dan Obor Revolusi", *Di hadapan Tunas-tunas Bangsa*, BP. Prapanca, Jakarta, t.th., hal. 286

2 Lihat R. Moh. Ali, *Sejarah dalam Revolusi dan Revolusi dalam Sejarah*, Bhartara, Jakarta, 1965; lihat juga antara lain pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1964 yang berjudul *Tahun Vivere Pericoloso* (Tavip); juga *Indonesia Ayam Jantan Sejarah Dunia Baru!*, Universitas Pajajaran, Prapanca, Jakarta, 1964

3 Sutjipto Wirjosuparto, *Duapuluh Tahun Ilmu Sejarah di Indonesia 1945-1965*, IV, Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Departemen Urusan Riset Nasional Republik Indonesia, 1965 hal. 279-303

dapat ditarik untuk dijadikan pelajaran. Beberapa daripadanya penulis kemukakan di bawah ini. Pertama, bahwa masyarakat umumnya pada waktu itu mampu menangkap semangat jamannya, yaitu tekad untuk bersatu melawan penjajah. Kedua, atas dasar persepsi yang tepat mengenai realita masyarakat ini dikembangkan sikap dan tindakan yang tepat pula, sekaligus kesediaan untuk mengsubordinasi kepentingan golongan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Misalnya ketika membicarakan soal dasar pendidikan dalam kongres pemuda 1928 itu semua pembicara menekankan perlunya dasar rasa cinta kepada tanah air dan dasar kebangsaan. Karenanya ketika S.M. Kartosuwirjo mengajukan agar dasar pendidikan bagi anak Indonesia adalah agama Islam, pembicaraannya distop oleh pimpinan sidang (Sugondo) oleh karena dianggap "bertentangan dengan persatuan kebangsaan".¹ Begitu juga mengenai penerimaan bahasa persatuan bahasa Indonesia merupakan pencerminan dari semangat yang sama dari semua suku yang mempunyai bahasa daerahnya masing-masing terutama yang jumlah pemakainya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan pemakai bahasa Melayu waktu itu. Ketiga, kedua hal tersebut di atas ini pemahamannya sangat dipertajam oleh tingkat intelektual dan kesadaran politik serta visi dari para pemimpin masyarakat pada umumnya termasuk yang berada di luar negeri, berikut adanya komunikasi yang relatif lancar baik antara yang tua dan muda maupun antara sesama organisasi pemuda itu sendiri. Komunikasi itu tidak saja didorong oleh adanya kesamaan nasib, akan tetapi hasil komunikasi itu juga turut memperkukuh solidaritas dan kesatuan serta persatuan antara mereka selanjutnya.

Dapat dikatakan bahwa tema yang menjadi putusan kerapatan pemuda tahun 1928 itu bukanlah suatu kegiatan yang terlepas dan terpisah dari proses sebelumnya. Malah sebaliknya, pemuda Indonesia melalui putusannya itu menonjol kepeloporannya sebagai juru bicara masyarakat bangsa² dan sekaligus membawa semangat baru pada perjuangan yang telah ada. Unsur kepeloporan itu merupakan peranan khasnya sebagai fungsi dari ketiga hal tersebut di atas.

-
- 1 Lihat Suwarno, *op. cit.*, hal. 27; apa yang ditegaskan oleh Soegondo ini jika ditinjau dengan kaca mata tahun 1928-an adalah cermin daripada semangat jaman waktu itu; di mana seperti dikatakan juga oleh Ruben Naelan "organisasi pemuda, pelajar dan mahasiswa sampai dengan tahun 1930 memiliki cita-cita Kebangsaan Indonesia, meskipun di antaranya mengelompokkan diri dalam organisasi pemuda suku. Cita-cita Kebangsaan ternyata mengatasi faktor agama". (*Bunga Rampai Sumpah Pemuda*, hal. 527)
 - 2 Kesan sebagai "juru bicara" masyarakat bangsa ini secara jelas dapat diikuti kembali dalam pelbagai buku sejarah pergerakan bangsa Indonesia, antara lain seperti yang telah dikutip di atas. Sebagai tambahan ilustrasi lihat buku *Indonesia Merdeka* (pidato dari Bung Hatta tahun 1928); juga Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hal. 199; malah dalam tulisannya "Sekitar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928" Mohammad Hatta dengan tegas mengemukakan "bahwa sumpah pemuda itu yang mengatakan bahwa mereka bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa persatuan satu, adalah hasil daripada perjuangan politik yang dirintis oleh Perhimpunan Indonesia".

Andaikata ketiga hal tersebut memang ada benarnya sebagai unsur untuk melakukan peranan sebagai pelopor, mengapa justru pengalaman yang berharga itu sangat sukar dibina dalam alam kemerdekaan?

KONDISI KESATUAN DAN PERSATUAN DALAM MENGISI KEMERDEKAAN

Sumpah Pemuda telah mengarahkan pergerakan bangsa Indonesia sampai direbutnya kemerdekaan bangsa tanggal 17 Agustus 1945. Atau dengan kata lain, dalam alam penjajahan kita telah berhasil untuk bersatu demi tercapainya kemerdekaan. Akan tetapi sesudah kita merdeka ternyata kesatuan dan persatuan antara pelbagai golongan masyarakat untuk mengisi kemerdekaan sangat sulit dicapai.

Kemerdekaan yang telah dicapai membuka lembaran baru bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, yaitu terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ideologi negara Pancasila, UUD 1945,¹ berikut rangkaian kegiatan pembangunan serta pengalaman berkepemimpinan sendiri baik pada bidang pemerintahan maupun pada bidang kemasyarakatan pada umumnya. Andaikata hal-hal tersebut di atas kita anggap sebagai '*sumpah bangsa Indonesia*' untuk mengisi kemerdekaan maka tampak sekali dari semua pihak tidak ada kesatuan pengertian, sikap, tindakan dan kesungguhan untuk melaksanakannya. Begitu pun tidak ada hubungan antara ideologi dengan pembangunan berikut tidak tampak refleksinya dalam tingkah laku kepemimpinan. Masing-masing berjalan sendiri tanpa hubungan satu sama lain. Memang kita telah mempunyai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, akan tetapi untuk mengisi kemerdekaan, kita tidak mempunyai kesatuan bahasa, sehingga praktis tidak ada komunikasi antara pelbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal. Mungkin inilah warisan penjajahan yang paling mendasar bahwa akibat politik pecah belahnya, ternyata sangat mendalam pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia.² Walaupun secara formal kita sudah merdeka, akan tetapi secara mental kita belum bebas dari kelemahan-kelemahan, baik yang diwariskan maupun kelemahan ciptaan kita yang baru sebagai akibat proses perkembangan pada pelbagai bidang selama 35 tahun merdeka. Kelemahan-kelemahan itu pada pelbagai bidang perdefinisi merupakan bentuk penjajahan baru yang mungkin kita tidak sadari.

1 Mengenai masalah penuangan nilai ideologi negara Pancasila dalam konstitusi (UUD) tidak akan diperinci di sini. Akan tetapi yang jelas, bahwa dalam bidang inipun tampak para pemimpin tidak mempunyai 'kesatuan bahasa'. Hal mana antara lain tampak dari demikian seringnya pergantian konstitusi selama ini, sedangkan pada pihak lain, tidak ada satupun daripadanya yang pernah dilaksanakan secara bersungguh-sungguh.

2 Richard Robison, "Toward a Class Analysis of the Indonesian Military Bureaucratic State", *Indonesia*, No. 25, April 1978, p. 19

Sekedar ilustrasi. Misalnya ideologi negara Pancasila. Dari sejarah selama kita merdeka khususnya pada bidang ideologi negara, tampak paling tidak tiga kelemahan utama. Pertama, tidak ada usaha untuk mendalami pengertian ideologi negara Pancasila; dan sebagai akibatnya seperti yang dikemukakan oleh Syafruddin Prawiranegara, "belum semua orang, belum semua pemimpin dari berbagai golongan yang membentuk bangsa kita, sudah mengerti Pancasila". Dan itulah menurut beliau merupakan "letaknya kelemahan Pancasila".¹ Kedua, tidak ada contoh yang memadai dari mereka yang menyatakan diri sebagai Pancasilais dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, hampir semua organisasi kemasyarakatan terutama organisasi politik hingga sekarang ini di samping mempunyai ideologi negara Pancasila yang sering dijuluki sebagai "ideologi formal", juga mempunyai ideologi golongan, sehingga praktis selalu ada "dualisme ideologi" dalam masyarakat. Sebagai puncak dari ketiga kelemahan tersebut maka baik secara legal maupun ilegal ideologi negara dikhianati oleh semua pihak. Tampak sekali peranan integratif dari ideologi Pancasila masih pada taraf formal konstitusional dan belum fungsional. Malah sebagai yang telah dibuktikan oleh sejarah penyelewengan terhadap ideologi Pancasila, sering pelbagai pihak memberlakukan Pancasila sekedar sebagai *topeng* untuk menutupi kepentingan golongan atau semacam *nama samaran bersama* dari semua orang dengan mentalitas yang sering tidak selaras dengan namanya dan bertentangan satu sama lain. Dalam kondisi semacam ini sulit dilihat peranan ideologi dalam memecahkan masalah sosial yang dialami oleh seluruh masyarakat. Di manakah letak pemuda dalam masalah ideologi semacam ini? Dari 141 juta penduduk Indonesia pada tahun 1978, kira-kira 70% yaitu 98 juta berumur di bawah 30 tahun; dan lebih dari 50% daripadanya berumur 10-29 tahun.² Sebagian besar dari mereka ini berdiam di desa, sebagian buta huruf, putus sekolah dan menganggur atau setengah menganggur. Ditinjau dari sudut ideologi, sebagian besar dari mereka termasuk lapisan masyarakat yang disebut oleh Robert A. Dahl sebagai lapisan "apolitik".³ Dan hanya sebagian teramat kecil yang masuk dalam lapisan "politik". Yang terakhir ini dikatakan demikian karena menunjukkan gejala keterlibatan dalam politik seperti adanya interest, concern, serta berusaha mendapatkan informasi mengenai peristiwa politik dan aktif dalam kegiatan politik seperti ikut memberikan suara dalam pemilihan umum dan sebagainya. Mereka yang termasuk dalam lapisan politik ini sebagian besar mungkin terpengaruh oleh orientasi organisasi "induknya" mengenai ideologi Pancasila. Sedangkan mereka yang "independen" sukar dibayangkan orientasinya. Akan tetapi yang apolitik mungkin lebih tenggelam da-

1 Syafruddin Prawiranegara, *Sejarah sebagai Pedoman untuk Membangun Masa Depan*, Yayasan Idayu-Jakarta, 1975, hal. 7

2 BPS, *Indikator Ekonomi*, Mei 1978, hal. 164

3 Robert A. Dahl, *Modern Political Analysis*, Prentice-Hall, Inc., 1963, p. 55-71

lam kesibukan hidup dan kesulitan hidup sehari-hari yang tidak ada kesudahannya. Dalam hal apa dan sejauh mana ideologi negara ada relevansinya dengan masalah yang mereka alami, mungkin akan turut menentukan sikapnya kelak terhadap ideologi yang ada, baik positif maupun negatif dan karenanya pasti mempunyai implikasi politik ideologis tertentu. Mungkin dapat dikatakan bahwa di kalangan pemuda juga belum ada kesatuan pengertian dan sikap terhadap ideologi Pancasila, mereka umumnya lebih merupakan cermin pasif dari masyarakatnya, seperti adanya dualisme ideologis, indifferen dan apathis untuk tidak mengatakan terasingkan (alienated).

Kondisi ideologis semacam yang disebut di atas dalam sejarah republik ini tampak juga akibatnya terhadap pembangunan atau program pembangunan yang dilakukan selama ini. Apalagi kalau pembangunan itu seharusnya diartikan sebagai media fundamental untuk merealisasi nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Tampak pengaruh ideologi terhadap perkembangan keadaan dan pembangunan tidak jelas dan tidak tegas, dengan akibat bahwa perkembangan keadaan/pembangunan yang ada, mengandung dan karenanya mengundang pelbagai masalah. Misalnya, dalam "fase transisi" (1945-1950),¹ "Benteng program",² (1950-1955) yang bermaksud menunjang pengusaha nasional ternyata tidak mencapai sasarannya, pembangunan lima tahun (1956-1960) turut mengundang adanya "ketegangan-ketegangan antara Pusat dan Daerah",³ Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) (1960-1968) lebih merupakan alat bagi Soekarno untuk mendapatkan dukungan politik yang luas baik dari daerah-daerah, partai politik dan golongan fungsional termasuk ABRI; dukungan mana sangat diperlukan untuk terlaksananya kebijaksanaan-kebijaksanaan politik waktu itu yang berporoskan *Nasakom*, dengan puncaknya pada pemberontakan G-30-S/PKI tahun 1965.⁴ Pembangunan berikutnya sesudah tahun 1966 antara lain Repelita I dan II walaupun banyak membawa perubahan, akan tetapi juga menimbulkan

1 Presiden Soekarno dalam *pidatonya tanggal 17 Agustus 1950* mengemukakan bahwa perubahan keadaan dalam periode 1945-1950 sebagai "perubahan keadaan yang maha dahsyat"; malah dikatakan "sedikit sekali bangsa di dunia ini yang mengalami sekian banyaknya perubahan-perubahan keadaan yang demikian maha dahsyatnya dalam waktu yang demikian pendeknya, seperti bangsa kita"; lihat juga Mohammad Hatta, *Pelaksanaan Negara Kesatuan RI Lima Tahun* (pidato 17 Agustus 1950); lihat juga: Susanto Tirtoprodjo, *Sejarah Revolusi Nasional Indonesia Tahapan Revolusi Bersenjata 1945-1950*, PT Pembangunan Jakarta, 1963; masalah yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi dapat dilihat antara lain dalam karangan Soemitro Djojohadikusumo, *Persoalan Ekonomi di Indonesia*, Indira-Jakarta, 1953

2 Richard Robison, *op. cit.*, p. 19-20

3 *Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960*, Biro Perancang Negara, hal. 9

4 Kata Pengantar J.B. Soemarlin dalam buku tentang Perbankan di Indonesia yang dikarang oleh Heinz Arndt diterbitkan oleh Badan Penerbit Indonesia Raya, hal. 6-7

banyak masalah berikut akibat sampingan, yang mewarnai suasana akhir-akhir ini dan lain-lain kelemahan fundamental yang diakui sendiri oleh para penanggung jawab pembangunan antara lain adanya ketimpangan sosial yang menyolok antara golongan dan daerah.¹

Masalahnya yang paling mendasar dalam hubungan ini ialah sejauh mana masyarakat Indonesia (termasuk pemudanya) yang sudah mapan (established) mau berkorban untuk membina solidaritas sosial nasional secara berencana melalui pola pembangunan yang memadai; dan sejauh mana kemauan politik mengarah ke sana.

Sesudah membicarakan sepintas tentang kondisi ideologi dan pembangunan maka ada baiknya melihat pelaksana pembangunan yaitu masyarakat Indonesia yang untuk mudahnya dapat dibagi atas unsur masyarakat yang menjadi pemimpin termasuk penguasa dan masyarakat umumnya yang dipimpin. Tampak sekali bahwa sejak berkesempatan untuk bernegara/berpemerintahan sendiri kita belum sempat mengembangkan budaya kepemimpinan yang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945, yaitu antara lain "memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur",² yang berarti berorientasi kepada rakyat yang dipimpin demi melepaskan mereka dari belenggu kemelaratan.³ Semakin menggejala bahwa mental feodal lama dan lain-lain ciri masyarakat yang menghambat masih belum hilang sedangkan pada pihak lain menjamurnya gejala feodal baru yang tidak saja menulari lembaga negara/pemerintahan akan tetapi juga lembaga kemasyarakatan pada umumnya.⁴

Kaum feodal (lama) demikian menurut Bung Hatta, "tahu kewajiban terhadap masyarakat", sedangkan feodal baru, dikatakannya "hanya melihat pada haknya dan bukan kepada *tanggung jawabnya* terhadap masyarakat".⁵ Atau dengan kata lain kaum feodal baru lebih jahat dari kaum feodal lama. Dan dalam tahun 1966 Bung Hatta mengemukakan bahwa "kekuasaan yang tidak diimbangi oleh tanggung jawab mudah menjelma jadi sewenang-wenang".⁶ Adanya gejala seperti korupsi, komersialisasi jabatan, mental ABS,

1 Lihat usaha "Delapan Jalur Pemerataan" seperti yang dikemukakan oleh Presiden RI dalam pidato tanggal 16 Agustus 1978 di depan DPR-RI

2 Penjelasan UUD 1945

3 Lihat: Rufinus Lahur, "Tinjauan Dalam Negeri Tahun 1977", *Analisa*, Tahun VI, No. 12, Desember 1977, hal. 65

4 Nugroho, *Indonesia Sekitar Tahun 2000*, Jakarta, 1972, hal. 184-195; lihat juga sambutan Wakil Presiden Adam Malik yang mengemukakan agar anggota KORPRI 'jangan membiasakan diri bersikap feodal' (*Kompas*, 4 Desember 1978)

5 *Bung Hatta Menjawab*, Penerbit PT Gunung Agung Jakarta, 1978, hal. 184-185

6 Mohammad Hatta, *Mengambil Pelajaran dari Masa Lampau untuk Membangun Masa Datang*, Penerbit Angkasa Bandung, 1966, hal. 21

sikap tertutup, penyalahgunaan kekuasaan, pola hidup mewah, kurang berorientasi ke bawah pada hakikatnya menjauhkan pemimpin dari masyarakat yang dipimpinnya.¹ Akibatnya belum terwujudnya integrasi antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin. Karena kurang adanya hubungan maka kurang terbina saling pengertian dengan segala akibatnya antara lain saling curiga, buruk sangka dan sebagainya.

Rupanya suasana yang semacam ini tampak juga antara pemerintah dan dunia pemuda, hal mana tidak saja merugikan para pihak akan tetapi juga akhirnya merugikan seluruh masyarakat.²

Dari kondisi ketiga hal tersebut di atas yaitu ideologi, pembangunan dan pola budaya kepemimpinan tampak sekali bahwa dalam alam kemerdekaan ini masyarakat kita sulit sekali untuk bersatu mengisi kemerdekaan. Gejala ini sekaligus merupakan pertanda telah tumbuhnya suatu tuntutan kebutuhan akan sistem pembangunan yang bersumber Pancasila dengan mengembangkan solidaritas nasional demi semakin terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Kondisi sulitnya bersatu ini terefleksi juga pada pemudanya. Masalahnya apakah pemuda kita mau menjadi sekedar cermin pasif masalah masyarakat, dengan mental pegawai atau mau merupakan "nucleus" pengubah keadaan?

MENCARI KOMPONIS SISTEM PEMBANGUNAN MASYARAKAT PANCASILA

Sistem pembangunan masyarakat Pancasila pada pelbagai bidang seperti yang dimaksudkan oleh judul ini untuk mudahnya penulis analogikan saja dengan suatu nyanyian. Nyanyian yang sesuai dengan kebutuhan, kena di hati jelas lagu dan syairnya. Dengan demikian kita mengharapkan agar seluruh WNI tanpa kecuali dapat ikut dalam menyanyikan lagu ini, baik karena belajar sendiri maupun belajar dari orang lain. Sehingga berdasarkan pengetahuan itu siapa saja dapat menyanyikannya dalam suatu koor raksasa, koor nasional tanpa ada yang menganggur.

Contoh lebih konkrit. Satu lagu yang merupakan bagian dari putusan kongres tahun 1928 ialah lagu Indonesia Raya. Yang menarik bagi penulis ialah bahwa sang komponis Wage Rudolf Supratman, berkat pemahamannya yang dewasa terhadap semangat jamannya ia tergugah untuk mengungkap-

1 Lihat juga tema dan hasil Musyawarah Besar MKGR ke-1, tanggal 20-23 September 1978 di Semarang (*Antara*, 22 September 1978/A)

2 Lihat juga Sarlito Wirawan Sarwono, *Perbedaan antara Pemimpin dan Aktivis dalam Gerakan Protes Mahasiswa, suatu Studi Psiko Sosial* (Disertasi, 1978)

kannya dalam alunan lagu indah bersemangat berikut untaian syair yang selaras sebagai pencerminan semangat nasionalis dan patriotik yang gemilang yang sanggup membangkitkan semangat juang bangsa pada waktu itu dan seterusnya. Karena demikian kena di hati rakyat sehingga dalam waktu yang singkat tanpa penataran khusus, sebentar saja lagu itu dinyanyikan oleh seluruh rakyat dan menggema di seluruh tanah air, menjadi bagian dari hidup mereka. Di situlah kebesaran sang komponis, menciptakan sesuatu yang kemudian sekaligus menjadi milik bangsa Indonesia, dan terus hidup menjadi milik masyarakat walaupun sang komponis telah tiada.

Lagu Indonesia Raya awal kelahirannya merupakan suatu kebutuhan. Menurut *Ensiklopedi Umum* sang komponis mendapat gugahan dari Majalah *Timbul* yaitu Majalah Studie Club Sala yang pernah mengungkapkan jeritan jamannya dengan bertanya: "Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang dapat membangun semangat rakyat?" Tergugah oleh pertanyaan ini demikian menurut *Ensiklopedi* itu maka "terciptalah syair dan lagu oleh Supratman". Kita tidak perlu sependapat dengan ungkapan *Ensiklopedi* ini. Sebab karya apapun saja belum tentu hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja.¹ Akan tetapi intinya ialah bahwa kehausan jaman yang juga diwakili oleh Majalah *Timbul* telah dijawab oleh sang komponis dengan tepat, sesuai dengan tuntutan kebutuhan, sehingga semua masyarakat dapat ikut ambil bagian dalamnya sekaligus mengobarkan semangat juang bangsa. Lagu yang berbobot semacam itulah yang penulis analogikan dengan sistem pembangunan masyarakat Pancasila. Di mana semua warga negara Indonesia tanpa kecuali sesuai dengan kemampuannya masing-masing dapat mengambil bagian di dalamnya tanpa sekedar menjadi penonton yang menganggur di luar pagar pembangunan yang ada.

Selama ini memang telah pernah dilontarkan "lagu pembangunan" seperti yang telah disampaikan di atas, yaitu mulai tahun 1950-1955; 1956-1960; 1960-1968; kemudian disusul dengan Repelita I, II dan III. Akan tetapi lagu-lagu ini belum merupakan lagu sistem pembangunan masyarakat Pancasila yang kita maksud. Karena lagu-lagu ini belum memberikan jaminan kesempatan dan kepastian bagi setiap warga negara untuk ikut mengambil bagian dalamnya, walaupun mereka sangat gandrung untuk mengetahui dan untuk ambil bagian. Hal itu antara lain tampak dari begitu banyaknya yang masih menganggur dan setengah menganggur sekedar menonton segelintir orang yang sedang menyanyi dengan versinya sendiri-sendiri.

Keresahan masyarakat yang telah disaksikan oleh dewi sejarah sejak kita merdeka pada dasarnya merupakan kelanjutan pertanyaan Majalah *Timbul*

1 Bandingkan dengan pendapat yang berlainan sama sekali dari Biro Pemuda Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hal. 57

Sala dalam dimensi yang lain yaitu: Manakah komponis sistem pembangunan masyarakat Pancasila yang bisa menciptakan solidaritas nasional demi membangun semangat rakyat untuk membebaskan diri dari belenggu kemelaratan?

Inti daripada pertanyaan ini adalah jeritan akan perlunya suatu sistem yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang memungkinkan semua insan Indonesia dapat mengembangkan dirinya menjadi manusia dewasa, dalam arti yang seluas-luasnya. Masalahnya ialah sejauh manakah suasana yang ada sekarang ini mendorong dikembangkannya komponis-komponis tersebut yaitu pemikir-pemikir kemasyarakatan Indonesia pada pelbagai bidang yang merupakan cikal bakal nya tim komponis dari sistem pembangunan dimaksud. Kalau melihat kondisi kita selama ini maka apa yang dicita-citakan di atas masih merupakan impian. Kaum intelektual yang ada umumnya lebih merupakan barisan pemegang ijazah yang siap menjual jasanya pada pasaran kerja terutama untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sedangkan pemuda dan mahasiswa dalam kerangka masalah ini sangat terombang-ambing letaknya.¹ Maklumlah kepeloporan jenis apapun mustahil dapat dilakukan tanpa adanya kejelasan dan ketegasan peranan yang bakal dilakukan. Dengan demikian potensi kepeloporan yang ada pada mereka tetap potensial alias nganggur (idle). Inilah salah satu bentuk pemborosan negara sedang berkembang di mana ketidakmampuan mengembangkan suatu sistem yang fungsional mengakibatkan komponen sumber daya berubah menjadi beban yang tidak perlu, tidak saja beban ekonomis akan tetapi sosial politik.

Untuk menutup seksi ini, tidak dapat dihindari kesan bahwa rupanya para pemimpin Indonesia baru sanggup mengagumi simbol-simbol dan ternyata belum mampu mengoperasionalisasikannya; tentu ada macam-macam sebabnya, yang biasanya bertumpu di atas kepentingan mereka masing-masing. Rupanya manusia kaliber Supratman masih terlalu sulit dilahirkan dalam alam kemerdekaan ini. Mungkin benar apa yang pernah diungkapkan oleh Schiller bahwa "Suatu masa besar dilahirkan abad. Tetapi masa besar itu menemui manusia kecil".² Ini seharusnya dapat dianggap sebagai "ejekan" dewi sejarah sekaligus tantangan kepada kita semua terutama para pemuda-nya.

¹ Bandingkan dengan peranan yang seharusnya dilakukan oleh kaum terpelajar seperti yang diungkapkan Sutan Sjahrir dalam *Simposium tentang Kesulitan-kesulitan Jaman Peralihan Sekarang*, tahun 1952; berikut fungsi dan peranan para mahasiswa, dalam *Konperensi Sosialis Asia*, di Bombay tahun 1956 (H. Rosihan Anwar, *Perjalanan Terakhir Pahlawan Sutan Sjahrir*, PT Pembangunan Jakarta, 1966, hal. 74); lihat juga Moh. Hatta, *Tanggung Jawab Moril Kaum Inteligensia*, Pidato yang diucapkan pada hari Alumni ke-1 Universitas Indonesia tanggal 11 Juni 1957, kemudian diterbitkan oleh Penerbit "Angkasa" Bandung, 1966

² Moh. Hatta, *Demokrasi Kita*, Pustaka Antara PT Jakarta, 1976, hal. 33

PENUTUP

Pemuda tahun 1928 sebagai juru bicara masyarakat telah menunjukkan adanya kesatuan bahasa untuk melawan penjajah sampai diproklamirkannya kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Seperti telah diuraikan di atas, ternyata sesudah kita merdeka pemimpin-pemimpin masyarakat Indonesia belum mempunyai kesatuan bahasa dalam mengisi kemerdekaan itu, baik pada bidang ideologi, pembangunan, budaya kepemimpinan serta secara menyeluruh belum dibentuknya apa yang disebut sebagai sistem pembangunan masyarakat Pancasila pada pelbagai bidang dan karenanya sampai sekarang ini kita belum memiliki strategi pembangunan.¹ Salah satu akibat yang sangat menonjol dari keadaan tidak adanya kesatuan bahasa dalam mengisi kemerdekaan ini ialah adanya ketimpangan sosial yang semakin mendalam dan melebar antara gugusan kecil masyarakat kaya dan gugusan masyarakat yang terbesar yang miskin.² Kedua gugusan ini merupakan dua unit atau dua organisme yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Dalam perjalanan sejarah kedua organisme ini dapat membelah tubuh bangsa dalam dua bagian, atau katakan adanya "dua bangsa" dalam satu tanah air. Dengan semangat sumpah pemuda yang telah bertekad untuk berbangsa satu, bangsa Indonesia, maka gejala ketimpangan sosial yang ada sekarang ini yang dapat menjadi embrio pembelahan tubuh bangsa *haruslah* segera ditangani seawal mungkin sebelum terlambat.³

Salah satu cara untuk menanggulangi kemungkinan ini bagi negara kita ialah menyegarkan dan mengoperasionalkan kembali semangat yang *mengawali* sumpah pemuda tahun 1928 yaitu penggalangan perasaan senasib, sepenanggungan, rasa solidaritas nasional yang seharusnya tercermin dalam sistem pembangunan masyarakat Pancasila. Sehingga warga negara Indonesia yang paling lemah "dimampukan" untuk dapat memanfaatkan kesempatan dan kemudahan (fasilitas) yang ada. Khususnya untuk dapat memanfaatkan "delapan jalur pemerataan" yang dikemukakan oleh Presiden dalam pidatonya tanggal 16 Agustus 1978 di depan DPR-RI. Atau dengan kata lain "delapan jalur pemerataan" itu tidak terpisah dan terlepas satu sama lain, akan tetapi merupakan satu kesatuan kebijakan (policy) yang merupakan bagian

-
- 1 Daoed Joesoef, "Orde Baru Belum Memiliki Strategi Pembangunan", *Derap*, No. 16, awal April 1978, hal. 35
 - 2 Sekedar ilustrasi, lihat Singarimbun, Masri dan Penny, D.H., *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*, Bhratara, Jakarta, 1976
 - 3 Arnold Toynbee, *Surviving The Future*, London Oxford University Press New York Toronto, 1971, p. 10

dari sistem yang lebih luas, yaitu apa yang disebut di atas sebagai sistem pembangunan masyarakat Pancasila.

Salah satu dari delapan jalur ini lebih dikhususkan kepada pemuda yaitu "pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita". Jalur inipun hanya dan seharusnya hanya merupakan bagian integral dari keseluruhan seperti telah disebut di atas. Masalahnya tetap yang itu-itu juga, yaitu apakah pemimpin-pemimpin masyarakat kita mempunyai kesatuan bahasa dalam mengoperasionalisasikannya.

Tampaklah bahwa pemuda sekarang ini dapat dianggap sebagai korban dari belum adanya kesatuan bahasa dalam mengisi kemerdekaan ini. Dan inilah *warisan mendasar* yang sulit terpikulkan oleh mereka nanti pada masa yang akan datang, dengan segala akibatnya yang barangkali di luar daya khayal dari semua manusia Indonesia yang hidup sekarang ini.

Walaupun begitu, bagaimanapun, hukum alam menyuruh kita untuk tetap bertumpu harapan pada manusia pemuda, karena pada akhirnya merekalah *satu-satunya warisan* yang bertanggung jawab dalam menghadapi masalahnya pada masa depan. Seperti yang dipesan oleh Sutan Sjahrir kepada Subadio Sastrosatomo di penjara Madiun (1963) bahwa "Penyelesaian revolusi Indonesia adalah di tangan kaum muda kita. Merekalah yang menentukan hari depan bangsa dan tanah air. Karena itu engkau jangan meremehkan mereka, bimbinglah mereka ke jalan yang benar ialah jalan pembaruan menuju masyarakat adil dan makmur, tanpa penghisapan dan penindasan".¹

Mudah-mudahan realita pahit yang ada dalam masyarakat dapat semakin membuka mata, pikiran dan hati mereka sehingga terbenih nilai baru yang memungkinkan pemuda kita, tidak sekedar tenggelam dalam kemelut masalah masyarakatnya akan tetapi dapat melepaskan diri dari padanya. Sehingga dapat dipenuhi apa yang menjadi harapan dan keyakinan orang pada umumnya bahwa "Golongan muda di mana saja dan pada jaman apapun tetap merupakan golongan yang peka terhadap hal-hal yang tidak adil, yang bertentangan dengan kemerdekaan dan yang menyinggung rasa harga diri manusia. Nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada mereka merupakan sumber energi dan semangat yang dapat mengatasi rasa takut dan rasa cemas tentang hari depannya".²

Dalam hubungan ini kita haruslah belajar dari "cara belajar" para pemimpin pergerakan terutama pada periode pra-kemerdekaan. Yaitu bahwa mereka tetap tekun belajar sendiri atau bersama-sama mengikuti perkembangan ilmu

1 H. Rosihan Anwar, *op. cit.*, hal. 75

2 R. Soegarda Poerbakawatja, "Nilai-nilai Kemanusiaan adalah Suatu Sumber Energi dan Semangat dalam Perjuangan Hidup", *Bunga Rampai Sumpah Pemuda*, BP PN Balai Pustaka, 1978, hal. 25

pengetahuan sekaligus terus mendalami dan mempertajam pengertian terhadap realita masalah masyarakatnya secara keseluruhan, yang kemudian melahirkan sikap dan tindakan yang tepat dan tegas disertai keteguhan watak yang menggairahkan masyarakat umumnya. Ketiga unsur ini merupakan komponen daripada idealisme, nasionalisme dan patriotisme mereka yang antara lain berpuncak pada peristiwa bersejarah 28 Oktober 1928 itu. Sesudah 35 tahun merdeka bangsa Indonesia telah memiliki 363 Pendidikan Tinggi (40 daripadanya adalah negeri),¹ berarti secara rata-rata hitung satu daerah tingkat II di Indonesia ini mungkin mempunyai lebih dari satu Perguruan Tinggi, apalagi pada ibu kota Daerah Tingkat I (propinsi).

Masalahnya sejauh mana lembaga ilmiah ini membantu perkembangan ilmu di Indonesia berikut mutu ilmunya terutama dalam menelaah masalah bangsanya? Sehingga jangan terus diwariskan gejala yang tidak sehat bahwa untuk mengetahui masalah bangsa Indonesia pada pelbagai bidang, bahkan untuk mengetahui pemikiran para pemikir dan riwayat hidup malah autobiografi pemimpin Indonesia, kita harus mempelajari melalui penulis asing dan karenanya melalui "kaca mata asing" pula. Kapankah pemuda Indonesia dapat menelaah masalah bangsanya dengan kaca matanya sendiri? Mungkin ini tantangan terutama bagi 255.000 mahasiswa yang sekarang ini sedang "berkesempatan emas" belajar pada 363 Pendidikan Tinggi di seluruh tanah air untuk belajar keras demi menjawab masalah ini, yang tidak saja memalukan akan tetapi juga tidak membenihkan rasa harga diri dan percaya kepada diri sebagai bangsa pada pemuda kita pada masa yang akan datang. Bagaimana mungkin budaya suatu bangsa dapat berkembang tanpa bangsa itu menjiwai "sikap budaya Science"? Bangsa demikian itu "tidak hanya terhipit dalam bidang penghidupan tetapi juga mudah kehilangan kepribadiannya".²

Demi memenuhi fungsinya maka lembaga pendidikan tinggi membutuhkan banyak hal, tidak hanya iklim untuk hidup, akan tetapi juga penentuan kurikulum yang tepat, mutu guru dan lain-lain kemudahan (fasilitas) yang memadai. Atau dalam lingkungan yang lebih luas "kita harus membuka ruang dan mengembangkan iklim yang subur bagi tumbuhnya berbagai pangkalan pemikiran, dan dalam proses saling membanding dan saling mengasah ketajaman persepsi, kejauhan jangkauan berpikir dan kelengkapan

1 Menteri P dan K, Sjarif Thajeb, *Beberapa Aspek Pendidikan Tinggi di Indonesia*, Direktorat Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen P dan K, 1977, hal. 4; lihat juga *Perkembangan Perguruan Tinggi Selama 20 Tahun Indonesia Merdeka*, disusun oleh Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan

2 Lihat *Perkembangan Science di Indonesia*, yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Pasti dan Alam Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 27

informasi masing-masing, dapatlah didorong satu proses pemikiran yang kreatif yang dapat menolong masyarakat kita melangkah maju".¹

Mungkin inilah jalan yang memberi harapan untuk mencari peranan kepeloporan. Sebetulnya jalan ini, jalan lebar dan luas akan tetapi sering dikerdilkan (kesempitan pandangan) kita sendirilah yang membuat jalan ini menjadi teramat sempit bahkan seolah-olah tertutup sama sekali. Masalahnya maukah kita, pemuda sekarang ini, memperluas cakrawala hidup ini demi membenihkan suatu peranan untuk menjawab tantangan masa depan secara lebih bermakna, sehingga dengan demikian dapat menerobos kondisi makro dan kondisi mikro yang mungkin menghambat.

Salah satu cara daripadanya yang lebih konkrit ialah mengembangkan semangat wiraswasta pada kalangan pemuda, dengan demikian mereka tidak menyerah kalah terhadap keadaan, akan tetapi mampu menciptakan sesuatu yang dapat menolong diri sendiri dan lingkungan dan sekaligus secara makro membina "perjuangan mewiraswastakan bangsa", seperti yang akhir-akhir ini secara sadar, berencana dan penuh keyakinan dan bersemangat dilancarkan oleh perintisnya Suparman Sumahamijaya.²

Memang setiap periode mempunyai masalah, kebutuhan dan tuntutan peranan tertentu dari warganya, yang berbeda dari satu periode ke periode lainnya. Keberdikarian dan kepeloporan dari pemuda tahun 1928 sangat jelas dalam melakukan peranan dari jamannya. Maukah pemuda masa kini membaca peranan jamannya dan memeloporinya seperti antara lain yang sudah dirintis oleh Suparman Sumahamijaya tersebut di atas?

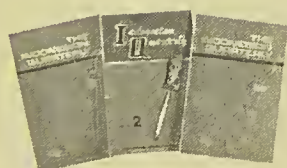
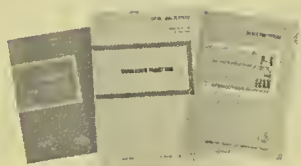
Tampak semakin terasa oleh kalangan pemuda bahwa sangat diperlukan penempatan kemauan membaja untuk memaksa membina diri sendiri dari dalam dan dari bawah secara terus-menerus. Kerja keras semacam ini merupakan satu-satunya jaminan untuk berharap akan masa depan yang lebih baik. Dan semuanya ini terletak dalam genggam tangan para pemuda. Dengan semangat semacam ini, dalam pidato pembelaannya di hadapan Pengadilan Den Haag tanggal 9 Maret 1928 pemuda Hatta mensiter ucapan pujangga

1 Mochtar Lubis, *Bangsa Indonesia (Masa Lampau - Masa Kini - Masa Depan)*, Yayasan Idayu-Jakarta, 1978, hal. 29; lihat juga Dick Hartoko, "Tanda-tanda Jaman", *Majalah Basis*, Oktober 1978, XXVIII, No. 1

2 Lihat Suparman Sumahamijaya, "Perjuangan Kewiraswastaan Bangsa", *Bunga Rampai Sum-pah Pemuda*; berikut tulisan dari penulis yang sama, antara lain: *Arti dan Peranan Kewiraswastaan bagi Ketahanan Bangsa* (1978); *Pembangunan Masyarakat Pancasila: melalui Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia dengan Sistem Pendidikan Sikap Mental Wiraswasta* (1978); dan *Waktu, Watak Wiraswasta*; di samping itu telah diterbitkan oleh Panitia Penyelenggara Lokakarya Sistem Pendidikan dan Pengembangan Kewiraswastaan di Indonesia tahun 1978 *Sistem Pendidikan dan Pengembangan Kewiraswastaan di Indonesia*

kenamaan Rene de Clercq yang mengatakan: "Hanya satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dari perbuatan dan perbuatan itu adalah usahaku."

Kata-kata pujangga ini dikatakan oleh Bung Hatta waktu itu sebagai pedoman dari Indonesia Muda. Dan mudah-mudahan pemuda masa kini mau merenungkannya kembali untuk dapat membarui semangat juangnya serta meneruskan dan mengisi kelanjutan semangat juang pemuda 1928. Insya Allah.



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa majalah dan buku-buku:

ANALISA

terbitan berkala, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Termasuk dalam seri ini adalah MONOGRAF yang membahas satu analisa tertentu. Harga per eks Rp. 500,— langganan setahun (12 nomor) Rp. 6.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp. 4.800,—

THE INDONESIAN QUARTERLY

Majalah triwulan, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp. 800,—, langganan setahun (4 nomor) Rp. 3.200,—

BUKU—BUKU

hasil penulisan staf CSIS baik mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada:

BIRO PUBLIKASI — CSIS

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

Jl. Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat Telepon 349489

Untuk menunjang kegiatan pengkajian CSIS juga menyediakan PERPUSTAKAAN dan CLIPPINGS yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat. Untuk keperluan tersebut hubungilah:

PERPUSTAKAAN CSIS dan BIRO INFORMASI DAN DATA CSIS

Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat, Telepon 356532-5